

Pada tahun ini, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Nomor 85/M/ KPT/2020 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I tahun 2020, Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan (JPKP) telah ditetapkan sebagai Jurnal Terakreditasi Peringkat 5. Capaian tersebut menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas JPKP pada terbitan-terbitan selanjutnya melalui peningkatan mutu artikel dan penampilan jurnal dari segi desain dan lay out.

Sebagaimana terbitan terdahulu, JPKP Volume 13 nomor 2 tahun 2020 ini menampilkan topik-topik yang bervariasi, mulai dari kebijakan sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, pendanaan pendidikan, sampai budaya literasi. Dwirtya Sobat Ady Dharma membahas tentang kebijakan strategis di sekolah dalam pengurangan risiko bencana (PRB) pada masa pandemi tanpa mengurangi strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa dan juga mampu memfasilitasi warga sekolah untuk menjalankan fungsinya dengan optimal. Selanjutnya, Mariani dkk, menyoroti tentang sikap dan perilaku disiplin siswa SMK dalam menggunakan alat pelindung diri dalam rangka penerapan keselamatan dan kesehatan kerja ketika melakukan praktik di bengkel/laboratorium/dapur.

Selain itu, Bambang Suwardi Joko menulis tentang upaya-upaya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP dalam mengoptimalkan profesionalisme guru di tengah kendala dan keterbatasan. Sementara Zainul Mustofa menyampaikan penguasaan siswa SMK bidang Teknik Komputer dan Jaringan untuk topik Pengukuran dengan menggunakan media zipgrade.

Meiynana dan Sari Viciawati Machdum, menyoroti keberhasilan penerapan PIP dengan dukungan empat aspek yang saling terkait yaitu komunikasi yang baik, koordinasi antar unsur yang terlibat, sumber daya yang memadai, dan birokrasi yang menjalankan peran dan fungsinya secara baik. Kemudian, M. Zaenul Muttaqin membahas bagaimana Komunitas Lontar menjalankan strategi penyebaran literasi dengan memanfaatkan ruang publik untuk melapak buku, diskusi ilmiah dan penulisan di dalam ruang kelas, serta memanfaatkan media sosial untuk kampanye literasi di dua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Semua artikel tersebut diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan daya kritis para pembaca terhadap kebijakan pendidikan. Akhir kata, Dewan Redaksi Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan mengucapkan selamat membaca dan semoga mendapatkan manfaat dari artikel-artikel yang disajikan.

ISSN : 02162792 E-ISSN : 2654427X

JURNAL PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Volume 13 Nomor 2/2020

Daftar isi

1. Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana COVID-19:
Pengalaman Sekolah Tumbuh
Dwitya Sobat Ady Dharma79
2. Peningkatan Sikap dan Disiplin Siswa SMK Menggunakan Alat Pelindung Diri
dalam Pembelajaran K3
Mariani, Agus Amin Sulistyono, dan Subijanto93
3. Upaya MGMP Mapel Sekolah Menengah Pertama dalam Meningkatkan
Profesionalisme Guru di Tengah Berbagai Kendala dan Keterbatasan
(Studi Kasus di Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat)
Bambang Suwardi Joko109
4. Pemanfaatan Zipgrade Sebagai Media Penilaian untuk Memetakan Penguasaan
Siswa Terhadap Topik Pengukuran di SMK
Zainul Mustofa129
5. Implementasi Kebijakan Sosial dalam Bidang Pendidikan Program Indonesia
Pintar (Studi Pada Jenjang SMA di Kecamatan Babakan)
Meiynana139
6. Peran dan Strategi Komunitas Lombok Pintar (Lontar) dalam Menyebarkan
Budaya Literasi di Nusa Tenggara Barat
M. Zaenul Muttaqin Zaenul155

ABSTRACT

All educational institutions, both private and public, have a role and responsibility to continue to provide quality education. In the context of policy, educational institutions must be able to produce strategic policies that are not only student-centered, but also able to facilitate school members to carry out their functions optimally. This study focuses on policies taken on COVID-19 disaster risk reduction (PRB) in Yogyakarta Tumbuh Schools (SD Tumbuh 1, SD Tumbuh 2, SD Tumbuh 3, SD Tumbuh 4, SMP Tumbuh, and Tumbuh High School). This study used qualitative methods with a literature and empirical approach. The data is obtained from the COVID-19 disaster emergency response policy formulated by the School Principal, HRM, and phenomena that occur in schools. The data used are in the form of circular letters as policy products, and various documents. The results showed that the DRR policies in Growing Schools applied humanist principles that were able to accommodate the needs of school residents (students, teachers, and staff). Policy implementation is carried out in a systematic flow so that it is easily understood by school residents and is made by prioritizing the deliberations of the leaders.

Keywords: Policy, DRR, COVID-19, Sekolah Tumbuh

ABSTRAK

Semua lembaga pendidikan, baik swasta maupun negeri, memiliki peran dan tanggung jawab untuk ikut tetap menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks kebijakan, lembaga pendidikan harus mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis yang tidak hanya berpusat pada siswa, tapi juga mampu memfasilitasi warga sekolah agar tetap melaksanakan fungsinya dengan optimal. Studi ini memfokuskan pada kebijakan yang diambil pada pengurangan risiko bencana (PRB) COVID-19 di Sekolah Tumbuh Yogyakarta (SD Tumbuh 1, SD Tumbuh 2, SD Tumbuh 3, SD Tumbuh 4, SMP Tumbuh, dan SMA Tumbuh). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Data didapat dari kebijakan tanggap darurat bencana COVID-19 yang dirumuskan oleh Kepala Sekolah, HRM, serta fenomena yang terjadi di sekolah. Data yang digunakan berupa surat-surat edaran sebagai produk kebijakan, dan aneka dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PRB di Sekolah Tumbuh menerapkan prinsip humanis yang mampu mengakomodasi kebutuhan warga sekolah (siswa, guru, dan staf). Penerapan kebijakan dilakukan dengan alur yang sistematis sehingga mudah dipahami oleh warga sekolah dan dibuat dengan mengedepankan musyawarah para pemimpin.

Kata kunci: Kebijakan, PRB, COVID-19, Sekolah Tumbuh

PENDAHULUAN

Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan bahwa Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) sebagai pandemi pada 12 Maret 2020 (WHO, 2020). UNESCO memperkirakan ada 107 negara yang akan menutup sekolah dan berdampak pada 862 juta anak usia sekolah (UNESCO, 2020). Penutupan sekolah ini berdasarkan asumsi bahwa dengan adanya pembatasan fisik, penyebaran virus dapat diminimalisasi. Penelitian di UK pada anak sekolah dan pemuda menunjukkan bahwa kontak fisik yang terjadi selama di sekolah rata-rata setengah dari waktu sekolah (Eames, 2011). Sampai saat ini, belum ada data yang memastikan bahwa penutupan sekolah berdampak besar pada penanggulangan COVID-19. Dari berbagai penelitian yang dilakukan saat wabah besar yang terjadi di dunia beberapa saat lalu, penutupan sekolah memiliki dampak yang sangat kecil dalam mencegah penyebaran virus (Cow, 2004; Cowling, 2008). Hasil dari penelitian ini tentu tidak dapat dijadikan patokan karena virus telah berkembang sangat cepat dan memiliki karakteristik yang berbeda. Penutupan sekolah ini sebagai salah satu implementasi dari pembatasan sosial yang harapannya dapat memutus mata rantai penyebaran. Oleh karena itu, kebijakan penutupan sekolah diambil oleh banyak negara di dunia.

Kebijakan penutupan sekolah juga diambil oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia berusaha ekstra karena penutupan sekolah secara masif ini baru pertama kali dilakukan sepanjang sejarah. Berdasarkan data, penutupan sekolah seringkali terjadi karena bencana lokal dan bersifat parsial, misalnya banjir, tanah longsor, maupun gunung meletus. Pada pandemi COVID-19, Indonesia berkaca pada kebijakan UNESCO pada *Incheon Declaration and Framework for Action 2030* yang mengatakan bahwa negara-negara seharusnya membuat alternatif model pembelajaran dan pendidikan bagi siswa yang bersifat fleksibel secara formal maupun informal dalam situasi yang berbahaya (Huang, 2020). Penutupan sekolah ini berdampak besar, tidak hanya pada siswa namun juga kepada seluruh warga sekolah. Dalam berbagai kasus, beberapa sekolah swasta meliburkan guru dan karyawan tanpa kejelasan gaji. Kebijakan ini ditempuh karena sekolah tidak memiliki manajemen yang terencana, kapasitas finansial yang rapuh, dan para pemimpin sekolah yang kurang mampu menghasilkan kebijakan yang menentramkan semua pihak.

Merespon keadaan ini, Sekolah Tumbuh memiliki manajemen khas dalam penanggulangan bencana. Sebagai sebuah pandemi baru, jajaran pemimpin Sekolah Tumbuh menghasilkan beberapa kebijakan yang mendukung manajemen bencana. Kebijakan yang dihasilkan bersifat dinamis dan selalu diperbaharui dengan memperhatikan situasi terkini. Sekolah Tumbuh sadar bahwa apabila kebijakan tidak diperbaharui akan berdampak menurunnya kualitas pelayanan pendidikan yang dapat dilihat dari berbagai permasalahan, seperti kekacauan dalam pengaturan pegawai. Kekacauan ini akan diikuti dengan rendahnya pelayanan kepada peserta didik yang akan berakibat pudarnya kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Tumbuh.

Keadaan dunia yang semakin mengkhawatirkan direspon cepat oleh sekolah Tumbuh karena belum memiliki manajemen mitigasi bencana COVID-19. Mitigasi bencana yang sudah dipunyai oleh Sekolah Tumbuh berupa mitigasi gempa bumi dan bencana yang mengiringinya, misal kebakaran, sakit, kecelakaan, dan alur claim asuransi. Sebagai sekolah yang tanggap pada bencana, Sekolah Tumbuh berupaya ekstra menyediakan layanan-layanan pendidikan, pengaturan pegawai, dan pengaturan aktivitas yang memenuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Beragam kebijakan yang dirancang Sekolah Tumbuh ini sebagai implementasi salah satu visi sekolah, yaitu penunjukkan kesadaran sebagai salah satu warga dunia yang aktif dan berpikiran terbuka (Parent Handbook Tumbuh High School, 2015). Berkaca dari visi dan keadaan dunia yang berperang melawan virus Corona, pembuatan mitigasi bencana COVID-19 yang merupakan hal baru ini dirancang setelah Gubernur DIY mengeluarkan tanggap darurat bencana COVID-19.

Pembuatan kebijakan untuk mengurangi risiko bencana COVID-19 yang tertata sangat diperlukan untuk tetap mencapai tujuan bersama. Luaran yang diharapkan dari pembuatan kebijakan agar sekolah mampu membuat cetak biru manajemen mitigasi bencana COVID-19 yang lebih tersistem sehingga dapat melakukan evaluasi untuk perbaikan, perlu digarap secara serius karena bencana bisa datang kapan saja. Dengan berbagai macam masalah yang dihadapi dan kekhasan sekolah, maka keharusan bagi sekolah ikut berpartisipasi memberikan solusi. Dari pemikiran di atas, muncul pertanyaan penelitian

berupa 1) kebijakan seperti apa yang mampu mengakomodasi kebutuhan warga sekolah?, dan 2) bagaimana langkah implementasi kebijakan PRB COVID-19 di Sekolah Tumbuh?.

COVID-19

Pada bulan Desember 2019, terdapat wabah COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok (Zhu, 2019). COVID-19 disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Penyebaran virus ini sangat pesat sehingga tanggal 11 Maret 2020, WHO menyebut wabah ini sebagai pandemi. Apabila seseorang terpapar, COVID-19, gejala yang dapat dirasakan adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah yang berlebihan. Beberapa juga akan mengalami nyeri, hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan. Gejala ini akan dialami bertahap, dari ringan sampai yang parah, bahkan beberapa orang tidak menunjukkan gejala. Namun begitu, 80% dari yang terinfeksi dapat pulih dengan melakukan isolasi mandiri dan menjalankan hidup sehat (WHO, 2019). Pihak yang harus diwaspadai adalah golongan lansia dan orang yang memiliki penyakit kronis.

Dari penyelidikan awal, virus berasal dari pasar makanan laut di Wuhan (Xinhua, 2020) yang kemudian dengan cepat menyebar ke beberapa wilayah. Wabah ini menyebar sangat pesat karena virus ikut menyebar melalui pergerakan manusia. Sampai tanggal 9 Mei 2020, sudah menyebar di 215 negara, 3.862.676 yang terkontaminasi dan 265.961 yang meninggal. Di Indonesia, ada 13.645 yang positif dengan korban meninggal sebanyak 959 (Gugus Tugas COVID, 2020). COVID-19 dapat menular melalui percikan dari hidung dan mulut saat batuk atau bersin. Percikan ini apabila mengenai permukaan benda dapat bertahan selama beberapa jam, tergantung dari material dan suhu dari benda tersebut. Apabila virus belum mati, benda yang terpapar percikan tersebut dapat menjadi media penularan, apalagi ketika tangan menyentuh mata, hidung, dan mulut (Wang, 2020; WHO, 2020).

Berkenaan dengan pandemi, Presiden RI menyatakan status COVID-19 menjadi tanggap darurat pada tanggal 17 Maret 2020. Untuk penanganan yang lebih sistematis, presiden mengeluarkan Kepres nomor 7 tahun 2020 terkait Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona yang diketuai oleh kepala BNPB. Fungsi dari

Gugus Tugas untuk mempercepat penanganan COVID-19, melakukan kerjasama yang masing antar lembaga dalam bidang kebijakan, kesiapan, dan respons cepat dari permasalahan yang terjadi, serta meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan.

Sejak pandemi COVID-19 semakin meluas, banyak pihak yang membuat rencana strategis untuk menekan laju penyebaran wabah, misal dengan menerapkan pembatasan sosial, karantina wilayah, dan meliburkan sekolah-sekolah (Zhang et al, 2020; Yue et al, 2020; Mahase, 2020). Agenda ini didukung dengan kebijakan terkait pendidikan misalnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat penyebaran COVID-19, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 65/Kep/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di DIY, Surat Edaran Gubernur DIY nomor: 443/01357 tentang Antisipasi Penyebaran Infeksi COVID-19 di Lingkungan Pendidikan DIY, dan Surat Edaran Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga DIY nomor: 421/02393 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19.

Kebijakan-kebijakan ini diambil karena COVID-19 menular dengan cepat, apalagi ketika sedang berada di daerah pusat wabah. Di beberapa lokasi, penyebaran mungkin bisa rendah, namun di daerah dengan padat penduduk penyebaran bisa sangat membahayakan. Orang yang sering melakukan mobilitas tinggi, saling berkunjung, melakukan kontak fisik juga mempercepat penularan. Oleh karena itu, sebisa mungkin menjaga kontak fisik dengan orang lain, sesering mungkin melakukan cuci tangan pakai sabun, tidak mudik, memakai masker ketika ke luar rumah, dan tidak ke luar rumah kecuali untuk agenda yang sangat penting.

Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan kegiatan jangka panjang dan bagian dari pembangunan berkelanjutan. PRB diharapkan dapat mencapai sasaran yang lebih luas sehingga harus dikenalkan sedini mungkin dalam lingkup sekolah (Kemdikbud, 2015). PRB bersifat sistematis, sadar, terencana untuk memberdayakan manusia pada bidang

pengurangan bahaya, pengurangan kerentanan manusia, manajemen, dan peningkatan kesiapan pada bencana (Ariantoni, 2009; Kankanamge et al, 2019). Secara umum, tujuan PRB adalah untuk meningkatkan kesiapan, kapasitas masyarakat, penyusunan pembangunan partisipatif, dan menyusun pembangunan berdasarkan PRB.

PRB bersifat interaktif, menggunakan kearifan lokal, dan lebih luas dari lembaga pendidikan formal. UNICEF berperan mengintegrasikan jaringan lokal dan global yang tersusun dalam Kerangka Kerja Hyoko yang menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan secara simultan untuk membangun budaya aman dan ketahanan pada setiap level masyarakat. kerangka kerja Hyoko memiliki tiga strategi, yaitu integrasi dalam kebijakan pembangunan, pengembangan kekuatan lembaga, dan kerjasama sistematis. Sedangkan lima prioritas kegiatan, meliputi penempatan PRB dalam skala prioritas nasional, identifikasi risiko bencana, penggunaan pengetahuan, mengurangi faktor risiko, dan memperkuat kesiagaan bencana. Strategi dan prioritas ini menjadi acuan dalam pengarusutamaan PRB di sekolah (Dirjen Dikdasmen, 2010).

Terdapat peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menerapkan PRB dengan melibatkan siswa dalam mitigasi bencana dan aktivitas persiapan menghadapi bencana, misalnya mengidentifikasi bahaya dan rencana evakuasi yang dilakukan di rumah serta sekolah (Pfefferbaum, 2018). Implementasi ini membawa perubahan kebijakan manajemen bencana yang mengubah cara pandang dari responsif menjadi pencegahan, dari satu sektor menjadi multisektor, dari inisiatif pemerintah menjadi tanggung jawab setiap pemangku kebijakan, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dan dari mitigasi formalitas menjadi pengurangan risiko menjadi yang komprehensif.

Lembaga pendidikan menjadi tempat yang penting untuk dilakukan PRB karena siswa merupakan sumber daya yang dapat dididik untuk menjadi pendukung persiapan bencana di masa kini dan masa depan (USDHHS, 2017). Implementasi PRB terbagi menjadi tiga cara, yaitu integrasi dalam pembelajaran reguler, menjadi sebuah mata pelajaran, dan integrasi dalam kegiatan pengembangan diri. Dalam pelibatan siswa dalam PRB, lembaga memerlukan kegiatan yang bermakna, beragam, dan menarik sehingga siswa dapat tertarik dan mengekspresikan partisipasinya

dengan cara yang berbeda (Fleming, 2013). PRB dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah yang didukung dengan kebijakan dan kerangka yang jelas. PRB berbasis sekolah bertujuan untuk menumbuhkembangkan nilai kemanusiaan, sikap peduli bencana, pemahaman risiko bencana, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan tanggap darurat, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi siswa (Dirjen Dikdasmen, 2010). Tata kelola PRB menunjukkan kemajuan besar di Indonesia karena didukung dengan regulasi yang semakin teristem, kerjasama dengan berbagai lembaga swadaya, dan memanfaatkan kearifan lokal (Djalante, 2017; Suarmika & Utama, 2017; Proulx & Aboud, 2019).

Sekolah Tumbuh

Sekolah Tumbuh merupakan sekolah Inklusi Multikultur yang terdiri atas SD Tumbuh 1, SD Tumbuh 2, SD Tumbuh 3, SD Tumbuh 4, SMP Tumbuh, dan SMA Tumbuh. Sekolah berada dalam wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dimana secara sosiologis merupakan masyarakat yang plural dan majemuk, sehingga spirit yang dimiliki adalah *Jogja's educational spirit*. Filosofi pendidikan yang dianut adalah pendidikan sebagai proses pembelajaran untuk mencapai potensi terbaik kehidupan siswa. Tujuan dari pembelajaran adalah "*facilitating student-A hands on, mind on and Heart on changing and a part of world community*". *Hands on* berarti memfasilitasi dan mendorong anak untuk menjadi manusia pembelajar dan terus tertarik belajar secara antusias melalui pengalaman langsung. *Mind on* berarti mendorong anak untuk terus berpikir, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, memecahkan persoalan, berpikir kritis dan tertantang untuk melakukan inovasi. *Heart on* berarti mendorong anak untuk menjadi *lifelong-learner*, reflektif dan memiliki kepekaan atas dunia yang terus berubah dan peduli lingkungan.

Sekolah Tumbuh menggunakan model inklusi penuh yang berusaha mengikutsertakan siswa berkebutuhan khusus di kelas-kelas reguler dan kegiatan sekolah tanpa membedakan kebutuhannya. Sekolah ini sudah tidak lagi memberi label pada kekhususan anak karena istilah pelabelan terlalu sensitif dan tidak sesuai dengan semangat SDGs. Untuk mengakomodasi kebutuhan dalam pembelajaran, SMA Tumbuh menggunakan *open task*, dimana siswa dapat mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan

kemampuannya. Cara penanganannya pun telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan kekhususan, ke arah yang lebih mengedepankan pendekatan bahwa setiap anak adalah unik. Pergeseran paradigma ini menjadi landasan pada setiap pengambilan keputusan.

Visi dari Sekolah Tumbuh adalah anak tumbuh dan berkembang sebagai pembelajar yang berkarakter, menghargai keberagaman, mencintai tanah air dan kearifan lokal, serta menunjukkan kesadaran sebagai warga dunia. Sedangkan misi sekolah adalah (1) Menyelenggarakan pendidikan inklusif yang mengembangkan anak sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing (SDG-4: *quality education*). (2) Memberikan pembelajaran yang mendorong anak menghargai keragaman agama, ekonomi, dan budaya (SDG-16: *peace and justice*). (3) Memberikan pembelajaran yang mendorong anak menghargai kekayaan bangsa dan potensi lokal (SDG-11: *sustainable cities and communities*). (4) Memberikan pembelajaran yang menyiapkan anak sebagai warga dunia yang aktif dan berpikiran terbuka (SDG-4: *quality education*).

Dari visi dan misi tersebut, tujuan utama dari sekolah adalah (1) memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan kebutuhannya (SDG-4: *quality education*), (2) menjadi *resource center* bagi masyarakat tentang pengembangan pendidikan inklusif (SDG-17: *partnership for the goals*), (3) menumbuhkan empati dan toleransi anak terhadap keberagaman agama, ekonomi, budaya dan kebutuhan khusus (SDG-16: *peace, justice, and strong institution*), (4) mengadakan kegiatan belajar yang menggali kearifan lokal, (5) memfasilitasi anak dengan pembelajaran yang menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan negara, (6) memberikan pembelajaran inkuiri yang mendorong anak menjadi pembelajar aktif, kreatif, mandiri, eksploratif, disiplin dan bertanggung jawab (SDG-4: *quality education*), (7) mengadakan kegiatan belajar yang menggali kebudayaan dunia (SDG-4), (8) Memberikan pengetahuan dan pengalaman belajar yang berdasar pada penghargaan dan kepedulian pada lingkungan serta kelestarian alam (SDG-15: *life on land*, SDG-13 *climate change*), (9) menciptakan iklim pembelajar bagi seluruh warga (SDG-4: *quality education*).

Sekolah Tumbuh sebagai sekolah yang memiliki filosofi inklusi multikultur selalu berupaya

menyelenggarakan pendidikan berkualitas sebagai implementasi dari berbagai point-point SDG. Sekolah Tumbuh menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif, menghilangkan disparitas gender (SDG-5: *gender equality*) dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, dan anak-anak dalam kondisi rentan, dan menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Semua komitmen ini sesuai dengan indikator keberhasilan SDG-4 (*quality education*).

Pembelajaran dirancang dengan konsep universal sehingga dapat diakses oleh siswa dengan beragam kemampuan. Pembelajaran berawal dari *entry point, knowledge harvest, learning goals, learning activities, reflective journaling, assesment of learning, dan media project*. Sekolah Tumbuh merancang pembelajaran berdasarkan konsep keberlanjutan (*people, profit, planet*) sehingga akan menghasilkan lulusan inklusif yang *hand on, mind on, dan heart on*. Pola pendidikan yang memperhatikan ikatan moral ini akan menjadikan setiap orang dapat berinteraksi dengan individu lain sehingga prinsip inklusi penuh dapat direalisasikan. Sekolah sangat berperan aktif dalam mengembangkan kemampuan diri difabel yang berujung pada persamaan. Pendidikan inklusi akan memberikan dampak positif bagi penyandang cacat. Dalam arti positif, pendidikan inklusi akan memberikan dampak terciptanya rasa kepercayaan diri, penghargaan diri dan mencetak tenaga kerja terampil. Pendidikan inklusi penuh juga dapat memacu dan memicu daya saing penyandang cacat sehingga mereka tidak menjadi beban keluarga dan masyarakat pasca sekolah.

Kebijakan program inklusi diimplementasikan sebagai pelaksanaan dari filosofi, visi, misi dan tujuan sekolah dengan menimbang memberikan, memfasilitasi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Untuk menentukan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi program inklusi untuk ABK dengan prosedur assesmen, identifikasi ABK, modifikasi kurikulum dengan implementasi program inklusi seperti mendesain kurikulum sesuai kebutuhan dan kemampuan

siswa yaitu dengan program life skill, menerapkan *teaching in differentiation*, dan pendampingan guru pendamping khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Analisis data yang digunakan menggunakan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data berupa pemilahan kebijakan yang relevan dengan COVID-19 dan pemusatan perhatian. Penyajian data berupa penyajian data-data kebijakan sekolah dari bulan Maret sampai Mei 2020 yang diubah menjadi naratif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat kembali makna-makna dari reduksi data dan data *display* yang kemudian disimpulkan. Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa surat-surat edaran sebagai produk kebijakan. Data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan undang-undang yang relevan dengan tujuan penelitian. Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah peneliti dengan wawancara terstruktur, pengamatan di berbagai platform sekolah, dan analisis dokumen. Data secara umum diperoleh dari produk kebijakan yang dibagikan kepada seluruh warga sekolah yang dideskripsikan dan dianalisis dengan pemikiran pakar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut kerangka sekolah aman, pilar manajemen bencana di sekolah paling tidak memiliki delapan strategi yang terbagi menjadi tiga klaster, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan keberlanjutan (Kemendikbud, 2015). Kegiatan yang dilakukan di tahap persiapan yakni membentuk perwakilan komite manajemen bencana sekolah dan memastikan adanya kebijakan atau peraturan sekolah yang mendukung pengurangan risiko bencana. Kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan, yakni kajian terhadap bahaya, kerentanan, dan sumber daya yang ada, memastikan adanya keterampilan merespon (misalnya dengan kebijakan-kebijakan aplikatif), dan rencana keberlanjutan pendidikan. Kegiatan yang dilakukan di tahap keberlanjutan adalah pemantauan dan pengkinian.

Sebagai sekolah yang memperhatikan keselamatan setiap warga sekolah, perencanaan

mitigasi bencana juga dilakukan. Berdasarkan penelusuran dokumen dan wawancara, Sekolah Tumbuh sudah mengedepankan mitigasi bencana yang tersistem, namun hanya pada bencana-bencana yang sudah lumrah terjadi di Indonesia. Hal-hal yang dilakukan sebelum pandemi COVID-19 adalah 1) memberikan pengetahuan tentang kebencanaan kepada warga sekolah, 2) memberikan pengalaman penyelamatan diri saat bencana melanda kepada warga sekolah, 3) mempraktikkan secara langsung saat bencana melanda, dan 4) menumbuhkan kepekaan lingkungan dan tanda-tanda alam. Saat pembelajaran, guru terkadang memasukkan materi mitigasi bencana dengan berbagai kegiatan yang dibuat menarik, misal *outing class*, mendatangkan narasumber, dan simulasi.

Berdasarkan pengamatan, kebijakan terkait COVID-19 dapat dikelompokkan menjadi kebijakan kesiap-siagaan dan tanggap darurat. Sekolah Tumbuh belum memiliki pengalaman dalam penanganan COVID-19 sehingga kebijakan-kebijakan sebelum terjadi pandemi belum tersusun. Akan tetapi, kebijakan terkait hidup bersih dan sehat sudah sejak lama dilakukan, misalnya pemeriksaan kesehatan oleh tim medis Bethesda setiap satu bulan sekali, pengelolaan kantin sehat, pengelolaan UKS, penyediaan wastafel yang mencukupi, kamar mandi yang dijaga kebersihannya, dan *general cleaning* yang dilakukan setiap hari oleh petugas kebersihan. Beberapa kegiatan terkait dengan pemeliharaan kebersihan dan kesehatan juga bekerjasama dengan wali murid, misalnya penyediaan makanan sehat kantin oleh wali murid/ komite, seminar kesehatan, maupun narasumber kesehatan dari pihak orang tua.

Kesiapsiagaan Pandemi COVID-19

Epidemi SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*) berasal dari Wuhan di Desember 2019 dan diumumkan menjadi pandemi dunia pada 11 Maret 2020. (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>). Dalam dua dekade terakhir, ada tiga family dari virus corona, yakni *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus* (SARS-CoV), *Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus* (MERS-CoV) and SARS-CoV-2, yang menyebabkan pandemi di beberapa negara. SARS-CoV-2 (COVID-19) lebih mudah mengkontaminasi sehingga mengakibatkan kematian yang lebih tinggi

(Naiker et al, 2020; Gatwood, 2012). Keadaan ini membuat banyak pihak, tak terkecuali lembaga pendidikan, melakukan penutupan layanan secara tatap muka.

Para leaders Sekolah Tumbuh yang terdiri atas semua kepala sekolah (SD-SMP-SMA), *Head of Resources*, *Head of Finance*, *Head of Facilities*, *Head of Curriculum*, *Head of Learning Resources*, *Head of CSIE*, dan Direktur Sekolah Tumbuh segera melakukan rapat untuk menentukan langkah ke depan. Rapat perdana ini menghasilkan surat edaran direktur nomor 002/S.Ph/Dir/111/2020 yang berisi langkah-langkah preventif pencegahan penularan COVID-19. Sekolah Tumbuh memutuskan langkah-langkah preventif terhadap kesehatan global dengan merumuskan beberapa kebijakan.

Hasil rapat memutuskan kegiatan belajar mengajar dan agenda lain dalam sekolah akan tetap berlangsung. Kegiatan internal yang tetap dilaksanakan adalah KBM, PPU kelas 9, Klub, dan Student Lead Conference. Kegiatan eksternal yang tetap dilaksanakan adalah TPM SD, USDA, dan UNBK kelas 12. Pelaksanaan kegiatan terbatas dan penghentian kegiatan luar ini dilakukan dalam dua pekan dari tanggal 23 Maret hingga 10 April 2020. Selama dua pekan ini, sekolah meniadakan sementara kegiatan non-KBM di dalam sekolah, misalnya peringatan ulang tahun Sekolah, perkemahan Tumbuh Scouts, peringatan hari autism, festival budaya, observasi, dan penelitian mahasiswa yang bersifat tatap muka. Kegiatan belajar diliburkan pada tanggal 16-17 Maret 2020 untuk memberikan waktu kepada sekolah mengadakan berbagai persiapan melakukan UTS sesuai kalender akademik pada tanggal 18-20 Maret 2020.

Setiap kegiatan yang dilakukan di masa siap-siaga dua pekan ini, kegiatan akan mengikuti protokol kesehatan yang dirancang di sekolah. Hal yang dilakukan berupa: a. Sekolah mewajibkan orang tua melakukan deteksi kesehatan mandiri sebelum dan setelah pulang sekolah, b. Saat di sekolah, deteksi kesehatan dilakukan oleh otoritas sekolah kepada semua orang yang masuk ke sekolah, c. Sekolah akan mengomunikasikan kepada orang tua apabila ada anak yang ditemukan sakit untuk dijemput pulang, d. Sekolah melakukan edukasi mengenai COVID-19 dan pola hidup sehat yang bekerjasama dengan institusi kesehatan, e. Pemeriksaan kesehatan oleh RS Bethesda ditambah frekuensinya menjadi satu bulan sekali

dengan ditambah dengan pemeriksaan staf secara rutin, f. Menggalakkan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan menggunakan *hand rub* ketika tidak dapat mengakses air dan sabun masuk ruangan. Sekolah mengadakan general cleaning di seluruh area sekolah pada tanggal 16-17 Maret 2020 yang kemudian akan dilanjutkan secara reguler satu kali di setiap semester.

Dalam masa siap-siaga ini, warga sekolah dilarang untuk membuat perkumpulan, kerumunan dan menghindari tempat umum apabila tidak mendesak. Orang tua/ wali siswa yang datang ke sekolah akan dibatasi sesuai kebutuhan dan tidak memasuki area aktivitas siswa dan diminta terbuka mengomunikasikan kondisi kesehatan anak kepada sekolah dan mengistirahatkan anak yang kondisinya sedang tidak sehat. Bagi tamu yang datang tim security sekolah akan melakukan pengarahan untuk tidak memasuki area aktivitas dengan menunggu di luar gedung. Sekolah juga mendorong seluruh warga sekolah perlu meningkatkan upaya menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat. Apabila ada staf yang sakit, staf diminta mengomunikasikan kepada pemimpin dan dihimbau untuk beristirahat sesuai aturan sekolah. Pada masa tersebut, sekolah juga akan tetap mengikuti perkembangan informasi global dan mengikuti arahan pemerintah untuk menentukan langkah ke depan.

Melanjutkan surat pemberitahuan Direktur Nomor 002/S.Ph/Dir/III/2020 tertanggal 14 Maret 2020, lembaga memperhatikan perkembangan *Corona Outbreak*, serta kondisi kesehatan dan kesiapan staf menghadapi situasi yang semakin berkembang, maka Sekolah mengambil kebijakan tambahan sebagai berikut: a. Agenda TAW (*teachers at work*) bagi guru yang semula dijadwalkan tanggal 18 dan 19 Maret 2020 diubah menjadi tanggal 17 Maret 2020 yang dilakukan di kampus masing-masing, serta TAW hari berikutnya dilakukan dengan bekerja di rumah dibawah koordinasi Kepala Sekolah/ Heads setiap bagian, b. Staf Sekolah Tumbuh akan bekerja di rumah masing-masing pada tanggal 18 dan 19 Maret 2020, lalu dilanjutkan dengan *midterm break* pada tanggal 20 Maret 2020, c. Staf bekerja di rumah dengan tetap siap untuk berkoordinasi yang berkaitan dengan pekerjaannya, d. Jadwal piket keamanan dan kebersihan tetap berjalan mulai tanggal 18 Maret 2020. e. Seluruh staf dihimbau tetap menjaga kesehatan baik kesehatan fisik dan mental.

Dalam masa siap-siaga ini, seluruh staf akan masuk bekerja pada tanggal 23 dan 31 Maret 2020 dengan penyesuaian waktu bekerja. guru, admin sekolah (tata usaha), staf *Human Resource*, staf keuangan, staf sarana prasarana, dan staf pusat studi inklusi bekerja dari pukul pukul 07.30 hingga 13.30 WIB. OB, tukang kebun, sopir, juru masak bekerja pada pukul 07.00 hingga 14.00 WIB. Untuk satpam dan penjaga malam bekerja sesuai dengan jam kerja. Mulai tanggal 24 hingga 30 Maret 2020 staf akan bekerja dari rumah dengan tetap siap berkoordinasi terkait pekerjaan. Ketentuan staf bekerja baik staf kependidikan dan non kependidikan tertuang dalam lampiran. Untuk mendukung program *social distancing*, sekolah meminta staf untuk mengurangi/ membatasi aktivitas di luar rumah yang melibatkan interaksi dengan banyak orang dan beraktivitas di dalam rumah. Lembaga akan tetap mengikuti perkembangan informasi global dan mengikuti arahan pemerintah untuk menentukan langkah ke depan.

Tanggap Darurat

Pengorganisasian bencana COVID-19 yang diambil Sekolah Tumbuh berdasarkan di atasnya, misalnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat penyebaran COVID-19, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 65/Kep/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di DIY, Surat Edaran Gubernur DIY nomor: 443/01357 tentang Antisipasi Penyebaran Infeksi COVID- 19 di Lingkungan Pendidikan DIY, dan Surat Edaran Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga DIY nomor: 421/02393 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19.

Kebijakan Tahap 1

Berdasar kebijakan ini, Sekolah Tumbuh mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendukung operasional praktis sehingga dapat diterapkan di Sekolah Tumbuh. Kebijakan dikeluarkan secara bertahap dengan melihat perkembangan situasi. Sebagai wujud empati sosial, Sekolah Tumbuh mengambil kebijakan yang tertuang dalam nomor 003/S.Ph/Dir/111/2020. Kebijakan ini lebih menyoroti pada kesepakatan

untuk pembelajaran daring dan melakukan *work from home* bagi edukator dan staf.

Kebijakan untuk peniadaan kegiatan belajar mengajar, baik kegiatan intrakulikuler maupun ekstrakulikuler diambil karena melihat perkembangan wabah yang semakin meluas. Pada tanggal 23-31 Maret 2020 KMB dilakukan dengan moda daring. Kebijakan pembelajaran daring ini menghasilkan produk kebijakan yang tertuang dalam panduan pembelajaran daring. Menanggapi perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadi daring, sekolah menginstruksikan semua guru untuk membuat gambaran program yang diharuskan diunggah di platform yang dipilih setiap satu minggu sekali, yang dilanjutkan dengan pemberian materi dan tugas. Sekolah juga mendorong orang tua untuk terlibat dalam pembelajaran dengan memberikan pendampingan.

Dalam surat edaran ini, sekolah memutuskan bahwa guru akan bekerja dari rumah mulai tanggal 24 hingga 30 Maret 2020. Pada masa WFH ini, guru dan staf mendapatkan penyesuaian upah yang diterima. Edaran ini ditutup dengan himbuan kepada seluruh orang tua/ wali untuk mengurangi dan membatasi aktivitas di luar rumah yang melibatkan banyak orang. sekolah juga menekankan kepada siswa untuk melakukan kegiatan dari rumah. Lembaga juga terus menjaga kebersihan lingkungan sekolah, mengikuti perkembangan informasi global, dan mengikuti arahan pemerintah untuk menentukan langkah ke depan.

Kebijakan Tahap 2

Sekolah Tumbuh menilai perlunya kebijakan yang berkelanjutan sebagai langkah nyata melaksanakan pendidikan yang kontekstual menanggapi masa tanggap darurat ini kebijakan lanjutan ini tertuang dalam surat edaran nomor 004/S.Ph/Dir/111/2020. Lembaga juga percaya bahwa segenap elemen Sekolah Tumbuh memiliki kemampuan beradaptasi yang baik untuk berkolaborasi mengelola pembelajaran dengan sebaik-baiknya.

Kegiatan belajar mengajar (intrakulikuler) dan klub (ekstrakulikuler) tetap diselenggarakan dalam moda daring pada tanggal 1 April sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Pembelajaran daring ini akan terus dipantau oleh pihak sekolah untuk menjaga mutu layanan. Sekolah juga

melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan agenda akademik, tata cara penilaian, evaluasi, dan ujian sekolah yang akan ditetapkan oleh masing-masing koordinator kurikulum di sekolah masing-masing.

Dalam masa ini, pembayaran uang sekolah dan kewajiban keuangan lainnya tetap berlaku sesuai dengan ketentuan sekolah. Kebijakan ini diambil karena sekolah berupaya membuat pembelajaran daring memiliki kualitas yang setara dengan pembelajaran tatap muka. Guru juga berusaha keras dalam membuat gambaran program, membuat materi, media, evaluasi, dan komunikasi yang intensif dengan orang tua/ wali. Pengalaman yang dibangun dibuat dengan spirit yang hampir sama dengan pengalaman tatap muka sehingga siswa tetap mendapatkan pengalaman belajar yang penuh makna.

Kebijakan Presensi/ Kehadiran

Dalam masa pandemi yang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya, Sekolah Tumbuh mengambil kebijakan presensi daring. Kebijakan presensi daring dibuat pada tanggal 30 Maret 2020 dan disahkan direktur pada tanggal 1 April 2020. Presensi daring dilakukan untuk memantau kinerja guru dan staf, serta mempermudah dalam penghitungan upah. Kegiatan ini adalah upaya agar staf memiliki kedisiplinan yang tinggi, baik yang bekerja di rumah maupun yang terjadwal bekerja di sekolah agar tetap berjalan dengan lancar, demi mewujudkan profesionalitas bekerja.

Ketentuan umum saat melakukan presensi, staf melakukan presensi sesuai dengan hari kerja yaitu 5 hari kerja dalam 1 minggu, kecuali pada tanggal merah. Presensi digunakan sebagai penghitungan kehadiran kerja yang akan menentukan jumlah tunjangan transportasi dan tunjangan makan. Pada situasi bekerja di rumah, jumlah jam kerja staf diatur secara mandiri disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya. Rekap presensi akan dilakukan seminggu sekali oleh masing-masing-masing kampus dan bagian HR, agar lebih mudah dalam supervisi.

Ketentuan khusus presensi diberlakukan pada dua jenis, yaitu bagi staf di bawah garis struktural kepala sekolah dan bagi staf yang bekerja di semua Sekolah Tumbuh. Staf yang bekerja di bawah garis struktural kepala sekolah yaitu guru dan tenaga kependidikan. Bagi guru, guru menggunakan format presensi berupa Jurnal

Harian Daring, yang diisi setiap hari kerja sesuai dengan yang dikerjakan terkait pekerjaannya, seperti pembelajaran daring kelas, koordinasi, maupun hal lain terkait pembelajaran. Format Jurnal Harian Daring dibuat oleh Kepala Sekolah dibantu koordinator kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kampus/. Keputusan kehadiran bekerja guru ditentukan oleh Kepala Sekolah berdasarkan Jurnal Harian Daring edukator. Keputusan tersebut direkap ke dalam format presensi, yang dilaporkan kepada bagian *Human Resource*, melalui email dengan format presensi yang sudah berjalan. Pengecekan Jurnal Harian Daring dilakukan setiap minggu. Pada akhir bulan, rekapan presensi yang diberikan kepada bagian HR dituliskan lengkap selama 1 bulan berjalan menjadi laporan presensi bulan tersebut.

Presensi bagi tenaga kependidikan memiliki model yang berbeda. Yang dimaksud staf kependidikan kampus adalah OB, OG, *Cook, Security, Gardener*, dan *Night Guard*. Staf kependidikan akan bekerja di sekolah secara terjadwal, dengan jadwal yang disusun oleh Kepala Sekolah. Kepala sekolah melaporkan jadwal dalam satu minggu kepada bagian HR. Staf kependidikan yang mendapat jadwal bekerja di sekolah, melakukan presensi *finger print* di sekolah. Bagi staf yang tidak mendapat jadwal bekerja di sekolah tetap akan mendapat tunjangan transportasi sebesar 50%, sehingga wajib melakukan presensi melalui *google form*. Staf *Night Guard* akan tetap melakukan presensi *finger print* seperti biasa di sekolah.

Bagi staf yang bekerja untuk semua sekolah tumbuh, kehadiran dihitung dari presensi daring. Yang dimaksud staf yang bekerja untuk seluruh Sekolah Tumbuh adalah *Head of Finance, Head of Facilities, Head of Human Resource, Head of Curriculum, Head of Learning Resources*, Staf Keuangan, Admin HR, Operator Dapodik, Staf Fasilitas, dan Driver. Staf yang bekerja di rumah wajib mengisi presensi kehadiran bekerja melalui *google form* setiap hari kerja, maksimal pengisian pukul 12.00 WIB. Presensi melalui *google form* menjadi acuan dalam menghitung kehadiran bekerja yang berkaitan dengan tunjangan transportasi. Presensi akan direkap oleh bagian HR setiap seminggu sekali, agar lebih mudah dalam supervisi.

Prosedur pengecekan presensi dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah melakukan monitor bekerja di rumah bagi edukator melalui

Jurnal Harian Daring. Frekuensi pengecekan Jurnal Harian Daring ditentukan Kepala Sekolah sesuai kebutuhan sekolah. Untuk rekapan, dibuat selama seminggu. Admin membuat laporan rekapan sesuai hasil supervisi Kepala Sekolah selama 1 minggu. Rekapan presensi dibuat ke dalam format presensi yang sudah berjalan biasanya. Kepala Sekolah melakukan pengecekan ulang dengan memberikan tanda tangan (digital) sebagai persetujuan Kepala Sekolah.

Admin mengirim laporan presensi 1 minggu ke bagian HR setiap akhir minggu kerja, ke email HR seperti pelaporan presensi yang sudah berjalan. Bagian HR akan merekap data presensi dari sekolah dan presensi melalui *google form* setiap minggunya. Pada akhir bulan, Admin sekolah mengirimkan kepada bagian HR rekapan presensi penuh selama 1 bulan berjalan, dengan format presensi yang sudah berjalan. Rekapan presensi keseluruhan yang direkap Admin diperoleh dari presensi Jurnal Harian Daring dan presensi *finger print* sekolah. HR mengecek kembali rekapan presensi sekolah dan presensi *google form*. HR akan melaporkan hasil validasi data presensi kepada bagian keuangan. Bagian Keuangan akan mengeksekusi laporan hasil rekapitulasi data presensi untuk ditindaklanjuti dalam pengupahan bulanan. Setelah diberlakukan presensi daring, lembaga melakukan penyesuaian pada jumlah upah yang akan diterima menjadi lebih detail. Lembaga mengatur hak-hak staf terkait kebijakan tunjangan transportasi, tunjangan khusus daring, serta tunjangan makan selama daring.

Pengayem-ayem

Sekolah Tumbuh berada dalam wilayah DIY yang masih memegang erat budaya Jawa. Walaupun sejak berdiri mendeklarasikan sebagai sekolah inklusi multikultur, sebagian besar staf, edu, dan jajaran yayasan merupakan orang Jawa asli, atau setidaknya memiliki darah Jawa. Untuk melihat spirit yang dikembangkan dalam pengambilan kebijakan, akan terkesan mengedepankan keyakinan pada kebatinan. Prinsip yang harus dipegang adalah prinsip harmoni, keselarasan dan keseimbangan antara *jagad gedhe* (makrokosmos) dan *jagad cilik* (mikrokosmos). Dari pelestarian prinsip ini, kebijaksanaan akan terjadi apabila manusia menguasai alam lahir yang muaranya akan menuju batin. Oleh sebab itu, salah satu cara membahagiakan seluruh staf dan edukator adalah dengan memberikan *pengayem-ayem*

(bantuan) agar tercipta ketenangan batin.

Bagi masyarakat Jawa, memberikan *pengayem-ayem* ketika dalam masa *pageblug* menjadi sesuatu yang sakral. Dalam masa *pageblug* di tahun 1918, Pengeran Paku Alaman melakukan selamatan kandang untuk memblokirkan influenza. Selamatan tersebut dilakukan dengan menyembelih kerbau betina yang dilakukan di alun-alun (Dewi, 2013). Ritual lain yang dilakukan saat pengusiran hama tikus dengan menggelar wayang dengan lakon *Semar Boyong* di parangtritis (Mulder, 1984). Berbagai usaha ini dilakukan untuk membuat masyarakat tenang dan sebagai penguatan bahwa bencana pasti akan segera berakhir. Meskipun berbagai tradisi sudah sangat melekat erat di Sekolah Tumbuh, *pengayem-ayem* pada masa *pageblug* COVID-19 dilakukan bukan pada ritual irasional, namun lebih pada pemberian bantuan sembako kepada seluruh pegawai.

Pengayem-ayem dalam bentuk sembako ini diberikan sebagai bentuk perhatian dan dukungan yayasan terhadap kesehatan seluruh warga sekolah tumbuh. Yayasan memberikan dua paket sembako kepada setiap staf. Satu paket sembako untuk dipakai sendiri dan satu paket sembako diwajibkan diserahkan kepada pihak yang membutuhkan. Paket sembako didistribusikan di empat lokasi yang berbeda sehingga staf dapat memilih sendiri lokasi yang paling dekat dengan kediaman. Pemberian sembako dengan konsep *charity* ini sebagai bentuk syukur bahwa seluruh warga sekolah masih dapat bekerja dan beraktivitas walau dengan penyesuaian. *Pengayem-ayem* tahap kedua juga dilakukan oleh komite sekolah masing-masing. Di Tumbuh High School, komite sekolah juga memberikan paket sembako sebagai wujud apresiasi.

Di samping bantuan yang bersifat rasional ini, sisa-sisa kepercayaan Jawa masih terlihat dalam kegiatan di sekolah. Hal yang nampak adalah juru masak menghidangkan sayur lodeh sebagai salah satu upaya pencegahan *pageblug* COVID-19. Informasi ini beredar di masyarakat dan diyakini berasal dari keraton. Meskipun kemudian ada edaran bahwa anjuran tersebut bukan berasal dari keraton, masyarakat meyakini memakan sayur lodeh merupakan salah satu bentuk tolak bala yang dilakukan turun-temurun. Usaha ini merupakan narasi khas dari masyarakat Yogyakarta. Untuk kasus COVID-19, HB X menganjurkan masyarakat untuk bersikap lebih

rasional untuk mengantisipasi penyebaran virus. HB X sebagai panutan, tidak berusaha merintangi masyarakat untuk bersifat lebih rasional, namun tetap tidak melarang melakukan kegiatan yang bersesuaian dengan kearifan lokal.

Anjuran sekolah untuk melakukan pembatasan kegiatan tatap muka, dilakukan berdasarkan anjuran pemerintah yang diperkuat dengan titah HB X. Pembatasan sosial berupa penutupan sekolah, namun tetap mendapatkan upah yang disesuaikan merupakan salah satu *pengayem-ayem* yang paling penting di kalangan seluruh staf. Apabila ditelusuri, pola pembatasan sosial ini juga dilakukan oleh pemerintah di pandemi influenza di masa penjajahan Hindia-Belanda. Pada masa itu, orang yang terkena panas tidak boleh keluar rumah dan harus beristirahat (Wibowo, 2009). Jejak sejarah lain dalam Serat Centhini, orang yang menderita penyakit menular (dalam serat Centhini disebutkan penyakit cacar), seseorang harus diisolasi dan tidak boleh berinteraksi dengan orang lain (Serat Centhini, Jilid 3 hlm 431).

SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Kebijakan pengurangan risiko bencana COVID-19 di Sekolah Tumbuh sudah tertata yang dapat dikelompokkan menjadi kebijakan kesiap-siagaan dan tanggap darurat. Setiap kebijakan selalu diawali dengan rapat para pemimpin sekolah yang kemudian diterjemahkan dengan surat edaran HRM. Kebijakan PRB di Sekolah Tumbuh menerapkan prinsip humanis yang mampu mengakomodasi kebutuhan warga sekolah (siswa, guru, dan staf). Penerapan kebijakan dilakukan dengan alur yang sistematis sehingga mudah dipahami oleh warga sekolah dan dibuat dengan mengedepankan musyawarah para pemimpin.

Penerapan kebijakan dapat dilakukan secara berkesinambungan sehingga menjadikan sekolah menjadi aman dan siap ketika tatap muka sudah mulai dibuka. Pihak sekolah dan yayasan diharapkan lebih memperhatikan konsistensi penerapan kebijakan sebagai antisipasi penularan wabah di lingkungan sekolah. Diperlukan juga pengawasan yang lebih ketat, misalnya dengan membuat konsekuensi yang mengikat semua warga sekolah apabila melanggar ketentuan dan juga pemberian apresiasi pada pihak yang konsisten menjalankan kebijakan.

PUSTAKA ACUAN

- Ariantoni. 2009. *Modul Pelatihan: Pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Ke dalam Sistem Pendidikan*. Jakarta: Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Amengkunagara III (Ingkang Sinuhun Pakubuwana V), KGPA. (1788-1820). *Serat Centhini: Suluk Tambangraras*. Surakarta: Ford Foundation.
- Cowling BJ, Ho LM, Leung GM. 2008. Effectiveness of control measures during the SARS epidemic in Beijing: a comparison of the Rt curve and the epidemic curve. *Epidemiol Infect* 2008; 136: 562–66.
- Chow CB. 2004. Post-SARS infection control in the hospital and clinic. *Paediatr Respir Rev* 2004; 5: 289–95.
- Dewi, N.R. 2013. Wabah Influenza Di Jawa Tahun 1918-1920. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*.
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2010. *Strategi Pengarusutamaan pengurangan Resiko Bencana di Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2010. *Strategi Pengarusutamaan pengurangan Resiko Bencana di Sekolah*, (Jakarta : Kementerian Pendidikan Nasional).
- Djalante R., Garschagen M., Thomalla F., Shaw R. 2017. *Introduction: Disaster Risk Reduction in Indonesia: Progress, Challenges, and Issues*. In: Djalante R., Garschagen M., Thomalla F., Shaw R. (eds) *Disaster Risk Reduction in Indonesia. Disaster Risk Reduction (Methods, Approaches and Practices)*. Springer
- Eames KT, Tilston NL, White PJ, Adams E, Edmunds WJ. 2010. *The impact of illness and the impact of school closure on social contact patterns*. *Health Technol Assess* 2010; 14: 267–312.
- Eames KT, Tilston NL, Edmunds WJ. 2010. The impact of school holidays on the social mixing patterns of school children. *Epidemics* 2011; 3: 103–08.

- Fleming, J. 2013. Young people's participation – Where next? *Children and Society*, 27, 484–495.
- Gatwood J, Meltzer MI, Messonnier M, Ortega-Sanchez IR, Balkrishnan R, Prosser LA. 2020. Seasonal influenza vaccination of healthy working-age adults: a review of economic evaluations. *Drugs* 2012;72:35-48. 10.2165/11597310-000000000-00000 22191794.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 2020. *Data Sebaran*. Diakses dari <https://COVID19.go.id/>
- Hardoyo, S.R., Marfai, M.A., Ni'mah, N.M., Mukti, R.Y., Zahro, Q., Halim, A. 2011. *Strategi Adaptasi Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Banjir Pasang Air Laut di Kota Pekalongan*. Yogyakarta: MPPDAS Universitas Gadjah Mada.
- Huang, R.H., Liu, D.J., Tlili, A., Yang, J.F., Wang, H.H., et al. (2020). *Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption: The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted Learning in COVID-19 Outbreak*. Beijing: Smart Learning Institute of Beijing Normal University.
- Kemdikbud. (2015). *Modul 2-Manajemen Bencana di Sekolah*. Jakarta: Biro Perencanaan Dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kemendikbud.
- Kankanamge, N., Yigitcanlar, T., Goonetilleke, A., & Kamruzzaman, M. (2019). *Can volunteer crowdsourcing reduce disaster risk? A systematic review of the literature*. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 101097. doi:10.1016/j.ijdr.2019.101097.
- Kemendikbud. (2015). *Modul 2 Pilar 3 Manajemen Bencana di Sekolah*. Jakarta: Biro Kerjasama dan Perencanaan Luar Negeri.
- Mahase, E. 2020. *COVID-19: UK starts social distancing after new model points to 260 000 potential deaths*. *BMJ*, m1089. doi:10.1136/bmj.m1089 .
- Mardiah A.N.R., Lovett J.C., Evanty N. (2017). *Toward Integrated and Inclusive Disaster Risk Reduction in Indonesia: Review of Regulatory Frameworks and Institutional Networks*. Springer, Cham
- Mulder, N. 1984. *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: kelangsungan dan Perubahan Kulturil*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Naicker S, Yang CW, Hwang SJ. 2020. The novel coronavirus 2019 epidemic and kidneys. *Kidney Int* 2020 ; doi:10.1016/j.kint.2020.03.001.
- Nurjanah, R. Sugiharto, Kuswanda Dede, Siswanto BP, Adikoesoemos. 2011. *Manajemen bencana*. Jakarta: Alfabeta Bandung.
- Pang X, Zhu Z, Xu F. 2003. Evaluation of control measures implemented in the severe acute respiratory syndrome outbreak in Beijing, 2003. *JAMA* 2003; 290: 3215–21.
- Parent's Handbook. 2015. *Parent's Handbook Tumbuh High School*. Yogyakarta: Yayasan Edukasi Anak Nusantara.
- Pfefferbaum, B, Rose L. Pfefferbaum & Richard L. Van Horn 2018. Involving children in disaster risk reduction: the importance of participation, *European Journal of p2*, DOI: 10.1080/20008198.2018.1425577.
- Priyanto Wibowo. 2009. *Yang Terlupakan: Pandemi Influenza 1918 di Hindia-Belanda*, Kerjasama antara Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Unicef Jakarta dan Komnas FBPI, Hal. 201.
- Proulx, K, & Aboud, F. 2019. Disaster risk reduction in early childhood education: Effects on preschool quality and child outcomes. *International Journal of Educational Development* 66 (2019) 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.01.007>
- Smit, B. and Wandel, J. 2006. Adaptation, Adaptive Capacity and Vulnerability. *Journal Global Environmental Change*, 16: 282–292.
- Suarmika & Utama. 2017. Pendidikan Mitigasi Bencana Di Sekolah Dasar (Sebuah Kajian Analisis Etnopedagogi). *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia Volum 2 Nomor 2 bulan September 2017*. Page 18 – 24 p-ISSN: 2477-5940 e-ISSN: 2477-8435.
- US Department of Health and Human Services, Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response. (2017). *NPRSB-NACCD joint youth leadership report*. Washington, DC: Author. Diakses dari <https://www.phe.gov/Preparedness/legal/boards/nprsb/meetings/Documents/>

joint-youth-ldrshp-rpt.pdf

- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 2020 COVID-19 educational disruption and response. 2020. <https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-schoolclosures> (diakses tanggal 1 Mei, 2020).
- Wang, Jingyuan and Tang, Ke and Feng, Kai and Lv, Weifeng, High Temperature and High Humidity Reduce the Transmission of COVID-19. 2020. Diakses di SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3551767> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3551767>
- WHO. 2020. Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus. Diakses dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.
- WHO. (2020). WHO Director-General's opening remarks at the Mission briefing on COVID-19. 2020. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-missionbriefing-on-COVID-19> (diakses 1 Mei 2020).
- World Health Organization. Situation reports. Available at: <https://www.who.int/emergencies/diseases/nov>
- Xinhua. 2020. China's CDC detects a large number of new coronaviruses in the South China seafood market in Wuhan. Available at: https://www.xinhuanet.com/2020-01/27/c_1125504355.htm. Diakses tanggal 1 Mei 2020.
- Yue, X. G., Xue, F. S., Rita Y. M. Li, M. James C. Crabbe, Lili Mi, Siyan Hu, Julien S. Baker, and Gang Liang. 2020. Risk Management Analysis for Novel Coronavirus in Wuhan, China. *Journal of Risk and Financial Management* 13: 22.
- Zhang, W Y, Zhao J, Zhang J, Jiang F. 2020. Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. *Lancet* 2020; 395: 945–47.
- Zhu N, Zhang D, Wang W. 2019. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. *N Engl J Med* 2020;382(8):727-33. doi: 10.1056/NEJMoa2001017 [published Online First: 2020/01/25].

ABSTRACT

The improvement of attitude and disciplinary behavior of vocational school students in using personal protective equipment is part of standard operating procedures according to applicable regulations. Desk research is used as a method of the study. The purpose of the study is to examine and provide policy suggestions to improve student disciplinary attitudes and behavior when working in a culinary workshop/laboratory/kitchen. The results of the study show that 1) the attitude and behavior of student work discipline in practicing using personal protective equipment are still not fully following the rules of law work safety and healthy; 2) the practice room is not equipped with a set of personal protective equipment including pictures/posters of occupational safety and health. This study concludes that the use of personal protective equipment as part of efforts to establish a work ethic and graduate competence is important for the implementation of workplace safety and health in line with the demands of the world of work in the era of globalization. It is concluded that the implementation of occupational safety and health using personal protective equipment has not been enforced in compliance with legislative requirements and needs to be incorporated as part of the profile of vocational high school graduates.

Keywords: attitudes, disciplinary actions, vocational school students, personal protective equipment, work safety and healthy.

ABSTRAK

Peningkatan sikap dan perilaku disiplin siswa sekolah menengah kejuruan dalam menggunakan alat pelindung diri merupakan bagian dari standar operasional prosedur sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan kajian adalah untuk mengkaji dan memberi saran kebijakan peningkatan sikap dan perilaku disiplin siswa tatkala melakukan kerja di bengkel/laboratorium/dapur tata boga. Metode kajian menggunakan penelitian dokumen (*desk research*). Hasil kajian menunjukkan bahwa 1) sikap dan perilaku disiplin kerja siswa dalam praktik menggunakan alat pelindung diri masih belum sepenuhnya mengikuti kaidah-kaidah Undang-Undang Keselamatan Kerja; 2) ruang praktik belum dilengkapi dengan seperangkat alat pelindung diri termasuk gambar-gambar/poster keselamatan dan kesehatan kerja. Kajian ini menyimpulkan bahwa penggunaan alat pelindung diri sebagai bagian dari upaya pembentukan etos kerja dan kompetensi lulusan merupakan sebuah keniscayaan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai tuntutan dunia kerja di era globalisasi. Disimpulkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan penggunaan alat pelindung diri belum diterapkan sesuai standar peraturan perundang-undangan dan perlu dibudayakan sebagai bagian dari profil lulusan sekolah menengah kejuruan.

Kata kunci: sikap, disiplin, siswa SMK, APD, K3.

PENDAHULUAN

Pasca pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation*) dan Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade*), disepakati bahwa hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antarnegara wajib dipenuhi oleh seluruh negara anggotanya (termasuk Indonesia). Salah satu dampaknya yakni terkait dengan ketenagakerjaan dimana setiap perusahaan wajib menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam menghadapi hal itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No 1/1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan panduan bagi pekerja Indonesia memperoleh perlindungan kerja dan pelayanan kesehatan yang bermutu serta memiliki derajat kesehatan yang memadai.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga pendidikan pemasok tenaga kerja ikut bertanggung jawab dan perlu menyesuaikan dengan standar yang diberlakukan dunia kerja. Salah satu bentuk penyesuaiannya yakni K3 masuk dalam kurikulum SMK. Hal ini bertujuan agar lulusan SMK memiliki kompetensi K3 sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan/atau dunia industri (DU/DI).

Namun, hasil observasi penulis (2018 dan 2019) di beberapa SMK di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kabupaten Sidoarjo, Malang, dan Jember (Jawa Timur), Kabupaten Banjarbaru (Kalimantan Selatan), dan Kota Palembang menunjukkan bahwa penerapan K3 di SMK tersebut belum sepenuhnya mengikuti kaidah-kaidah K3 sesuai peraturan perundang-undangan. Hal itu berdampak pada sikap dan disiplin siswa dalam pembelajaran K3 dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) masih rendah. Hal tersebut didukung oleh hasil observasi di beberapa SMK di Yogyakarta (Herlina, B.M, 2019).

Mempertimbangkan fenomena tersebut, SMK perlu meningkatkan penerapan K3 secara optimal, bertahap, berkelanjutan, dan konsisten melalui pemberian pengetahuan, penerapan sikap dan perilaku disiplin (etos kerja) kerja K3 dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) setiap melakukan praktik kerja agar terhi ndar dari terjadinya kecelakaan kerja dan terjadinya sakit akibat kerja (UU No 1/1970).

Rasionalisasi gagasan peningkatan penggunaan APD dilatarbelakangi dengan asumsi bahwa di tempat praktik kerja SMK seperti di bengkel (*workshop*)/laboratorium/dapur pengolahan boga dan tempat praktik lainnya memiliki potensi terjadinya kecelakaan atau terjadinya penyakit akibat kerja, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan sikap dan disiplin praktik siswa SMK. Salah satu upaya pengendalian resiko terhadap praktik yakni melakukan peningkatan sikap dan perilaku disiplin kerja dengan menggunakan APD setiap siswa melakukan praktik. Hasil pemikiran ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan pertimbangan dalam pembentukan karakter disiplin siswa SMK sehingga memiliki budaya kerja/etos kerja yang menyatu dalam sebuah profil lulusan SMK sesuai tuntutan dunia kerja.

Resiko kegagalan (*risk of failures*) akan selalu ada dalam suatu aktifitas pekerjaan yang disebabkan adanya perencanaan yang kurang sempurna, pelaksanaan kerja yang kurang cermat, pelaksanaan kerja yang menyimpang dari SOP (termasuk tidak menggunakan alat pelindung diri) maupun akibat yang tidak disengaja (Hidayat & Wahyuni, 2016).

Penerapan penggunaan APD dalam K3 merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kecelakaan kerja tidak hanya menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan perusahaan, akan tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan, dan akhirnya berdampak pada masyarakat luas (Widiyarini, dkk.,(2019). Kecelakaan kerja merupakan sesuatu yang tidak dapat diduga dan tidak juga diharapkan, karena mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa/luka/cacat maupun pencemaran lingkungan.

Sebagai faktor penyebab terjadi kecelakaan kerja antara lain karena kurangnya pengetahuan, sikap dan perilaku kurang disiplin pekerja dalam mengikuti standar operasional prosedur menggunakan APD serta kompetensi pekerja yang kurang memadai (Ramadhan, 2014.; Fairyo dan Wahyuningsih , 2018).

Dalam bekerja, K3 merupakan faktor yang sangat esensial untuk diperhatikan, karena pekerja yang mengalami kecelakaan atau sakit akibat kerja akan berdampak pada dirinya, keluarga dan lingkungannya. Salah satu komponen yang dapat meminimalisir kecelakaan dan sakit akibat kerja dalam kerja yakni sikap dan perilaku disiplin kerja dengan menggunakan APD.

Penerapan K3 di SMK dapat memberikan efek domino bagi sekolah dan pengguna lulusan (perusahaan/industri). Selain memenuhi tuntutan standar DU/DI, penerapan K3 merupakan aspek vital yang harus diterapkan di SMK. K3 juga mendorong semua warga sekolah untuk berkomitmen menjalankan program K3 yang sudah disepakati bersama. Hal yang paling penting yaitu K3 dapat membentuk mental yang memiliki komitmen dan konsisten dalam bekerja serta sikap disiplin tinggi yang tercermin dalam perilaku sehari-hari di sekolah.

SMK sebagai pihak pertama yang bertanggungjawab dalam pembentukan sikap dan perilaku disiplin yang diwujudkan dalam etos kerja berkewajiban membekali kompetensi dasar K3 untuk bekerja maupun menciptakan kerja (berwirausaha). Oleh karena itu, penerapan K3 dengan menggunakan APD perlu ditingkatkan peran dan fungsinya agar membudaya di kalangan siswa SMK Artinya, mulai sejak siswa melakukan pembelajaran teori-praktik, mereka langsung menerapkan kaidah-kaidah K3 lengkap dengan penggunaan APD sesuai tata tertib pembelajaran praktik secara disiplin dan konsekuen manakala siswa melakukan pelanggaran tidak mengikuti tata tertib penggunaan APD.

Hasil kunjungan penulis di beberapa SMK di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Temanggung, Sidoarjo, Malang, Banjar Baru (Kalsel) dan Palembang, terkesan belum semua SMK menerapkan K3 khususnya mengikuti SOP praktik dengan menerapkan K3 dengan memberdayakan APD yang tersedia di ruang praktik. Akibatnya, belum semua siswa membiasakan diri mengikuti aturan K3 manakala melakukan kerja praktik dengan menggunakan APD. Sekalipun SMK telah mengajarkan K3, namun tidak menjamin setiap SMK memfasilitasi peralatan K3 khususnya APD secara lengkap sesuai UU. No. 1/1970.

Sikap dan perilaku disiplin kerja siswa SMK pada umumnya masih jauh dari harapan. Sekalipun setiap praktik diawasi oleh guru pengampu dan teknisi peralatan atau laboran,

namun masih ada saja praktikan yang tidak taat asas pada aturan K3. Misalnya, siswa sering tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti baju praktik (*wearpack*), sepatu kerja, sarung tangan (pengolahan makanan), kaca mata dan masker (fabrikasi logam: pengerjaan pemsinan dan pengelasan), helmet (pelindung kepala) pelindung telinga dan sabuk pengaman (pekerjaan keteknikan), dan sebagainya. Bahkan, terkadang penggunaan peralatan kerja yang tidak sesuai dengan fungsinya, seperti penjepit benda kerja (tang) difungsikan sebagai palu; obeng difungsikan sebagai pengungkit, dsb, serta sikap siswa sebagai praktikan yang tidak disiplin dalam bekerja (kurang memperhatikan kaidah-kaidah K3 seperti kebersihan, perawatan peralatan, kelalaian menggunakan sumber daya energi listrik yang tidak efisien).

Cukup banyak contoh kejadian yang mengindikasikan siswa SMK belum konsisten dan memiliki komitmen menerapkan peraturan K3, khususnya penggunaan APD sewaktu kerja praktik. Hal ini secara tidak langsung membiarkan peluang terjadinya bahaya sewaktu-waktu. Kurang maksimalnya penggunaan APD biasanya terjadi karena kurang adanya pengetahuan, sikap dan perilaku disiplin kerja. Dengan kata lain, budaya penggunaan APD siswa SMK pada waktu praktik kerja masih perlu ditumbuh kembangkan agar menjadi suatu pembiasaan dalam etos kerja siswa SMK.

Di samping itu, sikap dan perilaku kurang disiplin siswa juga tercermin manakala melakukan praktik yang kurang respon terhadap lingkungan kerja seperti tidak langsung membersihkan tempat kerja yang kotor atau membersihkan lantai yang terkena cairan minyak/oli atau sampah bekas bahan/benda kerja atau menggunakan komponen elektronika yang tidak sempurna atau lupa mencabut stop kontak sehingga berpeluang terjadinya hubungan arus pendek. Bahkan, jarang sekali sekolah yang merawat secara intensif alat pemadam ringan (APAR). APAR merupakan salah satu syarat keselamatan kerja yang sebagaimana tertera dalam UU No 1/1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 ayat (b) untuk mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran kecil. Alasannya, guru praktik tidak mengetahui cara perawatan dan penggunaan APAR sudah ada petugas khusus dari dinas kebakaran dan/atau dari perusahaan distributor.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa berbagai jenis kecelakaan yang terjadi, disebabkan oleh faktor utama manusia (Riyadina, 2007). Hal ini diasumsikan karena kurang mengindahkan peraturan K3 dan kecerobohan dalam bekerja atau rendahnya kesadaran pekerja dan/atau sikap/perilaku yang kurang disiplin menerapkan K3 dalam melakukan kerja.

Dalam kehidupan sehari-hari di SMK, sikap kerja dan tingkah laku akan berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa melaksanakan praktik di bengkel kerja di sekolah. Selanjutnya, pengalaman praktik kerja di industri (pakerin) berpengaruh terhadap tingkat kesiapan kerja lulusan SMK (Hana 2013, Nurcahyono, 2015 dan Mardiana. 2017)

Atas dasar uraian di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan kajian terhadap sikap dan perilaku disiplin siswa SMK dalam praktik kerja dengan menggunakan APD. Pertimbangannya adalah pengetahuan, sikap dan perilaku disiplin siswa SMK dalam praktik kerja menggunakan alat pelindung diri (APD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membentuk karakter dan etos kerja sebagai calon tenaga kerja yang dipersyaratkan oleh dunia kerja di era global. Hal ini sekaligus akan menjadi bahan penguatan pembentukan profil lulusan SMK yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja di era global. Oleh karena itu, sikap dan disiplin siswa SMK perlu ditingkatkan agar dalam melakukan pekerjaan terhindar dari resiko kecelakaan dengan menggunakan APD, dengan alasan, a).sikap dan disiplin merupakan syarat yang harus melekat pada kepribadian calon lulusan SMK yang akan bekerja di dunia kerja; b) sikap dan disiplin siswa merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari profil calon lulusan SMK di era global; c) sikap dan disiplin menggunakan APD dalam bekerja merupakan satu kesatuan dalam etos kerja untuk menjaga keselamatan dirinya, keselamatan peralatan, dan keselamatan lingkungan kerjanya.

Berkaitan dengan berbagai tingkat penerapan K3 terutama dalam menggunakan APD, rumusan masalah dalam kajian ini yaitu "Mengapa sikap dan disiplin Siswa SMK dalam menggunakan APD masih rendah dalam setiap pembelajaran praktik K3?"

Atas dasar rumusan masalah tersebut, tujuan gagasan/pemikiran ini dimaksudkan untuk mengkaji penyebab mengapa siswa SMK tidak disiplin menggunakan APD dalam setiap

melakukan praktek di sekolah?. Hasil gagasan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peningkatan kualitas pembelajaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khususnya penggunaan alat pelindung diri (APD) secara optimal sesuai standar operasional kerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Berdasarkan UU No. 1 /1970, Keselamatan Kerja adalah suatu syarat atau norma-norma kerja di segala tempat kerja secara terus-menerus wajib diciptakan dan dilakukan pembinaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat, industri, dan teknologi. K3 merupakan bagian penting dalam suatu pekerjaan di laboratorium, di perusahaan, maupun di bengkel.

Sejalan dengan UU tersebut, dalam UU No 13/2003 tentang ketenagakerjaan, Keselamatan Kerja merupakan keselamatan yang berhubungan erat dengan pekerja (manusia), peralatan kerja seperti pemesinan, bahan dan proses pengolahan, landasan kerja dan lingkungan kerja serta caracara melakukan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Sementara itu, Wirawan (2015) mendefinisikan keselamatan kerja sebagai "kondisi dimana para pekerja selamat, tidak mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas dari pekerjaanya".

Keselamatan Kerja telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3), berbunyi: "Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk: 1) mencegah dan mengurangi kecelakaan; 2) mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; 3) mencegah dan mengurangi bahaya peledak; 4) memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; 5) memberi pertolongan pada kecelakaan; 6) memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja; 7) mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik *physic* maupun *psychis*, peracunan, infeksi dan penularan; 8) memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban; 9) memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara dan proses kerjanya; dan 10) menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya bertambah tinggi".

Sementara itu, Wirawan (2015), memaknai

kesehatan kerja adalah sebagai penerapan ilmu kesehatan/kedokteran di bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk mencegah penyakit yang timbul akibat kerja dan mempertahankan dan meningkatkan kesehatan bagi para pekerja/buruh untuk meningkatkan kinerjanya.

Lebih lanjut, Kesehatan Kerja telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Bagian 6 tentang Kesehatan Kerja, 'Pasal 23 terdiri atas: (a) Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal; (b) Kesehatan kerja meliputi perlindungan kesehatan kerja, pencegahan penyakit; dan akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja; dan (c) Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja”.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu sistem program yang dibuat/direncanakan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya kecelakaan kerja, mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja sehingga seorang dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Dengan kata lain, K3 merupakan pengkondisian suasana kerja yang aman bagi pekerja, peralatan kerja, benda kerja, maupun lingkungan kerja dari kerusakan atau kerugian akibat terjadinya kecelakaan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa K3 merupakan suatu sistem program yang dibuat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan menemu kenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja sehingga pekerja dapat bekerja dengan hati-hati, aman, dan nyaman.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak kejadian kecelakaan kerja yang disebabkan oleh factor manusia. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Riyadina, (2007) menunjukkan bahwa faktor manusia memegang peranan penting timbulnya kecelakaan kerja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 80-85% kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan factor manusia (*human error*).

Dalam rangka mempersiapkan kompetensi K3, Direktorat Pembinaan SMK melalui pernyataannya bahwa manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan semakin diperkuat pada tahun ajaran 2020. Beliau menambahkan, sebenarnya manajemen K3 telah diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan SMK sekalipun masih terbatas pada 60 SMK sebagai model SMK penerapan K3 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Jawa Barat. Di samping itu, para guru/instruktur juga telah diajarkan dan dilatih perihal K3. Walaupun, dalam jumlahnya masih terbatas. Diharapkan penerapan tersebut dilakukan evaluasi dan penyempurnaan penerapannya agar dapat diterapkan secara tepat di tingkat nasional (Fizriyani dan Putri,2020)

Menakertrans juga mendorong penerapan K3 di Indonesia yang disampaikan kepada seluruh pemda untuk “mendeklarasikan komitmen bersama penerapan K3 di daerahnya masing-masing dengan melibatkan para *stakeholder* terkait. Menakertrans berharap agar “Semua pihak harus bekerja sama agar budaya K3 benar-benar terwujud di setiap tempat kerja dan lingkungan masyarakat umum di seluruh tanah air”.

Lebih lanjut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menegaskan bahwa “sistem manajemen K3 (SMK3) merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya kerja yang aman, efisien, dan produktif.” SMK3 sangat membantu untuk mencegah “*accident prevention*” perusahaan dan bahkan “*zero accident*” (Thamrin., 2015; Widiyarini, dkk, 2019).

Tinjauan Historis K3

Fakta empiris menunjukkan bahwa K3 diterapkan bersamaan dengan revolusi industri di Eropa, seperti di Inggris, Jerman dan Perancis serta revolusi industri di Amerika serikat. Era tersebut ditandai dengan pergeseran besar-besaran dalam penggunaan mesin- mesin produksi menggantikan tenaga kerja (manusia). Akibatnya, pekerja hanya berperan sebagai operator. Penggunaan mesin- mesin menghasilkan produk barang-barang dalam jumlah berlipat ganda dibandingkan dengan pekerjaan yang dikerjakan manusia. Sebelumnya, pada saat revolusi industri juga di tandai dengan semakin banyak ditemukan senyawa-senyawa kimia yang dapat membahayakan K3 fisik dan jiwa pekerja serta masyarakat dan lingkungan hidup.

Di Indonesia kesadaran K3 sudah ada sejak awal kemerdekaan. Namun, implementasi K3 belum mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat industri. Masalah ini dapat dipahami karena Indonesia masa itu masih dalam masa transisi penataan kehidupan politik dan keamanan nasional.

K3 baru menjadi perhatian utama pada tahun 1970-an seiring dengan pertumbuhan investasi modal dan penggunaan teknologi industri nasional (manufaktur). Perkembangan tersebut mendorong Pemerintah melakukan pengaturan dalam bidang K3 (UU No. 1/1970), kemudian UU ketenagakerjaan yang telah melalui periode revisi (terbaru UU No 13/2003) beserta peraturan perundang-undangan lainnya sebagai penyertainya. Perpu dimaksud pada prinsipnya mengamantakan agar setiap tempat kerja harus melaksanakan program K3, tempat kerja yang dimaksud mencakup di darat, dalam tanah, permukaan tanah, dalam air, di udara maupun di ruang angkasa.

Sepengetahuan penulis, K3 di lingkungan pendidikan kejuruan (SMK), secara faktual telah diterapkan sejak kurikulum STM 1969 (dilengkapi dengan suplemen poster dan gambar-gambar K3) yang sampai saat ini masih tetap eksis dalam struktur kurikulum SMK 2013. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan implementasi K3 di SMK pada umumnya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya sikap dan disiplin siswa dalam pembelajaran praktik K3 menggunakan APD masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan K3 di SMK belum sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan asumsi bahwa a) keterbatasan kepemilikan sarana dan prasarana pembelajaran K3 khususnya ketersediaan APD ditinjau dari aspek jumlah dan jenisnya, b) rendahnya respon penyelenggara pendidikan terhadap peran dan fungsi K3, dan c) terbatasnya guru pengampu K3 (guru produktif) yang berkompeten, profesional, dan memadai.

Sikap dan Perilaku Disiplin Sikap

Secara harfiah, sikap merupakan perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen mengenal aspek-aspek tertentu dalam lingkungan. Menurut Sukardi, (2013) memaknai sikap adalah "suatu kecenderungan yang relatif stabil yang dimiliki seseorang dalam merespon dirinya sendiri, orang lain, atau situasi tertentu". Sikap memiliki lima tahapan, yakni: (1) menerima (*receiving*), dimaknai bahwa orang (subyek) mau memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek); (2) merespon (*responding*), memberikan jawaban apabila

ditanya menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap; (3) menghargai (*valuing*), (4) mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah; dan (5) bertanggungjawab dengan segala resiko merupakan indikasi sikap paling tinggi (Sukardi, 2013).

Hubungan sikap siswa SMK terhadap K3 khususnya penggunaan alat pelindung diri (APD) setiap praktik di bengkal/lab/dapur tata boga dapat dikelompokkan dalam dua aspek, yaitu aspek sikap positif dan sikap negatif. Sebagai contoh, siswa SMK yang memiliki sikap positif cenderung untuk menerima dan mereka sadar untuk berperilaku K3. Sebaliknya, siswa SMK yang memiliki sikap negatif cenderung untuk tidak komitmen dan konsisten berperilaku K3. Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap K3 adalah suatu respons tertutup K3 yang berupa sikap menyukai atau sikap tidak menyukai (merespon) K3. Hal ini didukung oleh hasil penelitian. Dengan kata lain, sikap merupakan suatu perbuatan/tingkah laku sebagai reaksi respon terhadap suatu rangsangan stimulus yang disertai dengan pendirian dan atau perasaan itu sendiri. Pemahaman Sikap merupakan perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen mengenal aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya.

Menurut Notoatmodjo (2010) terdapat tiga komponen sikap yang secara bersama-sama dapat membentuk sikap yang utuh, yakni: a) kognitif (*cognitive*), berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi obyek sikap. Sekali kepercayaan itu terbentuk maka itu akan menjadi dasar seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan dari obyek tertentu; b) afektif (*affective*), terkait dengan emosional subyektif seseorang terhadap suatu obyek sikap yang umumnya komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki obyek tertentu; dan c) konatif (*conative*), atau komponen perilaku dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku dengan yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapi.

Kepemilikan sikap diasumsikan akan berpengaruh terhadap perilaku siswa itu sendiri. Sebagai contoh, seorang siswa SMK yang memiliki sikap responsive terhadap kecelakaan kerja, maka siswa tersebut berpikir dan berusaha untuk mencegah kecelakaan. Setelah berpikir maka komponen

emosi dan keyakinan ikut bekerja sehingga siswa berniat untuk menggunakan alat pelindung diri dan mematuhi peraturan K3 untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan kerja, kemudian sikap siswa akan terbentuk yang pada akhirnya menjadi pembiasaan.

Sebagai gambaran, pekerja yang sehat dan selamat walaupun bekerja di tempat yang berbahaya sekalipun, mereka pasti memiliki pengetahuan yang cukup luas dan sikap yang positif. Kaitannya dengan pemikiran ini bahwa siswa yang memiliki pengetahuan yang cukup luas dan sikap yang positif dimungkinkan memiliki kesadaran berperilaku K3 yang tinggi. Sebaliknya, siswa SMK yang memiliki pengetahuan terbatas dan sikap negatif kevendernannya akan memiliki kesadaran berperilaku yang rendah (Ramadhan,2014).

Perilaku disiplin

Perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktifitas organisme (mahluk hidup) yang bersangkutan. Dalam hal ini perilaku disiplin manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktifitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan sangat luas anatara lain, berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca dan sebagainya (Notoatmodjo, 2010). Lebih lanjut, perilaku merupakan suatu respons terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut. Respons ini berbentuk dua macam, yakni bentuk aktif dan pasif. Respon pasif (respon internal), yaitu respon yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain misalnya berpikir, tanggapan atau sikap batin dan pengetahuan. Misalnya, siswa tahu bahwa debu di tempat kerja dapat mengganggu pernafasan tetapi siswa tersebut tidak memakai masker untuk melindungi diri. Perilaku dimaksud merupakan perilaku yang terselubung (*covert behavior*).

Perilaku manusia sangat kompleks dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Sumirta, dkk.,2013) membagi perilaku ke dalam 3 domain, yaitu (1) pengetahuan (*Knowledge*). Pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu, sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam pembentukan tindakan seseorang (*over*

behavior); (2) sikap (*attitude*), sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan akan tetapi merupakan predisposisi tindakan sikap perilaku; dan (3) praktek atau tindakan (*practice*), setelah mengetahui stimulasi atau objek kesehatan, kemudian mengadakan pendataan terhadap apa yang diketahui, proses selanjutnya diharapkan ia akan melaksanakan atau mempraktekkan apa yang diketahuinya.

Disiplin merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan atau norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggungjawabnya. Kesediaan merupakan suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Hasibuan,2009).

Sementra Bintoro dan Daryanto, (2017) berpendapat bahwa disiplin kerja merupakan suatu proses perkembangan konstruktif bagi pegawai yang berkepentingan karena disiplin kerja ditujukan pada tindakan bukan orangnya, Menurut Sutrisno (2012) berpendapat bahwa disiplin merupakan perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan, prosedur kerja yang ada atau disiplin adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan merupakan tindakan seseorang yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan dalam mentaati segala aturan atau norma yang berlaku di lingkungan/masyarakat.

Proses disiplin dalam belajar memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajarnya dimana dalam proses belajar siswa perlu disiplin untuk mengembangkan motivasi yang kuat. Disiplin perlu dilakukan dengan baik, karena keberhasilan dalam belajar tidak terlepas dari disiplin siswa itu sendiri. Agar siswa berperilaku disiplin, seluruh warga sekolah juga harus dikondisikan membiasakan disiplin dalam keseharian baik di dalam maupun di luar sekolah. Respon aktif, yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung. Contohnya, seorang siswa SMK memakai "masker" untuk melindungi dirinya dari debu. Perilaku mereka sudah tampak

dalam bentuk tindakan nyata (*overt behavior*). Perubahan perilaku dalam diri seseorang dapat diketahui melalui persepsi. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda meskipun mengamati objek yang sama.

Perlunya tumbuh kembang sikap dan perilaku disiplin siswa yang secara sukarela mengikuti semua peraturan berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pekerjaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Begitu pula kedisiplinan yang merupakan kesadaran dan kesediaan siswa mentaati semua peraturan (K3), khususnya dalam menggunakan APD selama bekerja di tempat kerja (praktik) dengan mengikuti norma-norma K3 (Kaligis, dkk., 2013; Ramadhan, 2014; dan Santosa, 2014).

Kesadaran berperilaku K3 merupakan kesadaran dari dalam diri seseorang untuk menerapkan prosedur K3. Menurut Freud (2013) "kesadaran merupakan satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Kesadaran adalah bagian dari kejiwaan yang berisi hal-hal yang disadarinya, diketahuinya. Fungsi kesadaran diatur oleh hukum-hukum tertentu yang dinamakan proses sekunder yaitu logika".

Penerapan kesadaran terhadap K3 di SMK dapat dilihat dalam aktifitas terhadap akses kerja seperti pengaturan dan penertiban terhadap resiko dan bahaya kerja terhadap lingkungan sekitar seperti situasi perkantoran maupun di area dengan adanya tanda-tanda bahaya (*sign board*), membentuk pola kebiasaan dalam kerja dan adanya penyuluhan, *meeting*, slogan, pasangan spanduk dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan membentuk tindakan seseorang karena perilaku didasari oleh pengetahuan lebih langgeng dan membudaya daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan dan pembiasaan (Santosa, 2014; Christina, 2012; Brito, 2015; Suyono dan Nawawinetu, 2013).

Kedisiplinan menggunakan APD

Secara bebas, disiplin dapat dimaknai sebagai tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan atau peraturan. Dengan kata lain, pengertian tersebut, mengindikasikan bahwa pembiasaan dengan kedisiplinan akan mempunyai pengaruh yang positif bagi kehidupan peserta didik manakala diterapkan dalam praktik di sekolah. Pada awalnya kedisiplinan dirasakan sebagai beban yang harus

dipatuhi secara sadar untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan bersama.

Rahmansyah (2015) sebagaimana dikutip dalam Herlina (2019), memknai disiplin merupakan sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma, dan kaidah yang berlaku pengajaran atau pelatihan yang menekankan seseorang pada peraturan dan tata tertip untuk mentaati ketentuan, etika, norma, dan kaidah yang berlaku untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Sutrisno (2012) yang memaknai disiplin merupakan perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan, standar operasional prosedur (SOP) kerja yang ada. Dengan kata lain, disiplin merupakan sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi tempat bekerja baik tertulis maupun tidak tertulis. Sementara itu, Bintoro dan Daryanto. (2017) disiplin merupakan suatu proses perkembangan konstruktif bagi pegawai yang berkepentingan karena disiplin kerja ditujukan pada tindakan bukan orangnya. Mengacu pada beberapa pendapat tersebut disimpulkan bahwa kedisiplinan merupakan tindakan karyawan yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan mentaati segala aturan yang berlaku. Dalam kondisi apapun, disiplin kerja harus tetap ditegakkan baik yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis (norma), sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan merupakan tindakan seseorang yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan dalam menaati segala tata tertib/aturan organisasi dalam kondisi apapun. Berkaitan dengan pelaksanaan K3, terdapat hubungan yang sangat erat antara kesadaran dan kedisiplinan seorang siswa mengikuti/mentaati seluruh tata tertib pembelajaran praktik kerja.

Idealnya, kesadaran siswa menggunakan APD selama melakukan praktik karena secara otomatis (reflek) ada pada setiap individu siswa. Kesadaran taat mengikuti peraturan kerja dapat tumbuh kembang menjadi etos kerja yang tumbuh kembang secara bertahap dan berkelanjutan dan pada akhirnya menjadi suatu kepribadian siswa yang berkarakter sebagai insan pekerja yang selalu memiliki komitmen dan konsisten dalam melakukan pekerjaan.

Berbekal kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi dalam melakukan kerja (praktik) dengan menggunakan APD siswa mampu meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Fairyo dan Wahyuningsih (2018) tentang "Kepatuhan pemakaian alat pelindung diri pada pekerja proyek, disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara sikap, tingkat pendidikan, dan masa kerja dengan kepatuhan pemakaian APD.

Alat Pelindung Diri (APD)

Pelaksanaan K3 di lingkungan SMK tidak lepas dari tanggung jawab manajemen K3, termasuk peran guru praktik. Alat Pelindung Diri (APD) merupakan sarana pengendalian resiko yang paling rendah tingkatannya (Permenakertrans No. Per.08/Men/Vii/2010).

Keberadaan APD perlu mendapat perhatian yang serius, antara lain selalu: (a) tersedia di bengkel kerja (*workshop*) atau di dapur (*kitchen*) pengolahan makanan dan diberikan secara gratis, (b) bersih setelah digunakan, (c) digunakan sesuai fungsinya, (d) dijaga dalam kondisi baik, dan (e) diperbaiki/diganti jika terjadi kerusakan dan disimpan di tempat yang tepat setelah digunakan (Santosa, 2014).

Alat pelindung diri (APD) wajib dipakai oleh setiap pekerja pada waktu bekerja (termasuk siswa SMK) yang melakukan pembelajaran praktik di bengkel, laboratorium/dapur pengolahan makanan dan tempat praktik lainnya. APD merupakan bagian penting dalam penerapan K3 di bengkel kerja (*workshop*), laboratorium, dapur pengolahan makanan (tata boga), dan bahkan manakala pekerja melakukan pekerjaan di ruang terbuka seperti pekerjaan konstruksi, kelistrikan, kelautan, dsb.

Kewajiban dimaksud didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja (K3); 2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.08/Men/Vill/2010 tentang Alat Pelindung Diri (APD), 3) SNI 1-95890 tentang Pedoman APD. Perlengkapan yang mendukung K3 sangat diperlukan untuk mengantisipasi kecelakaan kerja oleh karena itu perlengkapan yang disediakan harus memenuhi standar nasional. Menurut hasil penelitian Sompie dan Timboeleng (2012) dan Faiziah dan Sugiarto (2013) terkait pengaruh penggunaan

APD terhadap kecelakaan kerja pada pekerja konstruksi di kota Tomohon, menyimpulkan bahwa semakin tinggi penggunaan APD akan menurunkan terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja. APD terdiri atas seperangkat alat yang digunakan pekerja sewaktu melakukan pekerjaan. Penggunaan APD bertujuan untuk melindungi sebagian atau seluruh anggota tubuh dari adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja, seperti luka, cedera, dan sakit akibat kerja. Sekalipun APD tidak secara sempurna menjamin perlindungan tubuh, tetapi dapat mengurangi tingkat keparahan kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.

Kedisiplinan siswa SMK menggunakan APD dalam pembelajaran praktik belum sepenuhnya sesuai UU K3. Padahal hal ini, dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja siswa di mana terjadinya kecelakaan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan atau budaya penerapan K3 terkait dengan pengetahuan dan pemahaman, sikap dan pengalaman praktek siswa dalam penggunaan APD. Di samping itu,, faktor budaya kerja di tempat kerja juga akan mempengaruhi suasana pekerja di mana mereka bekerja. Misalnya lulusan SMK bekerja di perusahaan asing (*multy national corporate*) akan berbeda dengan suasana kerja di perusahaan nasional atau lokal.

Era globalisasi yang penuh kompetitif, standarisi kompetensi pekerja sudah menjadi kebutuhan bagi calon pekerja di manapun akan bekerja. Mengantisipasi persyaratan tersebut, sudah menjadi keniscayaan bagi lembaga pendidikan seperti SMK membekali peserta didiknya secara fleksibel (sesuai kebutuhan dunia kerja) dengan menguatkan kemampuan kompetensi dasar di bidangnya dan memperkuat *soft skill* yang dapat tumbuh kembang menjadi sebuah etos kerja bagi lulusannya yang tercermin dalam profil lulusan sedini mungkin.

Pelaksanaan K3 di lingkungan SMK tidak lepas dari tanggung jawab manajemen K3, termasuk peran guru praktik. Alat Pelindung Diri merupakan sarana pengendalian resiko yang paling rendah tingkatannya (Permenakertrans No. Per.08/Men/Vii/2010). Oleh karena itu, tanggung jawab pekerja dalam pemakaian APD sewaktu melakukan pekerjaan mencakup: (a) memilih APD dengan benar sesuai fungsinya; (b) mengikuti pelatihan tentang APD, (c) merawat membersihkan dan merawat APD, dan (d) menginformasikan kepada atasan tentang keperluan perbaikan APD.

Beberapa jenis APD yang standard dan lazim tersedia di tempat kerja (bengkel/laboratorium/dapur tata boga), antara lain berupa: (1) Helm Pengaman (*safety helmet*)/ berfungsi untuk melindungi kepala terhadap kemungkinan tertimpa benda jatuh atau menghindari cedera kepala akibat benturan benda berat. Asesoris pelengkap lainnya seperti kaca mata pengaman (*spectacles*) *safety goggles*, tameng muka (*face shield*), serta gabungan maske, tameng muka, dan kacamata pengaman; (2) Penutup Telinga (*earplug/earmuff*)/ penyumbat telinga (*ear plug*), sebagai alat pelindung telinga karena bekerja di daerah kebisingan akibat penggerindaan dan pemukulan; (3) Sarung Tangan (*gloves*), berfungsi untuk melindungi jari dan tangan pekerja dari goresan, benturan dan pengaruh sinar las. Sarung tangan terbuat dari kain/kulit yang nyaman serta memungkinkan jari dan tangan bergerak bebas; (4) Pelindung pernafasan seperti Masker; Respirator; Pelindung Wajah (*face shield*), untuk melindungi pernafasan dan wajah dari pengaruh sinar pada saat bekerja; (5) Apron, baju panjang dari bahan karet timbal dengan daya serap radiasi; (6) Sabuk Pengaman (*safety belt*), berguna untuk melindungi diri dari kemungkinan terjatuh, biasanya digunakan pada pekerjaan konstruksi dan memanjat serta tempat tertutup atau *boiler*. Harus dapat menahan beban sebesar 80 Kg; (7) Kacamata Pengaman (*safety glasses*) melindungi mata dari sinar radiasi elektrik; (8) APD untuk tugas khusus, terdiri atas: a) Alat pelindung kepala, b) Topi pelindung/pengaman (*safety helme*) untuk melindungi kepala dari benda keras, pukulan dan benturan, terjatuh dan terkena arus listrik, c) Tutup kepala: melindungi kepala dari kebakaran, korosif, uap-uap, panas/dingin, dan d) Topi (*hats/cap*), melindungi kepala dari kotoran debu atau tangkapan mesin-mesin berputar; e) Sepatu karet (*boots*/Sepatu pengaman (*safety shoes*) untuk melindungi kaki dari bahaya jatuh; f) Jas hujan (*raincoat*) untuk menghindari terkena air hujan; g) Pelampung; h) Rompi safety; dan *Wearpack* atau *Coverall* untuk pelindung tubuh, i) *handsill* merupakan alat pelindung diri berbentuk topeng dengan kacamata yang bisa diatur dengan intensitas kaca, alat ini digunakan untuk melindungi diri dari percikan api, penggunaannya dengan cara kanan kiri memegang *handsill* dan di gunakan untuk melindungi muka sedangkan tangan kiri untuk proses las. Dengan kata lain, *handsill* merupakan alat pelindung diri yang melindungi kepala, muka dan telinga dari suara bising dan percikan api las, kaca bisa diatur sesuai

dengan tingkat intensitas yang diinginkan, alat pelindung diri ini hampir sama dengan *handsill* yang membedakan hanya *headsill* lebih nyaman dan aman untuk dipakai karena tidak perlu dipegang oleh tangan, sebab *headsill* ini dikaitkan dengan kepala (UU No 1/1970).

Disamping itu, selain APD dikenal juga Alat Pengaman Kerja (APK) merupakan alat bantu agar pada waktu kita bekerja dalam menggunakan mesin perkakas kayu, tidak terjadi kecelakaan kerja maupun gangguan kesehatan kerja yang diakibatkan peralatan kerja, juga lingkungan kerja disekitar bengkel (tempat praktik). Asapun jenis-jenis APK, antara lain: kotak P3K, kotak ini amat diperlukan untuk mengatasi gangguan kecil yang terjadi pada waktu sedang pelatihan, misalkan luka kulit, gatal-gatal, kurang sehat (pusing-pusing), flu, batuk dll sehingga gangguan tersebut dapat diatasi. Alat pemadam kebakaran yang disediakan biasanya adalah tabung pemadam kebakaran (*fire exitingused*), alat ini bentuknya tidak terlalu besar tetapi sangat diperlukan untuk mengatasi bila ada kebakaran kecil, yang diakibatkan oleh korsleting listrik dikabin dan sekitarnya. Alat pemadam jenis ini biasanya dibuat di pabrik dalam bentuk tabung dari logam yang diisi dengan cairan kimia atau bubuk kimia kering. Kondisi tabung harus diperiksa secara berkala bahkan isinya harus diganti dalam batas waktu tertentu sehingga petunjuk instansi yang membuatnya;

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) merupakan alat untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran kecil. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4.1980 tentang pemasangan dan pemeliharaan APAR, yaitu APAR dipasang dengan tanda segitiga *berwarna* merah, APAR juga ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dan mudah dicapai, Biasanya, APAR dipasang menggantung pada dinding dengan penguatan sengkang, serta APAR yang digunakan berwarna merah. Selain alat-alat pengaman kerja seperti tersebut di atas, masih terdapat beberapa alat pengaman kerja yang lain, seperti *genset*, penangkal petir. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak setiap SMK memiliki seperangkat APD yang lengkap sesuai dengan kebutuhan kompetensi keahlian yang diselenggarakan.

Dalam beberapa kejadian kecelakaan kerja, terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, yaitu *unsafe condition* dan *unsafebehavior*. *Unsafe*

behavior merupakan perilaku dan kebiasaan yang mengarah pada terjadinya kecelakaan kerja seperti tidak menggunakan APD, penggunaan peralatan yang tidak standard, sedangkan *unsafe condition* merupakan kondisi tempat kerja yang tidak aman seperti terlalu gelap, panas dan gangguan-gangguan faktor fisik lingkungan kerja lainnya. Faktor-faktor kecelakaan kerja tersebut dapat diminimalis dengan adanya komitmen pekerja dalam menetapkan kebijakan dan peraturan K3 serta didukung oleh kualitas SDM yang melakukan kerja (Hargiyanto, 2011; Thamrin, 2015; Widiyarini, dkk.2019).

Fakta di lapangan mengindikasikan belum disiplin siswa SMK maupun pekerja di perusahaan/industry dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) selama bekerja. Berdasarkan beberapa hasil penelitian mengindikasikan bahwa pemnafaatan APD belum optimal dan bahkan dalam beberapa kasus APD sering diabaikan karena ketidak tahuan, sehingga terjadi kecelakaan dalam bekerja (Zurriyah, dkk., 2018 dan Solekhah., 2018). Sebaliknya, hasil hasil penelitian yang dilakukan Permana, dkk. 2019; Solichin, dkk,2014; Brito, 2015 menunjukan bahwa keberadaan APD digunakan secara optimal oleh siswa maupun pekerja industri

METODE PENELITIAN

Beberapa langkah studi dokumen (*desk study*) yaitu sebagai berikut: (1) identifikasi permasalahan, (2) menetapkan tujuan, (3) mengelompokan dan mengkaji berbagai dokumen K3 yang bersumber dari (a) laporan siswa SMK praktik di sekolah, (b) kelengkapan sarana APD di bengkel, (c) skripsi/ tesis pemanfaatan APD di SMK, (d) karya tulis ilmiah (jurnal); (e) melakukan analisis secara deskriptif, dan (f) membuat simpulan dan saran kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain dilakukan oleh Pertama, Permana., dkk. (2019) tentang Penerapan K3 pada Uji Kompetensi Paket 1 di SMK menunjukan bahwa 63,7% peserta didik telah menggunakan APD pada pekerjaan servis mobil bensin, 70% peserta didik telah menggunakan APD dalam *overhaul* transmisi manual, 68,7% peserta didik telah menggunakan APD dalam perbaikan sistem starter. Berdasarkan

hasil kajian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) dan ketepatan menggunakan alat dimaksud pada saat melakukan servis mobil bensin rata-rata cukup baik.

Kedua, penelitian Narida (2015) terhadap Perilaku Sanitasi, Hygiene dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Praktik Masakan Indonesia Program Keahlian Tata Boga SMK Negeri 6 Yogyakarta menunjukkan bahwa (1) Aspek pengetahuan perilaku sanitasi hygiene dan kesehatan keselamatan kerja, tergolong kategori baik, dimana prosentase kategori baik sebagian besar siswa mendapatkan nilai di atas rata-rata (57,69%). (2) Aspek sikap perilaku sanitasi hygiene dan kesehatan dan keselamatan kerja, sikap siswa dapat tergolong dalam kategori sangat baik (92,0) memuaskan (100%). Ini berarti seluruh responden telah mengetahui tindakan yang harus dilakukan dalam perilaku sanitasi hygiene dan K3 pada saat praktik pengolahan makanan Indonesia lengkap dengan menggunakan APD.

Ketiga, penelitian Ramadhan (2014) terhadap "Pengaruh pengetahuan K3 dan sikap terhadap kesadaran berperilaku K3 di Laboratorium CNC dan PLC SMK Negeri 3 Yogyakarta" menunjukkan bahwa pengetahuan siswa dalam berperilaku K3 pada praktik pemesinan dengan menggunakan APD termasuk kategori baik (54%). Ini berarti sebagian besar siswa telah memahami pengetahuan K3 dan penggunaan APD. Siswa yang tergolong kategori cukup (46%) berarti sebagian siswa memiliki pengetahuan K3 mencukupi sekalipun belum memahaminya secara utuh. Disimpulkan bahwa .sikap siswa dalam implementasi K3 termasuk kategori baik sebanyak (60%). Hal ini berarti siswa memiliki kesadaran untuk selalu berperilaku K3.

Keempat, penelitian Nabilah dan Mardiana, (2017). terhadap Faktor Perilaku Keselamatan Pada Siswa Teknik Pemesinan SMK Negeri 7 Semarang disimpulkan bahwa terdapat hubungan sikap terhadap K3 dengan perilaku keselamatan pada siswa teknik pemesinan SMK N 7 Semarang ($p\text{-value} < \alpha(0,05)$), sebaliknya tidak terdapat hubungan tingkat pengetahuan dan pengawasan guru dengan perilaku keselamatan pada siswa teknik pemesinan SMK N 7 Semarang ($p\text{-value} > \alpha(0,05)$). Disaran agar SMK Negeri 7 Semarang memberi sanksi kepada siswa yang tidak mematuhi peraturan K3 dengan menggunakan APD, memberikan *safety sign* pada setiap

mesin kerja praktik sebagai pengingat siswa dalam menerapkan K3, dan perlu menerapkan model *safety talk* di mana siswa sendiri yang mengingatkan sesama temannya agar selalu berperilaku K3 pada saat praktik kerja.

Kelima, penelitian Fairyo dan Wahyuningsih, (2018) tentang "Kepatuhan pemakaian alat pelindung diri pada pekerja proyek PT X Semarang berdasar pada hasil uji *chi-fisher* menunjukkan bahwa variabel yang tidak ada hubungan dengan kepatuhan pemakaian APD pada pekerja bagian perakitan besi yaitu tingkat pengetahuan ($p=0,653$). Terdapat hubungan antara kepatuhan pemakaian APD pada pekerja perakitan besi yaitu sikap pekerja ($p=0,001$), tingkat pendidikan ($p=0,001$) dan masa kerja ($p=0,001$). Disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara sikap, tingkat pendidikan dan masa kerja dengan kepatuhan pemakaian APD Brito (2015) tentang Analisis Aspek Pembentuk Budaya K3 Dengan Kepatuhan Penggunaan APD pada Pekerja Produksi Resin di Sidoarjo, menunjukkan bahwa 56% pekerja memiliki perilaku tidak cukup baik dalam pemakaian APD.

Keenam, Zurriyah, dkk.(2019) tentang faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada bengkel las di bengkel las di Kota Makassar menunjukkan terdapat hubungan antara lama kerja dan penggunaan APD terhadap kecelakaan kerja, dan penggunaan APD merupakan faktor yang paling kuat hubungannya dengan kecelakaan kerja;

Ketujuh, Seviana, dkk., (2016). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Pelaksanaan Pemakaian Alat Pelindung Diri Sebagai Upaya Pencapaian *Zero Accident* di PT X disimpulkan terdapat pengaruh pengetahuan terhadap pelaksanaan APD sebagai upaya pencapaian *zero accident* bagian spinning T. X sebesar 6,839. Untuk penelitian lebih lanjut perlu pengkajian terhadap faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemakaian APD di tempat kerja.

Kedelapan, Suyono dan Nawawinetu (2013) tentang Hubungan antara faktor pembentuk budaya keselamatan kerja dengan *safety behavior* di PT DOK dan Perkapalan Surabaya *Unit Hull Construction* menunjukkan menunjukkan bahwa faktor pembentuk budaya keselamatan dengan kuat hubungan yang lemah terhadap *safety behavior* yaitu komitmen manajemen, peraturan dan prosedur K3, serta keterlibatan pekerja. Faktor pembentuk budaya keselamatan yang

memiliki hubungan kuat dengan *safety behavior* yaitu komunikasi ($c=0,414$) dan lingkungan sosial pekerja ($c=0,477$). Disarankan kepada perusahaan untuk mengoptimalkan budaya keselamatan melalui komunikasi dan lingkungan sosial pekerja dengan mengadakan *safety talk* dan *safety induction*.

Kesembilan, penelitian keberadaan APD di lingkungan LPTK dilakukan oleh Solichin, dkk. (2014) "Penerapan APD pada Laboratorium Pengelasan Universitas Negeri Malang" mengindikasikan bahwa sebagian besar peralatan laboratorium termasuk APD yang digunakan dalam praktikum pengelasan termasuk kategori baik dan APD di laboratorium pengelasan sudah digunakan sesuai dengan standard yang dipersyaratkan.

Selanjutnya, hasil penelitian terkait dengan kecelakaan kerja, dilakukan Faiziah dan Sugiyarto (2013) mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat penerapan SMK3 dengan tingkat kecelakaan kerja di bidang konstruksi di Surakarta, Sukoharjo, dan Karanganyar. Implikasi penerapan K3 pada proyek konstruksi, selain melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja juga mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas kerja (Kaligis, dkk, 2013). Padahal dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum pekerjaan dimulai maupun di tengah tengah proyek berjalan, dapat meminimalisir potensi kecelakaan kerja. sebagaimana penelitian Sompie dan Timboeleng (2012) di Kota Tomohon, yang mengindikasikan semakin tinggi faktor kesehatan akan menurunkan faktor kecelakaan kerja pada pekerja konstruksi.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan APD baik di internal SMK maupun di kalangan dunia kerja masih belum optimal. Oleh karena itu, perlunya siswa SMK diberi penguatan sikap dan perilaku disiplin K3 melalui kesadaran dan disiplin kerja sewaktu praktik dengan menggunakan APD secara bertahap dan berkesinambungan serta konsisten dan komitmen sesuai dengan SOP pembelajaran praktik kerja.

Upaya meningkatkan sikap dan perilaku disiplin K3

Berdasarkan kajian literature dan pembahasan, sikap dan perilaku disiplin siswa SMK dalam menggunakan APD pada pembelajaran K3 dapat

dilakukan sebagai berikut: Pertama, Kepala Sekolah (1) sekolah memfasilitasi APD dalam berbagai jenis dan jumlah yang memadai; (2) kepala sekolah bersama wasek humas dan kesiswaan serta guru praktik menyusun program K3 dan mensosialisasikan penggunaan APD melalui tata tertib pelaksanaan pembelajaran K3;

Kedua, guru praktik: (a) mengecek pemakaian baju praktik dan APD sebelum siswa melakukan praktik; (b) bersama siswa menciptakan suasana praktik seperti di industri (sesuai SOP) dan meningkatkan pengetahuan APD, melalui *safety talk*, media informasi K3 seperti pemasangan poster K3, dan media cetak/elektronik serta pelatihan fisik dan mental secara berkala atas bimbingan institusi terkait; (c) menciptakan budaya disiplin pemakaian APD pada saat siswa praktik dengan cara melakukan pengawasan secara disiplin pemakaian APD untuk melindungi siswa dari potensi bahaya dan faktor risiko kecelakaan; (d) memberi penguatan pengetahuan (teori) dan keterampilan (praktik) penggunaan berbagai jenis APD yang wajib digunakan siswa selama melakukan praktik dan siswa yang tidak menggunakan APD ditegor dan diberi hukuman jika tidak sesuai aturan SOP praktik.

Ketiga, siswa: (1) melaporkan kepada guru praktik manakala terjadi kerusakan dan/atau kekurangan APD sebelum, pada waktu, dan sesudah praktik; (2) saling menegur sesama siswa apabila tidak menggunakan APD; (3) membiasakan melakukan budaya bersih, indah, dan tertib sehingga tercipta suasana tempat praktik yang nyaman, aman, dan menyenangkan; (4) bersama guru praktik menyusun program peningkatan sikap disiplin ber K3, misalnya membuat dan atau memasang poster/gambar-gambar kecelakaan kerja akibat kesalahan tidak menggunakan APD; (5) siswa membentuk tim (kecil) K3 seperti P3K untuk tanggap darurat jika terjadi kecelakaan kecil; (6) menghimpun dana suka dan rela untuk menanggulangi kerusakan ringan APD, dan (7) bersama ketua OSIS, guru praktik atas bimbingan wasek humas menyusun proposal untuk mencari sponsor/mitra kerja industri untuk mengadakan orientasi pelatihan penggunaan APD di sekolah/industri melalui dana CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Dari uraian tersebut dapat diasumsikan bahwa aspek kebaruan dalam gagasan ini akan terjadi manakala SMK berhasil meningkatkan sikap dan disiplin kerja melalui penerapan program K3 di

sekolah dengan membangun kerjasama secara intensif dan produktif dengan para pemangku kepentingan pendidikan kejuruan (*Stake holders*).

SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pemikiran, kajian literatur dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, kepemilikan pengetahuan, sikap dan disiplin siswa SMK dalam penggunaan APD manakala praktik masih rendah dikarenakan; 1) umumnya SMK sampel belum menaruh perhatian secara serius terhadap pembelajaran K3 secara optimal (masih apa adanya). Hal ini, ditengarai dengan: (a) setiap siswa melaksanakan praktik pembelajaran K3 belum dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) K3 sesuai persyaratan UU No. 1/1970 tentang K3 dan UU No. 132003 tentang Ketenagakerjaan khususnya penggunaan APD; (b) sekolah memiliki keterbatasan kepemilikan APD baik jenis dan jumlah yang tersedia di bengkel kerja (*workshop*); (c) sekolah belum menerapkan budaya disiplin kerja praktik sesuai SOP praktik secara benar dan konsisten; dan (d) Tata tertib sekolah terkait pelaksanaan praktik tidak diikuti dengan pemberian efek jera terhadap siswa yang melanggar tata tertib.

Kedua, pola pembelajaran praktik yang belum didukung dengan sistem pembelajaran "*team teaching*" sehingga (satu) guru praktik harus membimbing, mengawasi, menilai, sejumlah praktikan di setiap rombongan belajar sehingga pelaksanaan pembelajaran kurang optimal.

Ketiga, sekolah sampel tidak memiliki guru produktif yang memiliki kompetensi K3 yang mumpuni dan berkualitas (penguasaan teori dan praktik) serta memiliki pengalaman industri.

USULAN KEBIJAKAN

Mengacu pada simpulan, maka saran kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, kepada SMK bersama komite sekolah, mitra kerja (institusi pasangan) dan dewan guru menyusun program K3 dalam upaya meningkatkan sikap dan disiplin siswa dalam pembelajaran praktik K3 yang berorientasi pada upaya meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan disiplin kerja praktik siswa dengan

mengoptimalkan penggunaan APD secara konsisten dan konsekuen melalui pendekatan yang sportif, edukatif, dan persuasif.

Kedua, sekolah meningkatkan sosialisasi tata tertib pelaksanaan pembelajaran praktik K3 dengan melengkapi gambar/poster APD dan Pasal-Pasal yang penting dalam UU K3, UUKesejatan, dan UU Ketenaga Kerjaan, yang diperlukan dalam SOP kerja praktik untuk menjaga keamanan siswa daro potensi bahaya kecelakaan keja selama praktik.

Ketiga sekolah melengkapi kekurangan APD secara bertahap dan berkesinambungan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, mitra kerja industri, dan pemberdayaan alumni SMK yang bekerja di industri untuk melakukan pembinaan peningkatan sikap dan disiplin kerja (ets kerja).

Keempat, melakukan kerjasama dengan dunia usaha dn duia industri (DUDI) secara intensif dan produktif melalui up-grading dan re-training kompetensi guru dengan cara “magang industri” dan mengadakan pelatihan fungsional K3 bagi guru khususnya pelatihan APD yang mutakhir untuk mengembangkan *soft skill* dan *hard skill* sesuai tuntutan dunia kerja.

PUSTAKA ACUAN

Bintoro, M.T. dan Daryanto. (2017). *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*, Cetakan kesatu. Yogyakarta: PT Gava Medika.

Brito., G. T., (2015). Analisis aspek pembentuk budaya K3 dengan kepatuhan penggunaan pada pekerja produksi resin di Sidoarjo, *The International Journal of Occupational Safety and Health*, Vol 4, No 2, Jul-Dec 205, 34143

Christina, W.Y., (2012). Pengaruh budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap kinerja proyek konstruksi, *Jurnal Rekayasa Sipil*. Vol. 6. No. 1. 2012.

Fairyo, L.S., dan Wahyuningsih, A.S., (2018). . Kepatuhan pemakaian alat pelindung diri pada pekerja proyek, *Higeia Journal of Public Health, 2 (1) Research and Development*, Januari 2018, p ISSN 1475-362846,eISSN1475-222656

Fizriyani, W., dan Putri, D.W., (2020). *Manajemen K3 di SMK Akan Diperkuat*, [Republika .co.id](http://Republika.co.id). Jakarta, 30 Januari 2020 diakses tanggal 31

Januari 2020

Freud, S., (2013). *Filsafat Perilaku Organisasi*, academia.edu. diunduh tanggal 16 Januari 2020 pk. 14.00 wib

Faiziah, H. W., dan Sugiyarto., (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Konstruksi. *Jurnal Matrik Teknik Sipil*, Vol. 1. No.4. Desember 2013

Hidayat, N., dan Wahyuni, I., (2016). Kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bengkel di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, *Jurnal Penelitian: Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol. 23 No. 1, hlm. 51-66.

Hana., (2013), Pengaruh Pengalaman Praktik Kerja Industri Dan Locus Of Control Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII SMK Negeri 1 Surakarta. *Jurnal Jupe UNS, Volume 1 No.1* Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Herlina, M. B, (2019). Penerapan Kedisiplinan Kerja Siswa Kelas XI Dalam Kegiatan Praktik Mata Pelajaran Tata Hidang di Sekolah Menengah Kejuruanh Yogyakarta,., *Jurnal KELUARGA Vol 5, No 1, Februari 2019*. Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa, Yogyakarta

Hargiyanto, P., (2011). Analisis kondisi dan pengendalian bahaya di bengkel/ laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Yogyakarta. *Jurnal Penelitian: Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Negeri Yogyakarta*, vol. 20, No. 2, hlm. 203-210.

Hasibuan, M., (2009). *Organisasi & Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kaligis, R.S.V., Sompie, B.F., Tjakra, J., Walangitan, D.R.O., (2013). Pengaruh implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktifitas kerja, *Jurnal Sipil Statik*. Vol. 1. No. 3. Februari 2013..

Mardiana, N.E., (2017). Pengaruh Praktik Kerja Industri Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII SMKN 5 Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia. repository.upi.edu/perpustakaan.upi.edu diunduh tanggal 16 Oktober 2017.

Nurchayono, E., (2015) . *Praktik Kerja Industri*

- (Prakerin) dan Kontribusinya terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII SMK Negeri 1 Pati. *Economic Education Analyss Journal* ISSN 2252-6544
- Notoatmodjo, S.,(2010). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta. Rineka Cipta
- Narida, A., (2015). Perilaku Sanitasi, Hygiene dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Praktik Masakan Indonesia Program Keahlian Tata Boga SMK Negeri 6 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2013-2014. Thesis, UNY
- Nabilah, N,A., dan Mardiana, (2017). Faktor Perilaku Keselamatan Pada Siswa Teknik Pemesinan, *Higeiajournal Of Public Health Research And Development HIGEIA1(3) (2017)* <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4.1980 tentang pemasangan dan pemeliharaan APAR.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
- Permana, D,, Munawar, W., dan Ridwan, N.A. M., (2019). Penerapan K4 pada Uji Kompetensi Paket 1 di SMK, *Journal of Mechanical Engineering Education, Vol. 6, No. 1, Juni 2019*
- Ramadhan, P.R., (2014). Pengaruh pengetahuan K3 dan sikap terhadap kesadaran berperilaku K3 di Lab. CNC dan PLC SMK Negeri 3 Yogyakarta. Skripsi, Fakultas Teknik, UNY.
- Riyadina, W., (2007). Kecelakaan kerja dan cedera yang dialami oleh pekerja Industri di kawasan industri Pulogadung Jakarta. *Jurnal Makara, kesehatan*. Vol. 11. No. 1, hlm. 25-31
- Sukardi, K.D.. (2013). Sikap Guru Pembimbing dan Konseling terhadap evaluasi program bimbingan dan konseling (Survei pada Guru Bimbingan dan Konseling SMP di Bekasi Timur), *jurnal.unj.ac.id*. diakses tanggal 2 Februari 2020 pk. 20.00 wib.
- Sumirta, A., Suarto, H., dan Sunaryo, W., (2013), The Effect of Organsational Culture, Transformational Leadership and Work Motivation toward Teacher Performance, *Indian Journal of Positive Psychology*, 4 (4), 537-539
- Sutrisno. (2012). *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Santosa, R. Y., (2014). Hubungan Antara Pengetahuan Siswa Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kondisi Bengkel dan Kondisi Alat Pelindung Diri (APD) Terhadap Pelaksanaan K3 Praktikum Pengelasan di SMK Wilayah Kota Malang. Skripsi: Universitas Negeri Malang
- Suyono, K.Z., dan Nawawinetu, E.D., (2013). Hubungan antara faktor pembentuk budaya keselamatan kerja dengan *safety behavior* di PT DOK dan Perkapalan Surabaya Unit Hull Construction, *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, Vol. 2, No. 1 Jan-Jun 2013, pp. 67–74
- Sompie, B.F., dan Timboeleng, J.A., (2012). Pengaruh kesehatan, pelatihan, dan penggunaan alat pelindung diri terhadap kecelakaan kerja pada pekerja konstruksi di Kota Tomohon. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*. Vol. 2. No. 4. November 2012, hlm.219-231.
- Solichin, Endarto,F.E.W., dan Ariwinanti, D., (2014).: Penerapan *Personal Protective Equipment* (Alat Pelindung Diri) pada Laboratorium Pengelasan” *Jurnal Teknik Mesin* Tahun 22, No. 1, April 2014, 9-101
- Seviana R, Widowati,,N. N dan, Rosanti, E., (2016). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Pelaksanaan Pemakaian Alat Pelindung Diri Sebagai Upaya Pencapaian Zero Accident di PT. X, *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health*(Vol. 1, No. 1, Oktober 2016) <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIHOHNo>. ISSN online: 2541-5727DOI : <http://dx.doi.org/10.21111/jihoh.v1i1.606No>. ISSN cetak : 2527-468653
- Solekhah, S. A., (2018). Faktor Perilaku Kepatuhan Penggunaan APD pada Pekerja PT X, *Jurnal Promkes*, Vol 6 No. 1, Juli 201, 1-11
- Thamrin, H. M., (2015). Pencegahan kecelakaan kapal ke titik nol (zero accident). *Jurnal Ilmiah Widya*, 3, hlm. 110-116
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan

Wirawan., (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widiyarini, Permana, J. D., dan Hunusalela, F. Z., (2019). Penerapan zero *accident* melalui penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja K3) kepada mitra SMK, *Jurnal PKM: Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 02 No. 03, September-Desember 2019, p-ISSN 2614-574X, e-ISSN 2615-4749, hlm. 287-293

Zurriyah, J., Thamrin, Y., dan Ikhtiar, M., (2019). Faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada bengkel las di bengkel las di Kota Makassar 2018 *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* Volume 14 Nomor 1 Tahun 2019 , eISSN : 2302-2531

**STRATEGI MGMP SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DALAM MENINGKATKAN
KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DI TENGAH
BERBAGAI KENDALA**

**(Studi Kasus di Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi
Sumatera Barat)**

*THE FIRST MIDDLE SCHOOL MGMP STRATEGY
TO IMPROVE TEACHER PROFESSIONALISM
COMPETENCY IN VARIOUS CONSTRAINTS
(Case Study in Kabupaten Limapuluh Kota, West Sumatera
Province)*

Bambang Suwardi Joko

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan, Balitbang dan
Perbukuan, Kemendikbud
bambang_tito@yahoo.com

DOI : 10.24832/jpkp.v13i2.375

ABSTRACT

This study aims to determine the MGMP efforts of subjects in maximizing teacher professionalism amid in constraints and limitations, knowing the funding profile and the activeness of the MGMP and knowing the solutions made by the MGMP in overcoming obstacles amidst limitations. This research is a case study of the MGMP in junior high school subjects in the district. Fifty Cities using a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through questionnaire distribution techniques, field observations, structured interviews, documentation studies, and conducting clustered group discussions (FGD). The analysis is more descriptive, both in presenting statistical tables of field findings and in qualitative in-depth analysis. The research found that most of the junior high school MGMP subjects studied were quite active in conducting meetings, at least 12 times a year, the average activity of the members was above 70 percent. The management has always maintained that the MGMP must continue to run with independent funds, through the principle of togetherness and the principle of "from, by and for the teacher". The members of the Junior High School Subject MGMP immediately seek and coordinate in deciding and resolving problems related to funds, materials and the availability of required resource persons (sources). For the MGMP to continue to exist, it is necessary to monitor and evaluate MGMP activities in the future. The results of monitoring and evaluation can be used as a follow-up to activities, so that they can play a more role as expected in professional improvement and teacher development in a sustainably manner by the demands of knowledge and technology developments.

Keywords: Strategy, MGMP, teachers, professionals, constraints.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya MGMP mata pelajaran dalam memaksimalkan profesionalisme guru di tengah kendala dan keterbatasan, mengetahui profil pendanaan dan keaktifan MGMP serta mengetahui solusi yang dilakukan MGMP dalam mengatasi kendala di tengah keterbatasan. Penelitian ini merupakan studi kasus MGMP mata pelajaran SMP di Kab. Limapuluh Kota dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik pembagian kuesioner, observasi lapangan, wawancara terstruktur, studi dokumentasi, dan melakukan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT). Analisis lebih bersifat deskriptif, baik dalam menampilkan tabel statistik temuan lapangan maupun pendalaman kualitatif. Penelitian menemukan bahwa sebagian besar MGMP mapel SMP yang dikaji cukup aktif melakukan pertemuan, minimal sebanyak 12 kali dalam satu tahun, keaktifan anggota rata-rata di atas 70 persen. Pengurus selalu berpendirian MGMP harus tetap berjalan dengan dana mandiri, melalui prinsip kebersamaan dan asas "dari, oleh, dan

untuk guru". Anggota MGMP mapel SMP serta merta mengupayakan dan berkoordinasi dalam memutuskan dan menyelesaikan permasalahan terkait dana, materi serta keberadaan (sumber) narasumber yang dibutuhkan. Agar MGMP tetap eksis, perlu pemantauan dan evaluasi kegiatan MGMP di masa mendatang. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai tindak lanjut kegiatan, agar lebih berperan sebagaimana diharapkan dalam peningkatan profesional dan pengembangan guru secara berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Kata kunci: Strategi, MGMP, guru, profesional, kendala.

PENDAHULUAN

Tantangan yang dihadapi organisasi MGMP adalah kemampuan membentuk komunitas guru yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas utama pembelajaran. Kompetensi dan profesional guru itu sendiri merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan profesional bermakna sebagai pemilikan keahlian guru dalam pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya tersebut (Permendiknas No. 16/2017).

Namun realita berbicara lain, keberadaan organisasi MGMP yang ditujukan untuk guru SMP dan SMA masih jauh dari harapan. Meski organisasi ini telah dibentuk relatif lama belum cukup mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana diharapkan, yakni sebagai tempat melakukan pertukaran pengalaman, penulisan/pengimbasan pengetahuan tentang segenap aspek terkait pembelajaran, kegiatan diskusi, serta pemecahan masalah yang terkait dengan pembelajaran. Organisasi yang dibentuk melalui prinsip dari, oleh, dan untuk guru ini belum cukup mampu menjadi pintu masuk bagi peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru yang pada akhirnya diharapkan berdampak positif terhadap mutu pendidikan, baik dalam lingkup sekolah, daerah, provinsi, maupun nasional.

Sebenarnya berbagai cara telah dilakukan untuk meningkatkan peran dan fungsi MGMP ini, antara lain: memberikan pelatihan terhadap pengelola, membantu dana kegiatan, bahkan digunakan sebagai wadah dalam memberikan wadah pelatihan program Guru Pembelajar oleh pihak Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK). Tahun 2016 salah satunya, Ditjen GTK melaksanakan pelatihan program Guru

Pembelajar (GP) dengan memanfaatkan fungsi MGMP ini. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalitas kerja guru dengan menggunakan pendekatan moda tatap muka, moda dalam jaringan (*on-line*), dan moda kombinasi keduanya. Tahun 2018-2019, program ini berganti nama menjadi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan menambah jumlah peserta pelatihan. Namun meski sebanyak ratusan ribu orang guru telah menerima pelatihan tersebut, peningkatan kualitas pendidikan belum memperlihatkan indikasi yang memuaskan.

Agung (2017) dalam paparan ilmiahnya menyatakan lemahnya kepemilikan kompetensi guru, membawa pencapaian hasil belajar anak didik yang kurang memadai sehingga mendesak dilakukan peningkatan kompetensi guru. Pembentukan guru yang kompeten dan profesional memerlukan dua strategi pendekatan, yaitu: (1) melakukan pengembangan kompetensi guru; dan (2) meningkatkan profesionalitas kerja, baik dari sisi internal guru maupun faktor eksternal lainnya, Islahuddin (2018) berpendapat ada dua model pengembangan guru yaitu pengembangan secara formal dan informal. Secara informal, guru atas keinginan sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaannya. Artinya guru memiliki inisiatif berkeinginan keras untuk maju dengan cara meningkatkan kinerjanya. Sedangkan pengembangan secara formal adalah guru ditugaskan lembaga pendidikan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan baik yang dilakukan oleh organisasi maupun yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan.

Selayaknya MGMP dapat menjadi tempat kolaboratif guru untuk mendukung tugas pembelajaran. Hal itu baru terwujud apabila MGMP telah berdaya dan berfungsi ganda, yakni sebagai wahana untuk membentuk kemampuan

mengelola pembelajaran guru, sekaligus pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Namun hasil itu baru akan terealisasi jika MGMP benar-benar mampu menunjukkan aktivitas dan kreativitas kegiatannya, serta mampu melibatkan partisipasi guru anggotanya. Wadah MGMP harus dirasakan manfaatnya oleh guru anggotanya, bukan hanya sebatas tempat berkumpul dan 'kongkow-kongkow' semata. MGMP yang tidak berdaya cenderung belum akan menjadi sumber di mana guru dapat menimba ilmu dan mengembangkan kemampuan profesionalitas diri. Keikutsertaan guru terhadap MGMP yang belum berdaya lebih didasarkan atas keterpaksaan, dorongan *atasan*, atau sekedar mengikuti yang dianggap kurang memberikan pemenuhan kebutuhan menunjang pembelajaran (Agung, 2017; Winingsih dkk, 2019).

Tegasnya memberdayakan MGMP masih perlu terus diupayakan. Sebagai wadah pertemuan para guru mata pelajaran (mapel), MGMP tidak hanya berfungsi sebagai forum silaturahmi, namun untuk menampung berbagai permasalahan yang dihadapi guru di sekolah sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diembannya (Nurdianti, 2013). MGMP juga harus bermanfaat untuk menambah wawasan, ilmu, wadah diskusi tentang kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum yang berlaku. Dengan kata lain kehadiran MGMP haruslah dirasakan peran dan manfaatnya dalam mengatasi segenap aspek yang terkait dengan tugas pokok pembelajaran yang dihadapi guru. Apabila MGMP dirasakan kurang efektif, monoton, membosankan, miskin kreatif, dan sebagainya menjadikan guru malas hadir dan berpartisipasi, sehingga MGMP akan kurang berkembang dan tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Ketidak efektifan MGMP itu sendiri dipastikan dipengaruhi oleh kompleksitas faktor, antara lain manajemen yang kurang lancar, tidak adanya dana, akses, dan dari sisi guru yang disibukkan dengan jam mengajar yang padat (Sumardi, 2012; Republika, 2018, Winingsih dkk, 2019).

Sudarnoto (2012) mengemukakan perlu ada upaya untuk merevitalisasi organisasi guru MGMP agar dapat berperan secara optimal. Tidak disangkal bahwa terdapat juga sejumlah MGMP yang telah berjalan memuaskan dan mampu menjadi *entry point* bagi peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru-gurunya. Upaya merevitalisasi MGMP pun perlu belajar dari organisasi-organisasi guru seperti ini,

mengambil hal-hal baik yang telah dilaksanakan dan digunakan sebagai refleksi bagi yang lain untuk meningkatkan peran dan fungsinya. Salah satu kasus MGMP terkategori baik ini berada di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. MGMP-MGMP di wilayah ini bukan hanya mampu memperlihatkan keaktifan kegiatan, melibatkan partisipasi guru, dan berperan sebagai wahana peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru.

Artikel ini terkait dengan yang dikatakan terakhir, yakni ingin mengetahui segenap hal terkait dengan pengelolaan MGMP di wilayah Kabupaten Limapuluh Koto, Sumatera Barat. Paper bertujuan memotret profil dan kegiatan MGMP mapel SMP di Kab. Limapuluh Kota, serta kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan, serta upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap MGMP lain, dan memberikan manfaat bagi pemerintah pusat dan daerah guna menentukan kebijakan bagi pemberdayaan MGMP dalam meningkatkan profesionalisme guru. Praktik baik yang dilakukan MGMP SMP Kab. Limapuluh Kota diharap dapat menjadi rujukan bagi MGMP daerah lain untuk meningkatkan peran dan fungsinya secara optimal.

Tantangan Globalisasi (Pengembangan Kualitas dan Daya Saing SDM)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini telah membuat perubahan besar serta melahirkan berbagai macam teknologi baru di dunia. Teknologi telah menjadi alat yang dianggap mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali.

Kemajuan TIK dan era digital teknologi yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia, menyebabkan semua begara bersaing memanfaatkan teknologi itu sendiri pada berbagai sektor kehidupan. Hampir satu dasawarsa Indonesia terlambat dalam

mengadopsi teknologi komunikasi khususnya internet. Namun budaya digital masyarakat Indonesia sangat cepat menerima perkembangan teknologi. Di lihat secara global Indonesia masuk dalam budaya digital yang di butuhkan dalam mencapai pertumbuhan yang positif sesuai dengan kemajuan jaman itu sendiri (Setiawan, 2017).

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan TIK khususnya dalam proses pembelajaran. Pendidikan harus menjadi media utama untuk memahami, menguasai, dan memperlakukan teknologi dengan baik dan benar.

Permasalahan yang muncul seiring dengan pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan adalah faktor penguasaan TIK oleh para guru. Sebagaimana kita ketahui, dalam pendidikan di sekolah guru adalah motor utama penggerak dalam pelaksanaan pembelajaran (Budiana, dkk..

Upaya yang harus dilakukan pada teknologi informasi dan digital harus disikapi dengan serius, menguasai, dan mengendalikan peran teknologi dengan baik agar era digital membawa manfaat bagi kehidupan. Menurut H. Hamzah B. Uno dan Hj. Nina Lamatenggo, (2011, 61) dalam Budiman (2017), bahwa kecendrungan pendidikan di Indonesia di masa mendatang adalah:

1. Berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh (*distance learning*).
2. *Shareng resource* bersama antar lembaga pendidikan/latihan dalam sebuah jaringan perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya (guru, laboratorium) berubah fungsi menjadi sumber informasi daripada sekedar rak buku;
3. Penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif, seperti CD-ROM multimedia dalam pendidikan secara bertahap menggantikan televisi dan video.

Perubahan akan tuntutan itulah yang menjadikan dunia pendidikan memerlukan inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajarannya karena banyak orang mengusulkan dalam pendidikan khususnya pembelajaran, namun sedikit sekali orang berbicara solusi pemecahan masalah

proses belajar dan mengajar yang sesuai dengan tuntutan global Abad ke 21 saat ini.

Menurut Rosenberg dalam G. Gunawan (2009) dalam Sudibyo (2011), dengan berkembangnya penggunaan TIK terdapat lima pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu: 1) dari pelatihan ke penampilan, 2) dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, 3) dari kertas ke "*on line*" atau saluran, 4) dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, 5) dari waktu siklus ke waktu nyata.

Dampak positif dalam dunia pendidikan informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah di akses, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi *e-learning*, kemajuan TIK memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis *teleconference* yang tidak mengharuskan guru dan siswa berada dalam satu kelas. Sejatinya perkembangan kemajuan TIK harus diimbangi dengan peningkatan dan kemampuan SDM terutama kualitas guru dalam menghadapi daya saing yang sudah pada tingkatan global.

Selain itu, melalui internet layanan informasi dapat diberikan sebagai sumber belajar, media belajar yang dapat dipelajari sesuai dengan kecepatan belajar peserta didik. Media belajar tidak terbatas pada huruf dan gambar melainkan dapat dikombinasikan dengan grafik, animasi, video, audio secara bersama-sama sehingga media ini lebih dikenal dengan istilah multimedia. Pengaruh positif pemanfaatan internet untuk pendidikan dalam membangun SDM dunia pendidikan harus mampu mengikuti perkembangan aplikasi IPTEK (Husaini, 2014).

Oleh karena itu, guru harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini karena sudah merupakan keharusan yang wajib di gunakan dalam media pembelajaran. Demikian halnya dengan literasi dalam pembelajaran, literasi juga mencakup kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual dalam bentuk video dan gambar. GLN (Gerakan Literasi Nasional) Kemendikbud menetapkan 6 literasi dasar salah satunya literasi digital. Perkembangan TIK yang pesat saat ini dibutuhkan pengetahuan literasi digital dalam pembelajaran daring. Literasi digital sendiri merupakan kemampuan individu menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis dan mengevaluasi informasi. Contoh pengetahuan literasi digital yaitu kemampuan menghubungkan

perangkat jaringan internet yang memadai, serta menginstal berbagai perangkat lunak untuk pembelajaran daring.

Dunia pendidikan ke depan, tuntutan guru yang profesional memegang peranan penting sesuai perkembangan TIK yang mengarah digitalisasi pembelajaran menuju Merdeka belajar. Merdeka belajar adalah kebijakan besar dalam rangka mewujudkan transformasi pengelolaan pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan menghapus Ujian Nasional (UN) diganti Asesmen Kompetensi. Asesmen nasional sendiri terdiri dari tiga bagian yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar.

AKM dan Survei Karakter terdiri dari soal-soal yang mengukur kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi (Wahyuningsih, 2020). Fokus kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti dari pentingnya mata pelajaran lain. Justru dengan literasi dan numerasi ini membantu siswa mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau kuantitatif.

Kompetensi minimum adalah kompetensi dasar yang dibutuhkan siswa untuk bisa belajar, apapun materinya dan apapun mata pelajarannya. Sehingga materi AKM ada dua yaitu terkait literasi atau baca tulis, serta literasi numerasi. AKM memilih literasi dan numerasi karena literasi membaca dan numerasi adalah dua kompetensi minimum bagi siswa untuk belajar sepanjang hayat dan dapat berkontribusi kepada masyarakat.

Namun, literasi yang dimaksudkan di sini bukan sekedar kemampuan membaca, tapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan numerasi adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka. Serta menekankan literasi dan numerasi bukan tentang mata pelajaran bahasa atau matematika, melainkan kemampuan murid agar dapat menggunakan konsep literasi ini untuk menganalisa sebuah materi.

Pentingnya Kompetensi dan Profesionalisme Guru Menjawab Globalisasi

Sulit disangkal bahwa guru memainkan peran teramat penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan terampil, terutama untuk menjawab tuntutan persaingan global. Tanpa SDM yang berkualitas dan terampil, masyarakat Indonesia akan kurang mampu mengambil manfaat dalam persaingan untuk merebut peluang yang ada guna meningkatkan taraf hidup. Kesemuanya itu mengindikasikan adanya tantangan yang dihadapi guru semakin kompleks dan berat. Guru bukan hanya dituntut untuk meningkatkan profesionalisme, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan situasi abad 21. Untuk itu guru dituntut mampu menghasilkan keluaran siswa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, literasi membaca – menulis - berhitung, kreatif, berpikir kritis, mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak, dan menyampaikan pemikiran/gagasan, mampu berkolaborasi dalam memecahkan permasalahan yang kian kompleks, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta berkarakter dan berwawasan kebangsaan.

Pembelajaran masa kini dan akan datang menuntut guru untuk memiliki kompetensi dengan ciri: mampu mengembangkan perencanaan pembelajaran tuntas dan efektif; b) mengembangkan sikap kepemimpinan visioner yang berorientasi pada pencapaian hasil lebih baik, mampu berkomunikasi secara menarik, menyenangkan, dan efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran, dengan mendayagunakan segenap potensi dan kemampuan mengelola tekanan psikologis (*stress*) dalam pembelajaran, mampu mengembangkan sikap kreatif dan inovatif bagi diri sendiri dan mendorong kemunculan sikap kreatif siswa, mampu memanfaatkan metode pembelajaran secara baik dan mendorong siswa aktif mengomunikasikan pemikiran dan gagasan, mampu memanfaatkan teknologi komputer dan teknologi digital dalam pembelajaran, mengembangkan kolaborasi pembelajaran melalui pendekatan *problem based learning* dan *project based learning*, dan lain-lainnya. Eksplisit, guru dituntut kompeten dan profesional dengan memenuhi standar kompetensi, yaitu: kompetensi kognitif di antaranya menguasai materi pembelajaran, menguasai berbagai metode yang disesuaikan dengan materi pembelajaran; kompetisi yang afektif yang meliputi harga diri, mempunyai

kepedulian dalam pengembangan pendidikan dan wawasan luas terhadap perubahan yang terjadi; dan kompetisi psikomotor yaitu penguasaan sejumlah ketrampilan yang berkaitan dengan bidang studi garapannya. Guru yang professional juga harus mampu mendisiplinkan diri dalam mengatur waktu untuk kepentingan diri, tugas dan kemasyarakatan (Paraba, 2000)

Peran MGMP sebagai wadah *entry point* peningkatan kompetensi dan profesional guru

MGMP adalah forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran pada SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMALB/MALB yang berada pada satu wilayah/kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/pelaku perubahan reorientasi pembelajaran kelas. Organisasi MGMP SMP/MTs berada dibawah naungan Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota (Depdiknas, 2008). MGMP dilakukan oleh guru-guru yang memiliki kemampuan (tutor inti atau pemandu bidang studi/mata pelajaran), yang sebelumnya telah mendapatkan penataran oleh Kemdiknas. Wadah ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru untuk belajar, baik berupa sikap, kemampuan, pengetahuan, maupun keterampilan, sehingga memiliki dampak positif bagi para murid-muridnya (Werkanis & Hamadi, 2005).

Organisasi MGMP memiliki beberapa fungsi, yaitu menyusun program jangka panjang, menengah, dan pendek serta mengatur jadwal tempat dan kegiatan secara rutin; memotivasi para guru untuk mengikuti kegiatan MGMP secara rutin, baik di tingkat sekolah, wilayah, maupun kota; meningkatkan mutu profesional guru dalam pengajaran, evaluasi, dan pembelajaran di dalam kelas sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah; mengembangkan program layanan supervisi akademik klinis yang berkaitan dengan pembelajaran yang efektif; mengembangkan silabus dan melakukan Analisis Mata Pelajaran (AMP), Program Tahunan (Prota), Program Semester (Prosem), Rencana Pelajaran (RPP), dan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).

Dibentuknya organisasi MGMP memiliki beberapa tujuan, yaitu memperluas wawasan

dan pengetahuan guru khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dan sebagainya; memberikan kesempatan kepada anggota atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik; meningkatkan pengetahuan dan keterampilan; memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah; mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja dan mengembangkan profesionalisme di tingkat MGMP; meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik; dan meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat MGMP.

Banyak manfaat yang diperoleh oleh guru mapel yang terlibat di MGMP. Penelitian Islahuddin (2018) menyimpulkan kegiatan MGMP telah mampu meningkatkan kinerja guru Bahasa Indonesia dalam merencanakan pembelajaran, menerapkan strategi pembelajaran, mengelola kelas dan mengevaluasi pembelajaran. Dengan demikian pelaksanaan MGMP yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen sumberdaya manusia dapat meningkatkan kinerja guru Bahasa Indonesia dalam pembelajaran. Selain itu, penelitian Anwar (2017) menyatakan meski banyak faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru dalam pembelajaran, namun secara keseluruhan MGMP cukup berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme kinerja mengajar guru.

Pemberdayaan MGMP, dan Aspek Pendukung

Pendirian suatu organisasi, apapun bentuknya, diharapkan mampu menunjukkan keberdayaannya, sehingga dapat mempertahankan keberlangsungannya dan efektif. Secara sederhana pengertian berdaya berasal dari kata dasar daya, artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu dan sebagainya (KBBi). Tidak terkecuali dengan MGMP, memerlukan keberdayaannya baik dari segi organisasi dan pengelolaan, proses, aktivitas, maupun efektivitas hasilnya. Untuk itu MGMP yang berdaya haruslah didukung oleh

sejumlah aspek bersifat organisatoris maupun non-organisatoris, manusiawi maupun non-manusiawi. Aspek pendukung itu, antara lain: manajemen dan organisasi, kepengurusan, kegiatan, partisipasi/keterlibatan anggota, dukungan sarana-prasarana, pendanaan, sumber belajar.

MGMP adalah organisasi yang pelaksanaan kegiatannya harus dilengkapi dengan Surat Penetapan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) MGMP. Kepengurusan MGMP mengatur kepengurusan dan keanggotaan dengan berbagai tugas pokok dan fungsi. Pengurus MGMP terdiri dari: satu orang ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara, dan tiga orang ketua bidang, yaitu (1) bidang perencanaan dan pelaksanaan program; (2) bidang pengembangan organisasi, administrasi, sarana dan prasarana; dan (3) bidang hubungan masyarakat dan kerjasama. Pengurus MGMP dipilih oleh anggota berdasarkan AD/ART.

Aktivitas MGMP pada dasarnya merupakan bagian utama dalam pengembangan MGMP. Program tersebut merujuk pada usaha peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Terdiri dari Program umum adalah program yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada guru tentang kebijakan-kebijakan pendidikan di tingkat daerah sampai pusat, seperti kebijakan terkait dengan pengembangan profesionalisme guru. Program inti adalah program utama yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme guru yang dapat dikelompokkan ke dalam program rutin dan program pengembangan. Program penunjang bertujuan utk menambah pengetahuan dan keterampilan peserta dengan materi yang bersifat penunjang seperti bahasa asing, TIK, dan lain-lain.

Partisipasi merupakan pelibatan anggota untuk mendukung pencapaian tujuan dan hasil organisasi. MGMP membutuhkan partisipasi anggota yang berasal dari guru mata pelajaran sekolah negeri dan guru sekolah swasta, baik yang berstatus PNS maupun bukan PNS (setiap mata pelajaran membentuk MGMP), guru yang berasal dari 8 –10 sekolah atau disesuaikan dengan kondisi daerah setempat dan pembentukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai aspek partisipasi dapat diwujudkan oleh anggota, bukan hanya konsistensi partisipasi kehadiran dan keaktifan dalam kegiatan, tetapi bentuk

partisipasi lain, baik materi maupun non-materi. Materi misalnya mendukung ketersediaan sarana dan prasarana minimal Komputer, OHP/LCD Proyektor, dan Telepon dan Facsimile.

Dari segi pembiayaan adalah salah satu komponen penting untuk terlaksananya program MGMP sesuai yang diharapkan. Beberapa sumber dana MGMP yang dapat dimanfaatkan antara lain: iuran anggota, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), APBN, APBD, Komite Sekolah/ Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/Provinsi, LPMP, P4TK, Direktorat terkait, donatur yang tidak mengikat, unit produksi, hasil kerjasama, masyarakat, atau sponsor yang sah dan tidak mengikat. Dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rutin maupun pengembangan melalui mekanisme penggunaan sesuai ketentuan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan sebagian dari hasil penelitian mengenai MGMP di tahun 2020. Penelitian merupakan bentuk studi kasus yang dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif di MGMP di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Pengumpulan data dilaksanakan melalui pembagian kuesioner, wawancara dan diskusi kelompok terpumpun (DKT).-

MGMP guru SMP di Kabupaten Limapuluh Kota kota dipilih sebagai sasaran penelitian karena daerah ini dinilai telah mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pembelajaran guru-gurunya, diindikasikan dengan perolehan hasil belajar siswa yang tergolong baik dan merata. Dengan anggaran pendidikan yang terbatas menempati peringkat terendah nomor 2 dari 19 daerah di Sumatera Barat, namun berhasil memperoleh penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat dan PGRI yang dinilai memiliki perhatian dan komitmen tinggi terhadap pembangunan pendidikan, profesional dan kesejahteraan guru. Pencapaian prestasi akademis siswa SMP untuk tingkat provinsi dinilai sangat membanggakan (lihat tabel 1).

Sumber data diperoleh dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang diteliti. Kegiatan DKT dilakukan dengan melibatkan *stakeholder*: Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Kabid Pembinaan Ketenagaan, Kasi Kurikulum Dikdas, para ketua/ pengurus MGMP guru mapel dari 14 SMP.

Tabel 1. Capaian Nilai Ujian Nasional SMP Tahun 2018/2019 Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA KOTA/KABUPATEN	RERATA NILAI PADA MATA UJI				RERATA NILAI
		BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS	MATEMATIKA	IPA	
1	KOTA BUKITINGGI	76,41	59,76	59,35	61,44	64,24
2	KOTA PAYAKUMBUH	74,52	55,22	53,08	57,19	60,00
3	KOTA PADANG PANJANG	73,87	53,73	52,06	54,83	58,62
4	KOTA PADANG	72,22	54,06	53,09	54,32	58,42
5	KABUPATEN TANAH DATAR	72,55	49,73	48,97	51,92	55,79
6	KOTA SAWAHLUNTO	73,22	50,65	46,74	51,56	55,54
7	KOTA PARIAMAN	68,45	49,05	47,64	52,22	54,34
8	KOTA SOLOK	69,22	49,46	46,48	50,47	53,91
9	KABUPATEN LIMAPULUH KOTA	70,7	46,12	45,7	50,79	53,33
10	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	64,11	49,29	52,63	45,08	52,78
11	KABUPATEN AGAM	68,66	46,54	44,91	48,58	52,17
12	KABUPATEN PESIR SELATAN	63,61	47,05	46,57	48,82	51,51
13	KABUPATEN DHARMASRAYA	67,69	46,16	43,75	48,05	51,41
14	KABUPATEN SIJUNJUNG	67,52	45,66	43,51	46,89	50,90
15	KABUPATEN SOLOK	67,61	44,48	43,52	45,55	50,29
16	KABUPATEN PASAMAN BARAT	66,49	44,9	43,36	45,27	50,01
17	KABUPATEN PASAMAN	66,21	42,63	41,5	43,76	48,53
18	KABUPATEN SOLOK SELATAN	65,98	43,03	40,76	43,44	48,30
19	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	63,66	43,17	41,34	44,36	48,13
	RERATA UN SUMATERA BARAT	68,78	48,32	47,11	49,63	53,46
	NASIONAL	65,69	50,23	46,56	48,73	52,82

Sumber: Puspendik, 2019

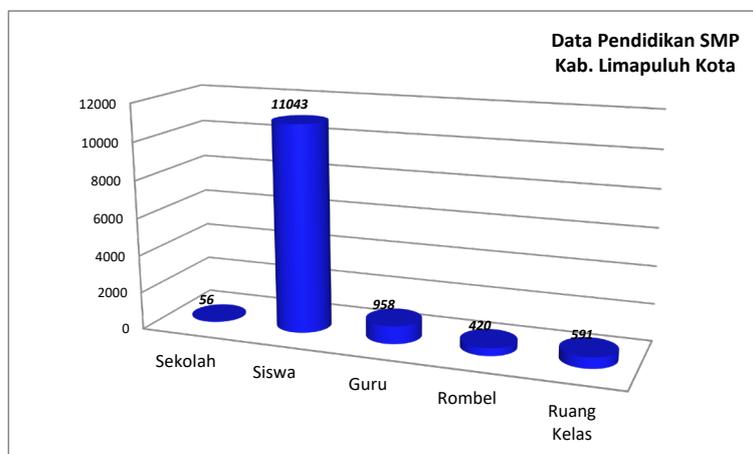
Teknik analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif deskriptif, yaitu penggambaran data dengan pola deskriptif atau telaah atau simpulan agar mudah dibaca dan bermakna, diperkaya dengan informasi kualitatif yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Pendidikan SMP di Kab. Limapuluh Kota

Berikut disajikan profil singkat pendidikan jenjang SMP di Kab. Limapuluh Kota. Grafik 1 menggambarkan perkembangan pendidikan SMP meliputi jumlah sekolah, peserta didik, guru, rombongan belajar (rombel), dan ketersediaan ruang kelas. Terdapat 56 SMP meliputi 47 SMP negeri dan 9 swasta (Kemendikbud, 2020).

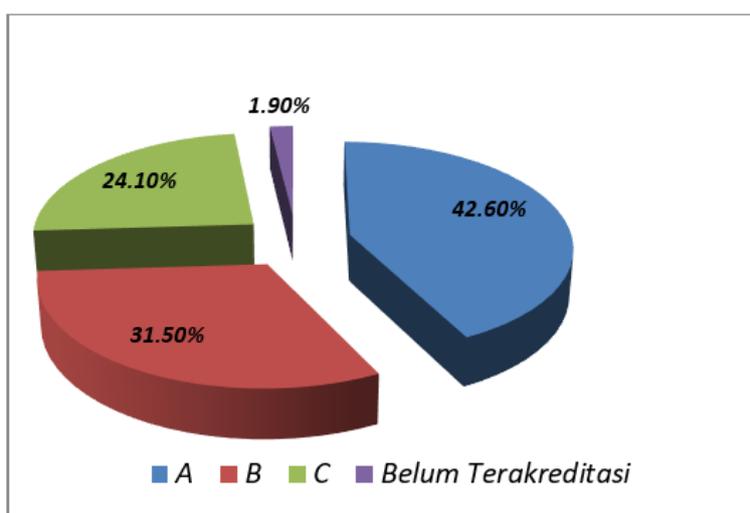
Grafik 1 Perkembangan Data Pendidikan SMP Kab. Limapuluh Kota



Sumber: Dapodik PAUD dan Dikdamen, 2020

Sebagai bagian dari pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) dalam pemenuhan akreditasi sekolah, sebanyak 42,6 % SMP terakreditasi A, 31,5 % terakreditasi B, 24,1 % terakreditasi C, dan terdapat 1,9 % belum terakreditasi (Grafik 2). Jika akreditasi sekolah sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah, maka perlu upaya maksimal dari sekolah maupun dinas setempat untuk meningkatkan SNP yang telah ditentukan. Dengan informasi ini, hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional dan daerah.

Grafik 2 Akreditasi SMP di Kab. Limapuluh Kota

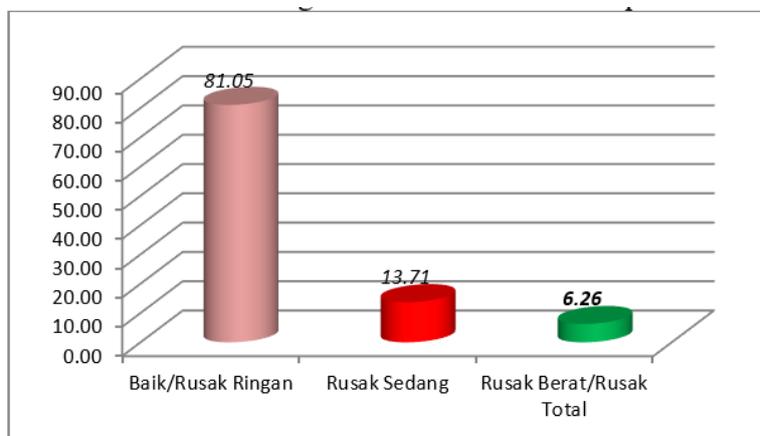


Sumber: BAN S/M, Oktober 2019

Dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun 2019, terdapat 2 pilihan sistem ujian yaitu UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) dan UNKP (Ujian Nasional Berbasis Kertas Pensil). Pada ujian SMP tahun 2019, sebanyak 72,9 % sekolah telah menyelenggarakan UNBK dan 27,1 % masih menyelenggarakan UNKP (Puspendik, 2019).

Ketersediaan ruang kelas adalah bagian layanan ketersediaan prasarana pendidikan, yaitu terdapat 591 ruang kelas tersebar di 56 SMP (Grafik 3). Dilihat kelayakan ruang kelas, terdapat 479 (81.05%) ruang kelas kondisi baik/rusak ringan, 75 (13,71%) kondisi rusak sedang, dan 37 (6,26%) dengan kondisi ruang kelas rusak berat/rusak total.

Grafik 3 Kondisi Ruang Kelas SMP di Kab. Limapuluh Kota



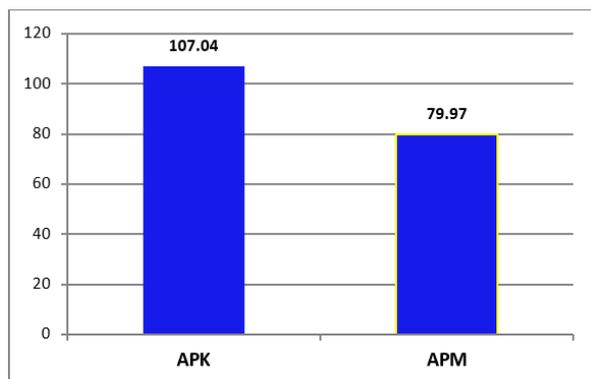
Sumber: Data verifikasi PDSPPK, Juli 2019

Untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah (Kemendikbud, 2017).

Sedangkan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dapat dilihat APM daerah tersebut. APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%.

Grafik 4 menggambarkan APK SMP Kab. Limapuluh kota 107,04 artinya masih banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP atau di luar usia sekolah pada jenjang tersebut. Namun APM SMP masih dibawah 100 yaitu 79,97 atau dibawah ideal artinya banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang tersebut.

Grafik 4 APK dan APM SMP Kab. Limapuluh Kota Tahun 2019



Sumber: npd.Kemendikbud, 2019

Kegiatan MGMP Mapel SMP di Kab. Limapuluh Kota

Menurut Kabid Ketenagaan Disdik setempat, pada perkembangannya, saat ini terdapat 10 MGMP mapel SMP meliputi MGMP bahasa Indonesia,

MGMP IPA, MGMP Bahasa Inggris, MGMP IPS, MGMP Prakarya, MGMP Seni Budaya, MGMP PJOK, MGMP PPKN, MGMP Matematika, dan MGMP Pendidikan Agama Islam, yang masing-masing memiliki ketua dan pengurus.

Tabel 2 Sebaran Pengurus MGMP Mapel SMP

No.	Sekolah	MGMP
1.	SMPN 1 Luak Kab. Limapuluh Kota	Ketua MGMP Bahasa Indonesia
2	SMPN 2 Harau Kab. Limapuluh Kota	Ketua MGMP mapel IPA
3	SMPN 2 Kab. Limapuluh Kota	Ketua MGMP Bahasa Inggris
4	SMPN 3 Pangkalan Koto Baru, Kab. Limapuluh Kota	Ketua MGMP mapel IPS
5	SMPN 1 Guguak Kab. Limapuluh Kota	Ketua MGMP mapel Prakarya
6	SMPN 2 Kapur IX Kab. Limapuluh Kota	Ketua MGMP mapel Seni Budaya
7	SMPN 4 Payakumbuh	Ketua MGMP mapel PJOK
8	SMPN 1 Payakumbuh	Ketua MGMP mapel PPKN
9	SMPN 1 Payakumbuh	Ketua MGMP mapel Matematika
10	SMPN 3 Harau, Kab. Limapuluh Kota	Sekretaris MGMP mapel Pend. Agama Islam (PAI)
11	SMPN 2 Situjuh, Limo Nagari, Kab. Limapuluh Kota	Pengurus MGMP mapel Bahasa Inggris

MGMP mapel SMP atau perkumpulan bagi guru SMP mata pelajaran yang berada di Kab. Limapuluh Kota melakukan fungsinya sebagai sarana komunikasi, belajar, bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran. Sama halnya dengan persyaratan keberadaannya, MGMP di Kab. Limapuluh Kota mempunyai struktur kepengurusan, dasar hukum, visi, misi dan tujuan yang jelas. Implementasinya, program MGMP masing-masing guru mapel memiliki kesamaan persepsi dan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan karirnya yang terhimpun dalam kegiatan, dan mampu meningkatkan motivasi, frekuensi, dan intensitas kegiatan pengembangan kariernya.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan MGMP adalah memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, penyusunan dan pengembangan silabus, RPP, menyusun bahan ajar berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK), membahas materi esensial yang sulit dipahami, strategi/metode/pendekatan/media pembelajaran, sumber belajar, kriteria ketuntasan minimal, pembelajaran remedial, soal tes untuk berbagai kebutuhan, menganalisis hasil belajar, menyusun program dan pengayaan, dan membahas berbagai permasalahan serta mencari alternatif solusinya, bahkan memberi kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik, mengembangkan kegiatan *mentoring* dari guru *senior* kepada guru *junior* (Depdiknas, 2009).

Masing-masing MGMP mapel memiliki pola pengelolaan yang berbeda misalnya Kegiatan MGMP IPS pernah rutin melaksanakan kegiatan dalam 8 minggu (16 kali pertemuan, 1 hari = 2 kali pertemuan) dan ditambah 1 kali pertemuan sehingga menjadi 17 kali pertemuan. Dinas berperan mengawasi materi kebijakan dan berbagai informasi teknis yang berkaitan dengan pengembangan karir guru. Sosialisasi dan implementasi K-13 dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Juga dibahas tentang Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).Kegiatan dalam bentuk workshop atau bimtek melibatkan narasumbernya Dinas dan Widyaaiswara LPMP.

Lain lagi dengan MGMP mapel Matematika, dalam kegiatannya di tahun 2019 menggelar Pelatihan dan Penggunaan Augmented Reality (AR) dalam Pembelajaran Matematika yang dirancang menggunakan prinsip penampilan objek 3D (tiga dimensi) di kalangan MGMP bagi guru Matematika se-Kabupaten Limapuluh Kota memperbaharui bahan ajar. MGMP melakukan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Universitas Negeri Padang yang merupakan salah satu program tahunan.

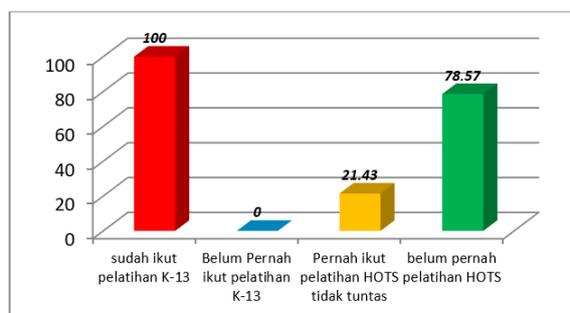
Banyak manfaat yang diperoleh dengan terlibat di MGMP, Uslimah (2006) menyimpulkan ada peningkatan dari keterampilan guru Biologi setelah mengikuti kegiatan MGMP dalam penguasaan materi, kemampuan dalam perencanaan dan mengelola pembelajaran, serta melakukan evaluasi menjadi lebih baik. Selain pertemuan, guru juga harus terlibat dan berpartisipasi dalam pelatihan. Guru diberikan kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan keprofesionalannya melalui beberapa pelatihan, agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam menguasai materi pembelajaran,

mengembangkan materi pembelajaran dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar, misalnya pelatihan terkait K-13.

Pada era kolaborasi, guru juga sudah harus melepaskan diri dari kebiasaan bekerja sendiri-sendiri. Dengan K-13, guru harus mengembangkan kebiasaan baru bekerja kooperatif sebagai anggota *community of educators* di satuan pendidikan masing-masing. Kerja sama antar guru dalam satu satuan pendidikan dalam merencanakan, mengembangkan pembelajaran, penilaian dan upaya-upaya bersama guna peningkatan merupakan sesuatu yang diperlukan saat ini (Sutjipto, 2016).

Grafik 5 menggambarkan hampir semua pengurus dan guru MGMP mapel SMP peserta DKT di Kab. Limapuluh Kota telah mengikuti pelatihan K-13. Dengan terlibat secara aktif pada pelatihan terkait K-13, seseorang paling tidak memiliki tiga pengalaman, yaitu: 1) pemahaman terhadap ide dan desain kurikulum, 2) strategi penyajian implementasi kurikulum, dan 3) menyampaikan konsep kurikulum (Kemdikbud, 2016).

Grafik 5. Keikutsertaan Guru dalam Pelatihan K-13 dan HOTS



Sumber: Hasil DKT Ketua/pengurus MGMP mapel SMP

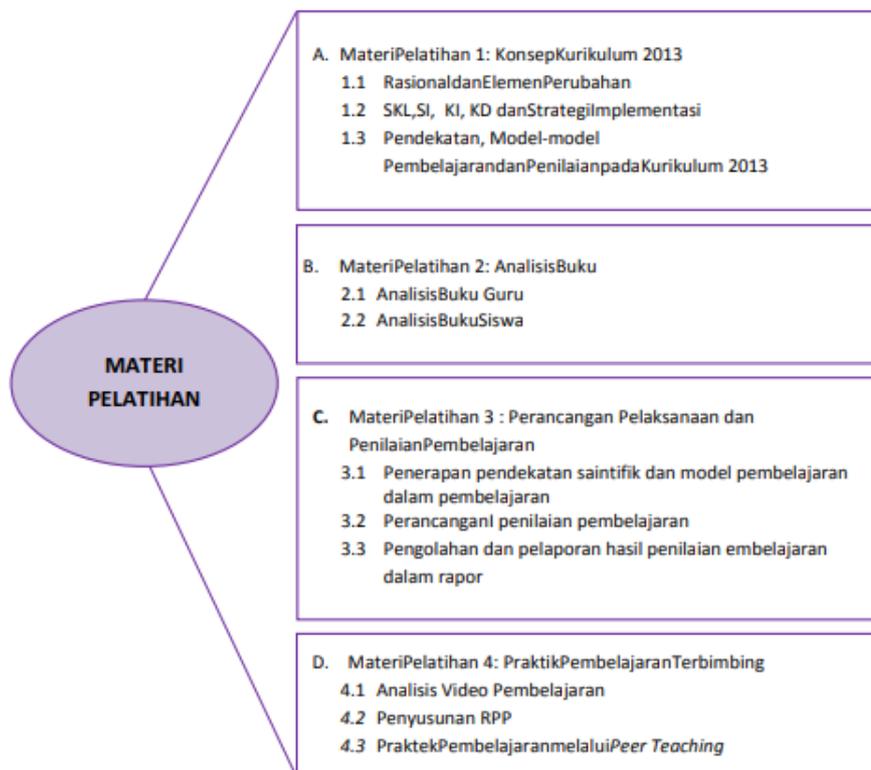
Utamanya setelah mengikuti pelatihan implementasi K-13, guru mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian K-13. Sutjipto (2016) juga mengungkapkan bahwa pelatihan implementasi K-13 bagi guru merupakan perhelatan seni mengolah berbagai tujuan untuk menyelaraskan kebijakan yang diprogramkan melalui ajang berbagi guna mewujudkan pemahaman bersama yang ideal terhadap ide, rancangan, dan pengimplementasiannya.

Selain K-13, dalam menuju pembelajaran abad 21, saat ini para guru mulai diperkenalkan pembelajaran *Higher Order Thinking Skill* (HOTS). Pengembangan pembelajaran HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah program pengembangan Kemdikbud melalui Ditjen GTK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan. Pemerintah mengharapkan para peserta didik mencapai berbagai kompetensi dengan penerapan HOTS. Kompetensi tersebut adalah berpikir kritis (*critical thinking*), kreatif dan inovasi (*creative and innovative*), kemampuan berkomunikasi (*communication skill*), kemampuan bekerja sama (*collaboration*) dan kepercayaan diri (*confidence*).

Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab, tentang pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir aras tinggi (HOTS), sebagian besar pengurus/guru mapel SMP mengaku belum pernah mengikuti pelatihan HOTS. Dikemukakan ketua MGMP Seni Budaya, umumnya guru sudah pernah mengikuti pelatihan K-13 namun secara khusus belum pernah ikut pelatihan HOTS. Kalaupun pernah, tidak utuh sebatas pengenalan atau materi selingan pelatihan K-13. Hal senada disampaikan ketua MGMP mapel PJOK, materi pembelajaran tentang HOTS pernah diperkenalkan pada sesi terakhir pelatihan K-13 namun selintas dan tidak mendalam. Bahkan ketua MGMP IPA mempertegas sebagian besar guru mapel IPA belum pernah ikut pelatihan HOTS. Ada satu orang guru yang pernah ikut pelatihan HOTS, namun teknisnya belum secara utuh, sebatas sosialisasi.

Seorang guru peserta DKT, mapel bahasa Inggris, mengaku pernah mengikuti pelatihan HOTS bagaimana membuat soal dan pembuatan soal-soal UN yang diselenggarakan oleh Puspendik, namun hanya melalui daring/video tutorial, jadi tidak semua materi tuntas, peserta hanya diberi *flashdisk* untuk dipelajari.

GAMBARAN STRUKTUR MATERI PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013



Sumber: Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemdikbud 2014.

Pengelolaan dan Kegiatan MGMP Mapel SMP

Guru merupakan orang profesional atau ahli yang memerlukan kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Sagala (2009:209) kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas dengan profesional. Sedangkan Daryanto dan Tasrial (2015) mengatakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Dalam POS MGMP, ada tiga jenis program yang dapat dirancang untuk kegiatan MGMP, yaitu program umum, program inti (program rutin dan program pengembang) dan program penunjang. Program tersebut harus rinci memuat sejumlah kegiatan untuk setiap pertemuan. Program untuk satu tahun sekurang-kurangnya memuat 12 kegiatan. Dalam penyusunan program MGMP dipilih program yang menjadi prioritas, baik program rutin maupun program pengembangan. Keseluruhan program MGMP menjadi tanggungjawab pengurus. Masing-masing program sebaiknya mempunyai penanggungjawab program. Penanggungjawab program bekerja berdasarkan kerangka acuan kerja yang telah disepakati oleh keseluruhan anggota MGMP. Tugas penanggungjawab program adalah melaksanakan dan mengelola program sesuai dengan kerangka acuan kerja.

MGMP pada hakikatnya sebagai sarana untuk berkumpulnya guru mata pelajaran yang sejenis untuk membahas persoalan yang berkaitan mata pelajaran yang bersangkutan, termasuk di dalamnya adalah tentang pembuatan perangkat pembelajaran, pembuatan bahan ajar, metode maupun-masing. model pembelajaran berdasarkan lingkungan sekolah masing, selain itu, tentu untuk saling embagi informasi pendidikan yang bersifat kekinian.

Dengan segala ketebatasan dan kendala yang ada, pengelolaan dan kegiatan MGMP SMP di Kab. Limapuluh Kota dapat dikatakan tetap hidup meski terkendala masalah klasik seperti dana, lokasi dan waktu yang bersamaan dengan jam mengajar. MGMP tidak sekedar wadah silaturahmi dan kumpul semata, namun sebagai wadah bertukar pikiran, bertukar pengalaman, dan menambah wawasan serta mendapatkan ilmu. Masih banyak guru SMP mapel tetap semangat mengikuti kegiatan MGMP untuk

meningkatkan kompetensinya, yang manfaatnya dirasakan salah seorang guru bahasa Inggris bahwa MGMP sebagai tempat pengimbasan guru dan dibahas bersama-sama.

Guru mapel bahasa Inggris dari SMPN 2 Situjuh, tersebut beranggapan program yang ada di MGMP sangat besar sekali untuk meningkatkan mutu belajar, misalnya dalam proses pembelajaran; *“disana kami saling sharing tentang metode pembelajaran bagaimana meningkatkan mutu kualitas pendidikan bagi siswa kemudian gurunya, mungkin dalam pembahasan soal-soal Ujian Nasional (UN)”*.

Hal serupa yang dilakukan oleh MGMP Prakarya, rutin pertemuan bulanan 12 kali dalam setahun, membahas K-13, membuat soal HOTS, *mid* dan *essay* dalam soal bercerita dengan berbagai topik, dan menyusun pertanyaan. Menurut ketuanya, dengan pengalaman membuat soal, para guru dapat merasakan hal baru terkait mapel Keterampilan yang nyatanya belum sesuai dengan K-13. Karena apa yang pernah diajarkan selama ini hanya mengandung 2 aspek yaitu kerajinan dan pengolahan.

Melakukan kegiatan dengan kolaborasi guru dan narasumber adalah salah upaya memperkuat kelompok kerja MGMP (Lie, 2020). Hal ini pula sebagai usaha pelibatan guru dalam area untuk mengembangkan dan melaksanakan kegiatan, program kolaborasi guru dan rekan, mentoring dan pendampingan, dan upaya berkelanjutan dalam periode waktu yang memadai. Kehadiran nara sumber (narsum) diharapkan bisa memberikan warna dan kontekstualisasi bagi pengetahuan dan wawasan baru untuk pembelajaran. Seperti yang dilakukan MGMP mapel Matematika dan MGMP mapel bahasa Indonesia. Guru menjadi mentoring pada MGMP mapel Matematika sudah terbiasa, kegiatan pertemuan MGMP dijadikan sebagai wadah koordinasi para guru mapel untuk berbagi ilmu. Biasanya jika ada anggota yang telah selesai mendapat pelatihan terkait materi pembelajaran Matematika, akan di *share* dan dikembangkan dalam pertemuan MGMP.

Pada MGMP mapel Bahasa Indonesia, agar pertemuan tidak monoton, anggota sepakat selalu mengundang narsum yang kompeten dari luar. Biasanya materi yang terkait penilaian dan masalah HOTS. Alasan mendatangkan nara sumber adalah agar dapat substansi lebih baik. Hal ini dilakukan karena sebagian besar guru mapel bahasa Indonesia sudah berusia lanjut. Hal

ini berhasil mejadi daya tarik para anggota MGMP untuk aktif dan datang dalam pertemuan MGMP. Adapula transfer ke teman atau rekan sejawat, misalnya untuk membahas materi soal yang 25 persen dari pusat. Tidak sedikit guru mengalami kesulitan saat dibahas kepada siswa karena banyak kisi-kisi yang tidak sampai. MGMP juga melakukan kegiatan analisis dengan panduan langsung dari dinas. Untuk materi pertemuan, pengurus selalu menawari ke anggota untuk membuat perencanaan pembelajaran mapel bahasa Indonesia bagamaimana penyusunan model soal bahasa Indonesia agar menjadi menarik seperti HOTS.

Ketika masih mengajar di Aceh, ketua MGMP mapel PJOK mengaku belum mengenal adanya MGMP. Menkenal MGMP ketika mengajar di Kab. Limapuluh Kota. MGMP selama ini melakukan pertemuan dengan pemberdayaan instruktur dari internal tentang K-13. Jika ada materi khusus, MGMP memanggil narsum dari pengawas sebagai penguatan, misalnya penyusunan soal USBN dengan mengkondisikan arahan dinas. Untuk penyusunan soal UNBK, MGMP selalu mempelajari kisi-kisi dari pusat, namun anggota sepakat karena belum terbiasa menyusun soal teori seperti maka lebih banyak menyusun ke soal praktek, karena mapel PJOK sifat kegiatannya *free teaching*.

Berbagai cara dilakukan guna meningkatkan kompetensi pedagogik guru, seperti yang dilakukan MGMP mapel IPA. MGMP sering mendatangkan narsum dari luar, utamanya membahas soal USBN yang terkait dengan HOTS. Hampir semua guru sekolah mapel IPA diarahkan oleh dinas ikut MGMP IPA, terlebih untuk kegiatan PKB, karena ada materi peningkatan pedagogik, dan keprofesionalan guru. Sisi positifnya, sejak PKB dilakukan di MGMP, para guru menjadi aktif dalam MGMP. Guru wajib mengikuti kegiatan MGMP minimal 12 kali pertemuan dalam satu tahun atau sebulan sekali. Nilai UKG dan PKG yang rendah, membuat para guru termotivasi mengikuti MGMP sehingga pertemuan rutin dilaksanakan seminggu sekali. Fasilitator kegiatan PKB di MGMP adalah Instruktur Nasional (IN) yang diambil dari guru-guru dengan nilai UKG terbaik. Masih ada keinginan MGMP IPA membuat jurnal guru, karena selama ini belum ada wadah menulis bagi para ilmu alam ini.

Terkait dengan pelatihan, ketua MGMP mapel PPKN juga mengaku belum pernah mendapat

pelatihan tentang HOTS secara utuh hanya selintas pada pelatihan K-13. Kegiatannya lebih berinisiatif dalam pembuatan soal, serta mengutus dan memberi kesempatan anggota yang cekatan dalam aktivitas sehari-hari untuk ikut pelatihan soal, yang nantinya dapat berbagi ilmu dalam kegiatan MGMP mapel.

Penyusunan silabus, pembuatan RPP, bahan ajar, item soal, penulisan butir soal, dan penulisan *best practice*, adalah bagian dari kegiatan MGMP IPS, meski media dan prakteknya di sekolah masing-masing. Dalam pertemuan MGMP sering melibatkan narsum dari Universitas Negeri Padang (UNP), LPMP, serta pengawas disdik. Bahkan sejak tahun 2016, MGMP IPS telah berbadan hukum. Awal pembentukan, hanya 25 guru, kini sudah bertambah menjadi 121 guru. Dari awalnya mengajukan proposal ke Kemdikbud, dinilai layak dan mampu maka permintaan tersebut terealisasi dengan adanya bantuan dana (*blockgrant*) dari pusat.

Dalam pertemuan setiap satu bulan, berbagai permasalahan pembelajaran mapel IPS di sekolah, dibahas dan dicarikan solusi. Harapannya, kualitas proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Kegiatan MGMP tidak hanya pendalaman materi, namun sering juga membahas ilmu kependidikan yang nantinya dapat diterapkan guru pada proses pembelajaran di kelas. Materinya diantaranya mengenai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran IPS, pengembangan model dan teknik pembelajaran IPS. Harapannya, kegiatan ini akan meningkatkan kompetensi pedagogik guru IPS. Kegiatan difokuskan dengan 16 enam belas kegiatan selama 83 jam dalam bentuk *in-service* maupun *on-service* yang digulirkan dan melibatkan guru-guru mapel IPS pada SMP/ MTs di Kab. Limapuluh Kota.

Pertemuan MGMP bahasa Inggris lebih sering melaksanakn kegiatan penulisan soal HOTS. Meski ada kesulitan terutama guru yang baru dan belum mengerti, hal ini berdampak kepada siswa. Keluhan ini disampaikan ketua MGMP mapel, masih perlu kerja keras gurunya. Pengurus berharap agar MGMP lebih efektif, maka guru harus dilatih, dinas juga harus terlibat mau mendatangkan narsum dari luar untuk membimbing menyusun soal secara professional, memberdayakan guru dengan mengadakan pelatihan kegiatan sejenis berupa strategi model pembelajaran. Banyak guru yang semangat dan tertarik soal tentang HOTS, misalnya setiap

tahun Disdik kerjasama bedah SKL mendatangkan narsum dari pusat melakukan penulisan soal UN, beberapa guru pernah ikut pelatihan pembuatan UN oleh Puspendik meski lewat daring/video tutorial yaitu bagaimana membuat soal HOTS.

Seperti tidak kalah dari MGMP mapel lainnya, MGMP Seni Budaya aktif mendatangkan narsum dari luar dan dari internal rekan guru yang pengalaman dan sudah ikut pelatihan. Pada mapel seni budaya punya 4 cabang seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Manfaat dalam MGMP adalah mampu bekerja secara kelompok, diskusi, setiap kesulitan di lapangan, untuk dibahas bersama.

Meski terkesan “bapak-nya” ada 2, kepegawaian guru Pendidikan Agama Islam (PAI) ke dinas pendidikan, namun pembelajaran lebih ke Kementerian Agama (Kemenag). Diakui oleh pengurus MGMP mapel PAI, pembinaan MGMP PAI lebih banyak dari Kemenag, demikian juga pelatihan dan sertifikasi. Sedangkan kepegawaian ada di pemda melalui dinas. Kegiatan MGMP meliputi pembahasan terkait USBN, mulai kisi-kisi soal dari Pendis Kemenag. Untuk penyusunan soal, beberapa guru anggota MGMP PAI sering mengikuti pelatihan di provinsi terutama dalam menyusun soal. Untuk USBN, PAI lebih dulu menyusun USBN kisi-kisi dari Kemenag.

Keanggotaan dan Pendanaan

Semua pengurus MGMP mapel sepakat bahwa setiap ada pertemuan, ada saja anggota yang tidak hadir dengan berbagai alasan. Namun tidak menyurutkan anggota lain untuk melakukan kegiatan. Menurut para ketua, biasanya mereka berhalangan hadir kendala ijin dari kepala sekolah, terutama sekolah swata. Alasan lain disampaikan pengurus MGMP bahasa Inggris, ketidakhadiran karena banyak guru yang honorer ikut anggota UKG, sementara guru juga harus mengajar di SD.

Melihat jumlah kehadiran anggota MGMP SMP masing-masing mapel dalam setiap pertemuan, rata-rata setiap kali pertemuan sebagian besar guru yang hadir mencapai 100 orang, seperti MGMP Matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta MGMP mapel IPS. Bahkan, seperti yang diakui oleh pengurus MGMP IPA, karena keinginan yang kuat ingin menambah wawasan ada guru dari daerah lain dengan jarak yang jauh semangat ikut MGMP IPA meski bukan guru setempat.

Kehadiran narsum ternyata membawa dampak positif dan daya tarik minat anggota untuk aktif dalam pertemuan MGMP. Guru tidak peduli jika harus *urunan* untuk menyiapkan honor atau sewa tempat pertemuan. Menurut semua pengurus MGMP, guru akan semangat dalam pertemuan jika MGMP mampu mendatangkan para narsum dari dinas, LPMP, PT atau narsum internal yang pernah ikut pelatihan sebagai ‘*oleh-oleh*’ untuk *sharing* ilmu.

Dana tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu kebutuhan terhadap keberlangsungan kegiatan. Diakui, biasanya alokasi dana habis digunakan untuk sewa tempat, honor narsum, konsumsi/snack dan sedikit ATK. Akan tetapi, semua ketua/pengurus MGMP sepakat bahwa kegiatan MGMP adalah lebih kepada kegiatan sosial dari guru, oleh guru dan untuk guru.

Dari diskusi dan keterisian kuesioner, MGMP memiliki pola pembiayaan kegiatan yang jelas. Mereka menyadari bahwa kegiatan lebih mengutamakan azas kekeluargaan. MGMP tidak selalu menanti bantuan baik dari pusat maupun dinas. Ada ataupun tanpa bantuan, banyak atau sedikit, kegiatan MGMP mapel SMP tetap berjalan, seperti yang dilakukan oleh MGMP mapel Prakarya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh para pengurus anggota MGMP dalam pendanaan adalah melakukan iuran setiap pertemuan. Ada juga iuran bulanan untuk uang kas MGMP yang besarnya iuran bervariasi, sebisa mungkin disisihkan untuk uang kas. Rata-rata MGMP mapel SMP mengumpulkan iuran sebesar Rp. 10.000,-/pertemuan.

Ada MGMP mapel yang pernah mendapatkan bantuan pemerintah, baik dari pusat, dan dinas yang besarnya bervariasi. Seperti MGMP mapel bahasa Indonesia, saat ini telah mendapat bantuan dari pusat dan daerah sekitar Rp.150.000/pertemuan, alokasinya digunakan untuk sewa tempat sebesar Rp.75.000,- untuk ruang kecil dengan durasi waktu kurang lebih 5 jam dari pukul 08.00 – 13 .00 wib atau lebih.

Dalam FGD pun disinggung terkait bantuan. Timbul pertanyaan, jika wadah MGMP selalu mengharapkan dana bantuan apakah jaminan pengelolaan menjadi baik? Jika mau jujur, selama ini para guru juga telah mendapat beberapa tunjangan misalnya tunjangan profesi yang dananya dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru. Atau apakah memungkinkan Pemda atau organisasi profesi menghimbau

dana dari sertifikasi tersebut disishkan tidak hanya Rp.10.000,-/pertemuan bahkan lebih untuk MGMP, bukankah rata-rata sebulan dana profesi guru bisa mencapai tiga juta rupiah? Dari hasil diskusi kembali ditekankan dan menghimbau teman-teman para guru untuk juga memiliki tanggungjawab moral. Intinya, apa yang harus dilakukan agar MGMP bermanfaat bagi anggotanya, yang *ending*-nya untuk siswa.

Yang perlu digarisbawahi pergerakan atau atau kemajuan MGMP sangat bergantung kepada komitmen berorganisasi anggota. Komitmen itu sendiri amat ditentukan pula oleh kondusifitas pengelolaan, aktivitas, dan penilaian anggota terhadap kemanfaatan yang diperoleh. Anggota akan ikhlas mengeluarkan dana tertentu, apabila organisasi MGMP dirasakan manfaat dalam membentuk kompetensi dan profesionalismenya. Bagaimanapun mutu pendidikan peserta didik bukan hanya tanggungjawab pusat atau provinsi, melainkan kabupaten/kota melalui dinas pendidikan. Kunci sukses hasil pendidikan peserta didik di sekolah adalah guru.

Pola pembiayaan MGMP mapel SMP di Kab. Limapuluh Kota sangat jelas, sebagian besar dana yang berhasil dihimpun dimanfaatkan untuk komponen biaya berikut (i) honor nara sumber baik internal dari LPMP, PT, dan dinas maupun eksternal guru sendiri , (ii) transport nara sumber, (iii) insentif fasilitator internal, (iv) pengadaan sarana/media, (v) perawatan sarana/media, (vi) pengadaan bahan pembelajaran, (vii) sewa tempat pertemuan, dan (viii) konsumsi pertemuan.

Dalam menyusun perencanaan tahunan, MGMP dapat melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah sehingga mereka melihat pentingnya pelaksanaan kegiatan MGMP dan mau membantu pendanaannya dengan menyisihkan sebagian dana BOS atau iuran dari komite untuk mendukung kegiatan MGMP (Silisabon, 2019). Hal ini dibuktikan oleh beberapa pengurus MGMP setempat, banyak sekolah sangat mendukung guru mengikuti kegiatan MGMP, bahkan sekolah menyokong dengan memberikan transport alokasi dari dana BOS kepada guru yang terlibat dalam pertemuan MGMP. Meski tidak semua anggota mendapatkan kemudahan untuk mengikuti kegiatan MGMP, kendala lebih dialami rekan guru sekolah swasta, karena terkait meninggalkan jam pelajaran.

Dukungan kepala sekolah sangat membantu

pengembangan kemampuan guru untuk terlibat MGMP, penelitian Nurlaeli (2018) menyebutkan pelibatan guru dalam MGMP membuat guru tidak merasa kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran secara maksimal, salah satunya peran Kepala Sekolah selalu memfasilitasi dan memotivasi semua guru dalam mengikuti kegiatan MGMP baik ditingkat intern sekolah, wilayah, maupun tingkat kabupaten.

Kendala

Berbagai tantangan dan harapan demi kemajuan MGMP mapel tentu ada di tangan para guru. Harapan pengurus dan anggota MGMP mapel SMP agar organisasi profesi tetap eksis. MGMP Prakarya berharap ada motivasi dan ketegasan dari Disdik setempat agar mengizinkan semua guru mapel Prakarya mengikuti MGMP. Selama ini guru bukan basic Prakarya, misal dari basic IPA atau lainnya tidak diijinkan oleh kepala sekolah mengikuti MGMP Prakarya, alasannya sudah ikut MGMP mapel IPA

MGMP PJOK dan bahasa Inggris, memiliki harapan serupa bahwa selama ini pertemuan MGMP bersamaan dengan jam mengajar, perlu keluwesan durasi pertemuan artinya diperbolehkan lebih dari 3 jam, dan kepala sekolah memahami. Selain itu, dinas juga lebih membuka kesempatan guru ikut pelatihan tentang HOTS, karena banyak teman guru belum memahami bagaimana penyusunan soal HOTS.

MGMP Bahasa Indonesia menaruh harapan dan bagi MGMP mapel lainnya bahwa untuk meningkatkan kualitas guru hendaknya mendatangkan narsum yang kompetensinya sempurna/sangat baik agar dapat menyampaikan ke guru-guru lainnya.

MGMP IPA mengharapkan untuk mengeksplor kemampuan guru-guru IPA, dinas dapat membantu untuk pembuatan jurnal sebagai wadah penulisan ilmiah guru IPA, perlu mengadakan *workshop* terkait materi HOTS dengan narsum pusat. Dipastikan, hampir semua sekolah ikut, seperti kegiatan PKB. Pembentukan klaster tidak membuat MGMP efektif, dalam imbasnya akan terasa jika pertemuan tanpa fasilitator jadi tidak semangat.

Agar MGMP selaras dengan perkembangan jaman, MGMP IPS berharap ke depannya anggota MGMP harus lebih aktif lagi, ada regenerasi pengurus

yang baru dan muda yang dapat membawa ke arah yang lebih inovasi. MGMP juga sebaiknya dijadikan kegiatan terpusat di kabupaten atau dinas hal ini dikarenakan lokasi/jarak.

Bagi MGMP Matematika, jarak atau lokasi sekolah yang berjauhan satu dengan dengan tempat kegiatan awalnya menjadi kendala, mempengaruhi turun naiknya keaktifan guru yang hadir. Pernah melakukan solusi membagi 3 titik pertemuan atau 3 klaster, namun kurang efektif. Disepakati menyewa tempat yang posisinya di tengah-tengah, agar tidak memberatkan guru dari daerah satu dengan guru daerah lainnya.

MGMP bahasa Inggris, sebelumnya ada *imej* kegiatan MGMP selalu identik bila ada dana, baru ada program seperti program *blockgrand* PPK tuntas sampai selesai karena ada bantuan dana. Sebaliknya jika tidak ada akan '*mandek*'. Pengurus mencoba merangkul guru-guru dengan memberikan program dan kegiatan yang jelas, MGMP ingin membuat program dan capaian yang ingin dicapai apa? Kesulitan lain adalah bagi guru yang masih baru yang masih belum mengerti, bagaimana dampak MGMP ke siswa.

Dari segi kuantitas, MGMP IPS, seringkali berkumpul, namun dahulu anggota inginnya pulang buru-buru. Idealnya dimulainya lambat maka lambat pula pulangannya. Bukan karena malas melainkan ada batas waktu dan tanggungjawab yang diberikan sekolah masing-masing. Solusinya, mengirim surat melalui MKKS meminta dukungan kepala sekolah, agar memaklumi dan mendorong kegiatan MGMP dari sisi waktu, dan kendala itu teratasi. Berbagai permasalahan pembelajaran khususnya mata pelajaran IPS di sekolah dicarikan solusinya, harapannya kualitas proses pembelajaran dapat ditingkatkan.

Dana sempat menjadi kendala utama bagi MGMP PPKN, namun para anggota berinisiatif *merogoh* dari kocek dana pribadi atau mandiri iuran bulanan serta iuran semester Rp. 50.000,-. Guru menyadari dana itu digunakan untuk kepentingan bersama bukan untuk pengurus, misalnya konsumsi, sewa tempat, dan narsum, serta murni lebih kepada kegiatan sosial, kenduri, dengan kata lain dari kita untuk kita.

MGMP Prakarya lebih kepada kendala adanya berbeda aspek pembelajarannya tiap sekolah, yaitu mapel TIK dengan mapel Prakarya. Keterampilan dianggap mapel yang sama padahal tidak bisa dalam 1 tingkat diajar sama. Masalah

lainnya adalah pengurus MGMP bingung dengan basic dari guru mapel prakarya.

MGMP IPA, nyaris serupa dengan MGMP Matematika, banyaknya jumlah anggota yang ikut MGMP, dibentuk 3 klaster dengan harapan proses kegiatan akan lebih efektif, dimana setiap kelompok ada 30 orang guru. Namun sebaliknya, timbul kendala tidak ada fasilitator membuat anggota tidak semangat.

MGMP Seni budaya, kendalanya lebih ke teknis yaitu materi penyusunan soal HOTS yang masih kurang. Solusinya pengurus, mendatangkan narsum dari luar, atau dari internal teman-teman yang pengalaman. Kegiatan dilakukan dengan bekerja secara kelompok, diskusi, jika ada kesulitan di lapangan, dibahas bersama. Pada MGMP bahasa Indonesia; kendalanya hanya perlu regenerasi kepeguruan.

MGMP harus dimaknai sebagai sebuah proses yang terus hidup, tumbuh, dan berkembang sepanjang waktu. Melalui pemberdayaan secara terus-menerus dan berkelanjutan, MGMP diharapkan dapat berperan sebagai mediator dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi guru, agen "penyemangat" dalam inovasi manajemen kelas dan sekolah, serta kolaborator terhadap unit terkait dan organisasi profesi.

Keberhasilan MGMP dalam memberdayakan diri sangat dipengaruhi oleh etos kerja pengurus, anggota, dan guru mata pelajaran dalam membangun semangat kebersamaan dan persaudaraan. MGMP mapel SMP di Kab. Limapuluh kota menyadari, meski dana menjadi problem serius untuk menjalankan programnya, namun dengan keterbukaan dan koordinasi bersama anggota, hal tersebut dapat diatasi melalui terobosan penggalan sumber dana dan mengajak teman-teman sejawat melakukan iuran yang peruntukannya dari guru, oleh guru dan untuk guru. MGMP mapel menyadari jika hanya mengandalkan dana *block-grant* apakah ke depannya MGMP masih punya "gigi" untuk berkiprah jika suatu saat tidak ada *blockgrand*?

MGMP mapel harus berupaya melakukan penajaman program yang riil dan praktis agar MGMP benar-benar mampu membantu guru dalam menguasai kompetensi sesuai standar pendidik, misalnya kehadiran narsum dan menawarkan program untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam

merencanakan, melaksanakan, dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan guru yang profesional, maka dengan sendirinya guru akan tertarik aktif dalam MGMP.

SIMPULAN DAN USULAN REKOMENDASI

Simpulan

Upaya yang dilakukan oleh pengurus MGMP mapel SMP di Kabupaten Limapuluh kota dapat dijadikan rekomendasi bagi penyelenggaraan MGMP serupa di daerah lain. Di tengah kendala dan keterbatasan senantiasa menjunjung azas kekeluargaan yang dalam kegiatannya selalu melakukan koordinasi. Segala permasalahan diputuskan bersama-sama dalam setiap pertemuan, kendala dana, materi serta keberadaan narsum. MGMP juga selalu melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan dalam berbagai kegiatan. Guru sangat menyadari akan keberadaan MGMP sebagai forum diskusi untuk memecahkan permasalahan pembelajaran sesama rekan seprofesi. Guru juga mengaku merasakan manfaat MGMP sebagai saling tukar pengalaman dan umpan balik, dalam meningkatkan dan melaksanakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kinerja guru untuk proses pembelajaran yang lebih profesional.

Gambaran profil MGMP SMP adalah sebagian besar MGMP melakukan pertemuan 12 kali dalam satu tahun. Sebagian besar guru terlibat di masing-masing MGMP mapel, hal ini terlihat dari persentase keaktifan guru yang terlibat dalam setiap pertemuan MGMP rata-rata diatas 70 persen, yang tertinggi adalah keaktifan guru pada MGMP mapel IPS mencapai 82,6 persen. Kendala MGMP di manapun klasik seperti dana, jarak, waktu, keaktifan anggota, kemampuan pengurus, dan narsum. Oleh MGMP, sedapat mungkin tanpa bantuan MGMP harus tetap berjalan yang disiasi dengan mengumpulkan iuran yang jumlahnya bervariasi. Bahkan ada sekolah yang memberi *support* gurunya aktif dalam MGMP dengan memberikan dana transport bersumber BOS. Kendal jarak, lokasi yang berjauhan dan jumlah guru yang terlibat banyak, dengan membuat klaster tiap wilayah ternyata kurang efektif akhirnya diambil kesepakatan pertemuan di tengah-tengah.

Keaktifan anggota juga sangat dipengaruhi oleh adanya narsum yang baik. Kehadiran narsum selain menjadi daya tarik guru untuk hadir juga

dapat *sharing* terkait pembelajaran. Hampir semua MGMP mapel SMP mendatangkan narsum dalam setiap pertemuannya. Selain dari guru internal yang telah mengikuti pelatihan, juga dari PT, dinas kab./ provinsi, dan LPMP yang dapat memberikan pengembangan, materi dari penyusunan soal, PPK guru, peningkatan karir guru.

Usulan Rekomendasi

Agar MGMP tetap eksis, MGMP perlu lebih aktif berkordinasi dengan sesama pengurus MPMG mapel lain, dengan Dinas Pendidikan melakukan pelaporan, koordinasi, pembinaan dengan pengawas, sekolah dalam hal ini MGMP dapat melibatkan PT dalam melibatkan mahasiswa tingkat akhir untuk mengajar di kelas menggantikan guru yang mengikuti kegiatan MGMP sebagai salah satu Tri dharma PT, dengan komite sekolah memberikan laporan efektifitas pertemuan guru dalam kegiatan MGMP yang muaranya untuk siswa dalam meningkatkan pembelajaran.

Dinas harus lebih aktif melakukan pembenahan dan pembinaan MGMP agar tidak berjalan sendiri. Tanpa pelibatan dinas, jangan harap MGMP dapat menjalankan perannya. Dinas juga dapat menganggarkan atau memberikan pelatihan terkait metode pembelajaran, mengadakan nara sumber bagi kegiatan MGMP, serta pemberdayaan pengawas yang selama ini terkesan sekedar "stempel" hanya absen setelah itu pulang.

Praktik baik MGMP mapel di Kab. Limapuluh kota dapat dicontoh di wilayah lain agar MGMP benar-benar dapat dijadikan sarana menambah wawasan guru dalam proses pembelajaran, berbagi pengalaman dan ilmu baik terhadap proses pembelajaran maupun informasi tentang kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam peningkatan mutu pendidikan.

PUSTAKA ACUAN

- Agung, Iskandar. 2017. Guru yang kompeten dan profesional: Orasi ilmiah profesor riset. Jakarta: Balitbang – Kemendikbud
- Anwar, Rosihan. 2011. Pengaruh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terhadap

- Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Mengajar Guru SMA Negeri Kota Tasikmalaya. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. Universitas Pendidikan Indonesia: Volume 13 Nomor 1, 2011.
- Budiana, H.R., Sjaifirah, N.A. dan Bakti, I. 2015. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pembelajaran Bagi Para Guru Smpn 2 Kawali Desa Citeureup Kabupaten Ciamis. *Dharmakarya Unpad: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* Vol. 4, No. 1, Mei 2015.
- Budiman, Haris. 2017. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pendidikan. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, Mei 2017.
- Daryanto dan Tasrial. 2011. *Konsep Pembelajaran Kreatif*. Yogyakarta: Gavamedia
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Direktorat Profesi Pendidik, Depdiknas RI 2008.
- Husaini, M. 2014. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM BIDANG PENDIDIKAN (E-education). *Jurnal Mikrotik* Volume 2 No.1 Mei 2014
- Islahuddin. 2018. Peningkatan Kinerja Guru Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia di SMPN 1 Labuhan Haji Tahun 2016/2017. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* : Volume 1, Nomor 2, November 2018.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013. Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemedikbud, 2014.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Panduan Pelatihan Instruktur Nasional Kurikulum Sekolah Dasar Tahun 2016. Jakarta: Dit Pendidikan Sekolah Dasar, Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Sistem Informasi APK dan APM. PDSPK Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kabupaten Limapuluh Kota. Kemendikbud, Desember 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Capaian Hasil Ujian Nasional tingkat SMP Kab. Limapuluh Kota. Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Akreditasi SMP Kab.Limapuluh Kota. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Data Pokok Pendidikan Kab. Limapuluh Kota. Direktorat Jenderal PAUD, dan Dikdamen, Kemendikbud.
- Kepala Dinas Pendidikan Kab.50 Kota. 2018. Wawancara dan Diskusi Optimalisasi Peran MGMP dalam Meningkatkan Kualitas Mengajar. Tanggal 13 September 2018; SMPN 3 Kab. Limapuluh Kota.
- Lie, Anita. 2020. Di Era Merdeka Belajar, 6 Hal Ini Perkuat Kelompok Kerja dan Musyawarah Guru. *Kompas.com*, Tanggal 20-02-2020.
- Moleong, Lexy, J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurlaeli, Yuli. Saryono, Oyon. 2018. Efektivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Dalam Meningkatkan Kinerja Mengajar Guru Bahasa Inggris. *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*. December, 2018: Volume 2 Number 2.
- Nurdianti. 2013. Pengaruh Manajemen MGMP Terhadap Kompetensi Profesional dan Kompetensi Pedagogik Guru serta Implikasinya kinerjanya pada Guru Mapel Ekonomi di SMA Negeri Se-Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Paraba, Hadirja. 2000. *Wawasan Tugas Tenaga Guru dan Pembina PAI*. Jakarta: Friska Agung Insani. h. 9.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN No.03/V/PB/2010 Tahun 2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

- Republika.co.id. 2018. Ini Faktor MGMP tidak Berjalan Efektif. [https://republika.co.id/berita/ pendidikan/education](https://republika.co.id/berita/pendidikan/education). Diakses tanggal 7 Nov 2019.
- Republik Indonesia. 2005. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Sagala, Syaiful. 2009. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan: Pemberdayaan guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat dalam manajemen sekolah. Bandung: Alfabeta
- Sanjaya, Wina. 2008. Perencanaan dan desain sistem pembelajaran. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setiawan, Wawan. 2017. Era Digital dan Tantangannya. Universitas Pendidikan Indonesia:
- Seminar Nasional Pendidikan 2017
- Silisabon, Simon. 2019. Evaluasi Peran MGMP di Daerah Terpencil Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Melalui Penyusunan Soal USBN (Studi Kasus Di Kabupaten Flores Timur (Flotim) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)). Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 12, Nomor 1, Agustus 2019.
- Sudibyo, Lies. 2011 Peranan dan Dampak Teknologi Informasi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia. Sukoharjo: 2011.
- Sumardi, R. 2009. Problem Profesionalisme Guru dan Mutu Pendidikan. Diambil dari web <http://robertsumardi.wordpress.com/2012/02/25/problema-profesionalisme-guru-dan-mutupendidikan-2>, Diakses tanggal 7 Januari 2019.
- Sutjipto. 2016. Pentingnya Pelatihan Kurikulum 2013 Bagi Guru. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemeendikbud, Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2016
- Uslimah, Ani. 2006. Evaluasi Program MGMP Biologi SMA. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Nomor 1, Tahun VIII. 2006.
- Wahyusungsih, Sri. 2020. Dari Diskusi Persiapan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) Menuju Sekolah Berkualitas. <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/persiapkan-asesmen-kompetensi-minimum-akm-menuju-sekolah-berkualitas>. Tanggal 10 Oktober 2020
- Werkanis AS & Hamadi, Marlius. 2005. Strategi Mengajar dalam Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Riau: Sutra Benta Perkasa : 2005, hlm. 39.
- Winingsih, L. H., Agung, I., & Sulistiono, A.A. 2019. The Influence of Government Policy, Principle Leadership, and Participation of Parents on Strengthening Teacher Organizations (KKG/MGMP) and Development of Problem Solving in Students: Indonesia Case, *International Journal Education and Practice*, v7n4, p479-493.
- Wuryanto, Agus. 2011. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan KKG dan MGMP. <https://aguswuryanto.wordpress.com/2011/01/01/prosedur-operasional-standar-penyelenggaraan-kkg-dan-mgmp>. Diakses 6 Maret 2020.

ABSTRACT

The measurement is an important subject that must be mastered by vocational students in the field of computer and network engineering. Teachers as learning facilitators need to map students' mastery in terms of theory and practice as an evaluation material for providing feedback in the form of enrichment and remedial. One of the media that can quickly and accurately map student mastery is ZipGrade. The purpose of this study was to determine students' acquisition of the topic of measurement using ZipGrade. The quantitative descriptive was used in this research. The research subjects were students of computer and network engineering at SMK Al Munawwariyyah in the academic year 2020/2021 by 85 students. The results showed that the average mastery was 47,5%. Some of the concepts that most students find difficult are reading the measured value of the AVO meter, the rule to use AVOMeter, and using the significant figures rules in multiplication and division operations, and predicting the appropriate resistor according to a given value.

Key words: measurement, ZipGrade, material mastery

ABSTRAK

Topik pengukuran merupakan topik penting yang harus dikuasai siswa SMK bidang teknik komputer dan jaringan. Guru sebagai fasilitator pembelajaran perlu memetakan penguasaan siswa dalam hal teori maupun praktik sebagai bahan evaluasi pemberian umpan balik baik berupa pengayaan maupun remedial. Salah satu media yang secara cepat dan tepat dalam memetakan penguasaan siswa adalah zipgrade. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap topik pengukuran menggunakan zipgrade. Penelitian ini menggunakan analisis deskripsi kuantitatif. Subjek penelitian adalah siswa teknik komputer dan jaringan di SMK Al Munawwariyyah tahun pelajaran 2020/2021 dengan jumlah 85 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penguasaan 47.5 %. Beberapa konsep yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa adalah pembacaan nilai hasil pengukuran dan aturan penggunaan Ampere meter, Voltmeter, dan Ohmmeter (AVO meter), dan penggunaan aturan angka penting dalam operasi perkalian dan pembagian, serta memprediksi resistor yang sesuai dengan nilai yang diberikan.

Kata kunci: pengukuran, zipgrade, penguasaan materi

PENDAHULUAN

Pendidikan menengah kejuruan (PMK) merupakan pendidikan khusus yang berfokus pada pengembangan keterampilan siswa sebagai bekal bekerja. Keterampilan siswa menjadi titik tekan dalam jenjang ini dikarenakan target lulusan program ini adalah dapat bekerja di bidang-bidang yang sesuai dengan kompetensi keahliannya (Baiti & Munadi, 2014). Sebagai wujud nyata untuk mewujudkan tercapainya tujuan PMK, stuktur kurikulum PMK pada setiap kompetensi keahlian telah disesuaikan. Mata pelajaran bidang (C1), program (C2), dan kompetensi (C3) keahlian mendapatkan proporsi yang sesuai. Perlu diketahui bersama bahwa ketiga bagian tersebut saling berkaitan antar satu sama lain untuk mencapai pengembangan kompetensi keahlian siswa. Hal ini berarti bahwa sebagai dasar siswa mencapai kompetensi keahlian yang optimal, perlu penguasaan bidang keahlian yang baik.

Kompetensi keahlian keteknikan pada umumnya diharuskan memiliki pemahaman bidang keahlian fisika dan kimia. Ini artinya PMK yang memiliki tujuan utama melatih keterampilan, tetap memperhatikan teori pendukung pencapaian kompetensi keterampilan yang mumpuni. Tentunya materi yang dibelajarkan di mata pelajaran bidang keahlian fisika dan kimia harus juga menyesuaikan dengan kebutuhan dan sinkronisasi materi dengan kompetensi keahlian. Hal ini penting mengingat PMK tidak mentargetkan materi bidang keahlian sebagai suatu teori secara utuh, tetapi memilih dan memilah materi yang diperlukan di kompetensi keahlian. Ini terbukti dari jumlah jam pelajaran untuk teknik dengan kelompok teknologi rekayasa dengan teknologi informasi yang berbeda. Selain itu, PMK secara khusus juga diwajibkan adanya sinkronisasi kurikulum dengan dunia usaha atau dunia industri dan kebutuhan masyarakat terkait SDM (Yoto et al., 2013).

Fisika merupakan mata pelajaran bidang keahlian keteknikan yang memiliki peran penting dalam membentuk pondasi yang kuat secara konsep maupun keterampilan penggunaan alat. Salah satu materi di fisika yang penting untuk melatih kemampuan dasar di bidang keteknikan adalah besaran, satuan, dan pengukuran. Pentingnya materi ini tidak terlepas dari peran serta berbagai alat ukur yang dipergunakan dalam berbagai pekerjaan di bidang teknik. Secara lebih umum, konstribusi fisika dalam bidang pengembangan

teknologi dan informasi merupakan sesuatu yang tak tergantikan (Karisma, 2016). Khusus di dalam teknik komunikasi dan informatika, materi besaran dan pengukuran sangat erat kaitannya dengan berbagai alat utama maupun pendukung di teknologi informatika. Diantaranya, pengukuran tegangan dan kuat arus listrik menggunakan AVO meter, penghitungan frekuensi dan kecepatan jaringan, hingga *troubleshooting* komputer. Langkah dasar ini menjadi penting dikuasai siswa sebagai bekal mencapai kompetensi keahlian yang lebih tinggi.

Sebagai materi dasar, fisika sering kali dibelajarkan melalui berbagai pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang beragam dengan satu tujuan untuk mengantarkan penguasaan yang lebih baik. Sering kali, pendekatan berbasis *direct instruction* menjadi pilihan utama untuk mencapai penguasaan keterampilan teori dan praktek penggunaan alat ukur. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik pembelajaran *direct instruction* yang mengedepankan pemberian paduan secara terstruktur dan bertahap untuk mencapai kompetensi yang diinginkan (Muttaqin dkk., 2018) dan tentunya sangat cocok dengan tujuan pembelajaran penggunaan alat ukur. Beberapa lain mengkolaborasikan antara pemberian contoh dengan *discovery learning* (Mustofa, 2019) untuk sub materi yang lebih menekankan penguasaan konsep tertentu seperti konsep larutan dan konsentrasinya.

Setelah program pembelajaran berlangsung, tentu guru perlu mengevaluasi keberhasilan pencapaian pembelajaran. Evaluasi akhir bab penting untuk memetakan penguasaan siswa setelah diberikan perlakuan berupa pembelajaran. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan untuk memutuskan pemberian umpan balik (*feedback*) kepada siswa. Dimana *feedback* dapat berupa remedial atau pengayaan. Pemberian *feedback* kepada siswa harus dilakukan sesegera mungkin. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pemberian umpan balik harus cepat dan tepat kepada siswa. Perlunya kecepatan dan keakuratan dalam evaluasi tentu membutuhkan bantuan teknologi (Mustofa, 2020). Bagaimanapun guru tidak mungkin melakukan pengkoreksian secepat kilat dan akurat. Ada banyak teknologi yang dapat digunakan untuk melakukan pengkoreksian dan pemetaan evaluasi secara cepat. Diantaranya quizzz, kahoot, Zipgrade, dan Plickers. Namun, bukan berarti masing-masing dapat digunakan secara serta merta karena setiap aplikasi memiliki

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Quizizz dan kahoot lebih cocok diterapkan pada lingkungan sekolah yang serba online. Plickers lebih cocok untuk penilaian formatif dengan sistem semi online. Sedangkan Zipgrade sangat cocok untuk penilaian akhir bab dengan sistem offline.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil intisari bahwa permasalahan utama pembelajaran yang diangkat dan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kemampuan pemetaan penguasaan materi siswa secara efektif dan efisien. Pencapaian ini perlu dukungan suatu sistem berbasis digital agar keakuratan terjamin. ZipGrade menjadi pilihan dari sekian banyak aplikasi yang dapat digunakan oleh guru dalam pemetaan penguasaan siswa. Hal ini mengingat bahwa sekolah tempat penelitian adalah sekolah berbasis pondok pesantren dengan akses internet atau online terbatas. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penguasaan siswa terhadap materi besaran, satuan, dan pengukuran yang dipetakan menggunakan aplikasi Zipgrade?. Dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penguasaan siswa terhadap materi besaran, satuan, dan pengukuran yang dipetakan menggunakan aplikasi Zipgrade.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian jenis ini umumnya berguna untuk pemetaan distribusi data seperti penguasaan siswa terkait topik besaran, satuan, dan pengukuran yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian dilakukan pada tahun pelajaran 2020/2021 semester gasal. Subjek penelitian adalah siswa Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), SMK Al Munawwariyyah, Malang yang berjumlah 85 siswa.

Instrumen penelitian berupa tes berbentuk pilihan ganda yang dikembangkan sendiri oleh guru. Instrumen soal yang dikembangkan mencakup indikator butir soal yang telah dijabarkan dari KI dan KD yang sesuai dengan kurikulum 2013. Penjabaran lebih lanjut terkait butir soal instrumen yaitu daya beda, tingkat kesukaran dan korelasi tersaji pada Tabel 1. Instrumen tes yang dibuat berjumlah 20 butir soal, setelah dilakukan validasi empirik terhadap 85 responden yang berasal dari sekolah yang sama dan telah mempelajari materi besaran, satuan, dan pengukuran diperoleh 15

soal valid dan 5 soal tidak valid. Butir soal yang tidak valid yaitu butir soal nomor 1, 5, 8, 9, dan 13. Setelah dilakukan validitas, maka dilakukan uji reliabilitas instrumen butir soal. Hasil perhitungan reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* diperoleh nilai sebesar 0,610 yaitu masuk kategori reliabel. Ini artinya instrumen tes yang telah disiapkan memiliki keajegan untuk menguji penguasaan siswa terkait besaran, satuan, dan pengukuran (Ding & Beichner, 2009; Mustofa et al., 2019).

Instrumen penelitian berupa tes berbentuk pilihan ganda yang dikembangkan sendiri oleh guru. Instrumen soal yang dikembangkan mencakup indikator butir soal yang telah dijabarkan dari KI dan KD yang sesuai dengan kurikulum 2013. Penjabaran lebih lanjut terkait butir soal instrumen yaitu daya beda, tingkat kesukaran dan korelasi tersaji pada Tabel 1. Instrumen tes yang dibuat berjumlah 20 butir soal, setelah dilakukan validasi empirik terhadap 85 responden yang berasal dari sekolah yang sama dan telah mempelajari materi besaran, satuan, dan pengukuran diperoleh 15 soal valid dan 5 soal tidak valid. Butir soal yang tidak valid yaitu butir soal nomor 1, 5, 8, 9, dan 13. Setelah dilakukan validitas, maka dilakukan uji reliabilitas instrumen butir soal. Hasil perhitungan reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* diperoleh nilai sebesar 0,610 yaitu masuk kategori reliabel. Ini artinya instrumen tes yang telah disiapkan memiliki keajegan untuk menguji penguasaan siswa terkait besaran, satuan, dan pengukuran (Ding & Beichner, 2009; Mustofa et al., 2019).

Analisis data dilakukan menggunakan Zipgrade secara langsung. Melalui aplikasi ini, dapat diketahui analisis statistik deskriptif dan respon siswa terhadap semua butir soal sekaligus persentase kebenaran tiap butir soal, seperti yang tersaji pada Gambar 1. Untuk memperoleh gambaran lebih jelas, pada beberapa soal yang dipilih akan dilakukan pembahasan secara hipotetik berdasarkan pengembangan butir distraktor pada setiap soal sebagaimana yang telah dilakukan oleh Mustofa (2018).

Tabel 1. Karakteristik Instrumen pengukuran penguasaan materi siswa

Butir Soal	Indikator Butir Soal	Taraf Kesukaran	Daya Beda	Korelasi
2	Mengidentifikasi besaran, satuan internasional dan simbol satuan	0,871	0,208	0,248
3	Menegaskan langkah awal penggunaan AVOMeter	0,882	0,280	0,335
4	Menerapkan cara pembacaan hasil ukur tegangan di AVOMeter	0,282	0,269	0,314
6	Menghitung hasil ukur AVOMeter dengan batas maksimal pengukuran tertentu	0,235	0,143	0,364
7	Menentukan nilai pengukuran kuat arus listrik yang terbaca pada AVOMeter	0,106	0,241	0,591
10	Menentukan nilai hambatan resistor beserta toleransinya	0,953	0,094	0,276
11	Menerapkan aturan konversi satuan dari mA menjadi satuan internasional	0,176	0,242	0,400
12	Menerapkan konversi satuan kecepatan transmisi data dari Mbps ke kbps dalam bidang informatika	0,800	0,176	0,281
14	Menganalisis besar panjang gelombang wifi yang terpancar menggunakan aturan angka penting	0,235	0,250	0,316
15	Menilai hasil penurunan kecepatan <i>bandwidth</i> internet menggunakan aturan penjumlahan	0,176	0,162	0,267
16	Mempertimbangkan nilai batas maksimum di AVOMeter yang akan digunakan untuk mengukur tegangan listrik 220 V	0,118	0,158	0,468
17	Memutuskan syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan pengukuran kuat arus listrik menggunakan amperemeter	0,859	0,103	0,226
18	Memutuskan syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan pengukuran tegangan listrik menggunakan voltmeter	0,576	0,500	0,643
19	Memutuskan syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan pengukuran hambatan menggunakan ohmmeter	0,494	0,390	0,564
20	Menyusun rangkaian warna resistor yang ditentukan nilai dan toleransi hambatannya.	0,365	0,333	0,548

#	Answer	# Correct	% Correct	Discrim. Factor	Alt. Answers
2	B	74.0	87.1 %	0.294	D:9% A:1% E:1% C:1%
3	A	75.0	88.2 %	0.419	D:8% C:1% B:1% E:1%
4	C	24.0	28.2 %	0.311	B:34% E:26% D:12%
6	C	20.0	23.5 %	0.279	A:61% B:12% D:4%
7	B	9.0	10.6 %	0.546	D:38% C:38% A:9% E:5%
10	B	81.0	95.3 %	0.292	D:2% C:1% A:1%
11	C	15.0	17.6 %	0.352	D:38% A:25% B:12% E:7% _:1%
12	C	68.0	80.0 %	0.332	B:9% A:9% E:1%
14	C	20.0	23.5 %	0.302	D:35% B:24% A:14% _:2% E:1%
15	B	15.0	17.6 %	0.249	A:59% C:16% D:5% E:2%
16	D	10.0	11.8 %	0.435	C:45% A:34% B:7% E:2%
17	C	73.0	85.9 %	0.251	B:7% D:5% A:2%
18	A	49.0	57.6 %	0.599	C:34% B:4% D:4% E:1%
19	D	42.0	49.4 %	0.558	E:38% B:6% C:5% A:2%
20	C	31.0	36.5 %	0.469	B:58% E:4% A:2%

Gambar 1. Hasil analisis item soal dari aplikasi ZipGrade

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguasaan Siswa Terkait Materi Besaran, Satuan, dan Pengukuran

Penguasaan siswa terkait materi besaran, satuan, dan pengukuran secara ringkas dapat diperoleh dari Zipgrade yang tersaji pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 nampak bahwa rata-rata penguasaan materi siswa masih rendah dengan rata-rata sebesar 47,5. Nilai maksimum yang diperoleh sebesar 93 yaitu benar 14 dari 15 soal. Nilai minimum sebesar 20 yaitu benar 3 dari 15 soal. Berdasarkan nilai median dan mean yang hampir sama menunjukkan bahwa sebaran nilai siswa terdistribusi normal. Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian Mukhlis (2017) yang menyatakan bahwa materi besaran satuan yang termasuk di dalamnya mencakup konversi satuan dan aturan angka penting mampu dikuasai oleh mahasiswa penelitian menggunakan pembelajaran inquiri terbimbing. Hasil yang diperoleh juga berbanding terbalik dengan penelitian Nasution (2019) yang menemukan adanya korelasi positif antara kemampuan pengukuran dengan penguasaan materi besaran dan satuan di tingkat SMA. Penelitian Imama dkk., (2018) menyebut bahwa salah satu cara

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian penguasaan materi besaran, satuan, dan pengukuran yaitu dengan pembelajaran *cooperative script*. Sebagai pendukung penjelasan mengapa penguasaan materi di jenjang SMK terkait besaran, satuan, dan pengukuran masih rendah dalam penelitian ini, berikut dibahas distribusi penguasaan siswa pada masing-masing sub materi.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Aspek	Hasil
N	85
Rata-Rata	47,5
Nilai Maksimum	93
Nilai Minimum	20
Median	47,0

Distribusi Penguasaan Siswa Terkait Besaran dan Satuan

Materi besaran dan satuan pada dasarnya telah dibelajarkan kepada siswa sejak SMP. Materi ini penting untuk dikuasai siswa mengingat bahwa penggunaan simbol-simbol besaran pokok sangat relevan pemanfaatannya di kompetensi keahliannya. Butir soal untuk menguji pemahaman

siswa terkait besaran dan satuan tersaji pada Gambar 2. Untuk berhasil menjawab butir soal ini, siswa harus menguasai (1) besaran pokok beserta satuan internasional dan simbolnya; (2) besaran turunan beserta satuan internasional dan simbolnya.

2. Berikut aturan besaran, satuan standar internasional, dan penulisan satuan yang benar adalah ...

Pilihan	Besaran	Satuan Internasional	Penulisan satuan
A	Panjang	Meter	cm
B	Intensitas cahaya	Candela	Cd
C	Kelajuan	Meter per sekon	m/s
D	Tegangan listrik	Volt	V
E	Massa	Gram	g

Gambar 2. Butir soal nomor 2

Berdasarkan distribusi jawaban siswa pada Gambar 1, diperoleh bahwa 74 siswa (87,1%) menjawab benar pilihan B. Butir distraktor yang paling banyak dipilih siswa adalah pilihan D sebesar 9%. Mereka yang menjawab salah terkecoh dengan pilihan yang memungkinkan benar dari besaran, satuan, dan simbolnya, tetapi tidak memahami secara cermat terkait soal yang diminta adalah besaran pokok.

Distribusi Penguasaan Siswa Terkait Pembacaan AVOMeter

Kemampuan membaca nilai hasil pengukuran adalah kompetensi mutlak yang harus dikuasai setiap siswa. Hal ini dikarenakan kompetensi ini sangat penting di dalam pencapaian keahlian teknik komputer dan jaringan. Siswa sangat perlu memahami karakteristik dari AVOMeter analog yang sering kali berubah setelah digunakan, sehingga mereka perlu melakukan kalibrasi setiap kali akan menggunakan AVOMeter. Butir soal untuk mengakses pemahaman siswa terkait pembacaan AVOMeter adalah butir soal nomor 4, 6, dan 7. Untuk berhasil menjawab soal ini, siswa harus memperhatikan: (1) penunjuk (selektor) AVOMeter yang dipilih sebagai pengali; (2) skala penunjukkan yang dipilih; (3) jarum penunjukkan yang tegak lurus dengan skala penunjukkan yang dipilih; (4) penggunaan cara perhitungan. Salah satu butir soal yaitu nomor 6 tersaji pada Gambar 3.

6. Tentukan nilai pembacaan tegangan suatu sumber tegangan berikut!



Jika penunjuk AVOMeter diarahkan pada 50 V, maka hasil ukur tegangan tersebut adalah ... V.

- A. 10
- B. 10,5
- C. 11
- D. 11,5
- E. 12

Gambar 3. Butir soal nomor 6

Berdasarkan Gambar 1, distribusi penguasaan siswa terkait pembacaan hasil pengukuran menggunakan AVO untuk masing-masing soal yaitu soal nomor 4 (28,2%), 6 (23,5%), dan 7 (10,6%). Distribusi ini menunjukkan bahwa penguasaan siswa terkait pembacaan hasil pengukuran besaran

kelistrikan menggunakan AVOMeter cukup rendah. Inilah salah satu faktor nilai rata-rata siswa masih rendah. Berdasarkan data distribusi respon siswa terkait soal nomor 6, menunjukkan bahwa distraktor pilihan A sebesar 61%, pilihan B sebesar 12%, dan pilihan D sebesar 4%. Melalui analisis hipotetik saat mengembangkan soal, siswa yang memilih butir pilihan A menunjukkan bahwa siswa menganggap bahwa nilai yang ditunjukkan AVO adalah yang tertera di skala penunjukkan tidak harus melakukan perhitungan skala.

Distribusi Penguasaan Siswa Terkait Nilai Resistor

Resistor merupakan beban atau hambatan yang selalu dimiliki oleh semua alat kelistrikan. Hambatan sangat penting dalam kelistrikan karena tanpa adanya beban maka arus listrik akan mengalir secara langsung atau terjadinya hubungan arus pendek yang sering kali menyebabkan kebakaran. Resistor murni di pasaran berupa resistor yang memiliki gelang warna. Penguasaan siswa terkait pembacaan resistor penting untuk merancang bangun adaptor sebagai pengubah tegangan AC ke DC yang dibutuhkan untuk membangkitkan berbagai perangkat pendukung komputer. Butir soal untuk mengakses pemahaman siswa terkait resistor adalah butir soal nomor 10 dan 20. Untuk berhasil melakukan pembacaan siswa harus mampu: (1) membaca warna dengan baik; (2) menguasai cara membaca resistor dengan baik yaitu gelang pertama dan kedua menyatakan angka, gelang ketiga menyatakan pengali $\times 10^x$, gelang keempat menyatakan toleransi (3) mampu menyusun warna dengan nilai secara benar. Salah satu butir soal nomor 20 tersaji pada gambar 4.

20. Prediksilah warna gelang-gelang resistor yang bernilai $340 \pm 5\% \Omega$
- A. Jingga, merah, hitam, emas
 - B. Jingga, kuning, hitam, emas
 - C. Jingga, kuning, coklat, emas
 - D. Jingga, Hijau, hitam, emas
 - E. Jingga, kuning, hitam, perak

Gambar 4. Butir soal nomor 20

Berdasarkan analisis item soal pada Gambar 1 nampak bahwa persentase kebenaran jawaban siswa terkait soal pembacaan dan memprediksi resistor adalah 95,3% untuk butir soal nomor 10 dan 36,5% untuk butir soal nomor 20. Distribusi ini memberikan gambaran khusus mengapa nilai rata-rata penguasaan siswa rendah, karena kemampuan siswa menjawab soal nomor 20 rendah pula. Berdasarkan distribusi alternatif jawaban siswa terdapat 58% siswa menjawab B, 4% siswa menjawab E, dan 2% siswa menjawab A. Besarnya persentase siswa yang menjawab pilihan B menunjukkan bahwa terjadinya kesalahpahaman siswa dalam menyusun warna berdasarkan nilai resistor. Meskipun siswa telah mampu menyusun gelang pertama dan kedua, akan tetapi siswa kesulitan menyusun gelang ketiga dengan aturan pengali $\times 10^x$.

Penguasaan Siswa Terkait Konversi Nilai Satuan di Bidang Teknik Informatika

Menguasai pengkonversian satuan menjadi penting di bidang keteknikan. Dasar ini menjadi pijakan untuk memahami fenomena dalam bidang teknik komputer dan jaringan, seperti melihat kecepatan *bandwidth*, analisis wifi, kecepatan *download* dan *upload*, hingga kapasitas RAM dan Hardisk. Konsep dasar untuk dapat mencapai penguasaan ilmu konversi satuan, siswa harus menguasai (1) konversi satuan dasar mulai mili hingga kilo; (2) konversi satuan di atas kilo yaitu Mega, Giga, dan Tera yang sangat penting dalam bidang kapasitas dan kecepatan di komputer; (3) konversi satuan di bawah mili yaitu mikro, nano, amstrom, dan piko yang sangat penting dalam pembahasan tentang jaringan dan gelombang wifi. Butir soal untuk mengakses penguasaan konversi satuan adalah butir soal nomor 11 dan 12. Salah satu butir soal adalah butir soal nomor 11 yang tersaji pada Gambar 5.

11. Suatu hasil pengukuran kuat arus listrik diperoleh nilai 25 mA. Berapakah nilai pengukuran tersebut jika diubah dalam satuan internasional?
- A. 2,5 A
 - B. $2,5 \times 10^{-1}$ A
 - C. $2,5 \times 10^{-2}$ A
 - D. $2,5 \times 10^{-3}$ A
 - E. $2,5 \times 10^{-4}$ A

Gambar 5. Butir soal nomor 11

Persentase jawaban benar siswa yang tersaji pada Gambar 1 terhadap soal konversi satuan adalah 17,6% untuk soal nomor 11 dan 80% untuk soal nomor 12. Berdasarkan analisis Zipgrade, nampak bahwa alternatif jawaban siswa terdistribusi pada semua pilihan distraktor yaitu pilihan A 25%, pilihan B 12%, pilihan D 38%, dan pilihan E 7%. Dilihat dari distraktor yang paling banyak dipilih siswa yaitu pilihan D menunjukkan bahwa siswa kurang teliti dalam konversi satuan ketika setelah mengubah satuan miliampere ke ampere, yaitu mengubah menjadi notasi ilmiah.

Penguasaan Siswa Terkait Angka Penting dan Operasinya

Aturan angka penting merupakan aturan dalam penulisan hasil pengukuran. Aturan ini sangat penting terutama saat melakukan perhitungan dengan ralat. Selain angka penting, aturan pengoperasiannya juga perlu untuk dikuasai siswa yaitu aturan perkalian pembagian dan penjumlahan pengurangan. Agar mampu menjawab soal terkait aturan angka penting dan operasinya siswa harus menguasai (1) angka penting, terutama angka nol dan desimal; (2) notasi ilmiah; (3) aturan perkalian pembagian, dimana hasil perkalian atau pembagian mengikuti angka penting yang paling sedikit; dan (4) aturan penjumlahan pengurangan yaitu hasil harus mengikuti angka taksiran paling sedikit. Butir soal untuk mengakses penguasaan siswa terkait angka penting dan operasinya adalah butir soal nomor 14 dan 15. Salah satu butir soal yaitu butir soal nomor 14 tersaji pada Gambar 6.

14. Suatu gelombang wifi memiliki frekuensi $2,4 \times 10^9$ Hz. Jika wifi tersebut dipancarkan untuk wilayah sekitar sekolah dengan kecepatan gelombang 3×10^8 m/s. Berapakah Panjang gelombang wifi tersebut? Gunakan aturan angka penting! (Kata kunci: Panjang gelombang sama dengan kecepatan dibagi frekuensi)
- A. 0,125 m
 - B. 0,12 m
 - C. 0,1 m
 - D. 1 m
 - E. 10 m

Gambar 6. Butir soal nomor 14

Berdasarkan data analisis butir soal pada Gambar 1, persentase jawaban benar untuk penguasaan materi ini sebesar 23,5% untuk soal nomor 14 dan 17,6% untuk soal nomor 15. Persentase penguasaan yang rendah ini, secara nyata berkontribusi negatif terhadap rata-rata penguasaan materi pada bab ini. Distribusi alternatif jawaban siswa tersebar merata terhadap butir soal nomor 14. Persentase alternatif jawaban A sebesar 14%, pilihan B sebesar 24%, pilihan D sebesar 35%, dan pilihan E sebesar 3%. Berdasarkan hasil ini, nampak bahwa pilihan D dan B berturut-turut sebagai alternatif jawaban yang memiliki kualitas distraktor tinggi. Melalui perhitungan panjang gelombang, diperoleh nilai sebesar 0,125 m. Menggunakan aturan perkalian angka penting yaitu mengikuti angka penting paling sedikit yaitu satu angka penting, sehingga diperoleh pembulat nilai menjadi 0,1 m (pilihan C). Siswa

yang memilih alternatif jawaban D, salah dalam melakukan pembulatan dan kebingungan menghitung angka penting, sedangkan siswa yang memilih alternatif jawaban B, salah dalam menggunakan aturan penggunaan angka penting pada hasil perkalian.

Penguasaan Siswa Terkait Keterampilan Penggunaan Ampere, Volt, and Ohm meter (AVOMeter)

Memahami cara untuk menggunakan AVOMeter merupakan kemampuan penting sebelum melaksanakan praktik pengukuran. Hal ini, jika terjadi kesalahan pemasangan kabel atau pemilihan selektor akan menjadi fatal. Bahkan jika tidak melakukan tahap kalibrasi, hasil pengukuran yang terbaca tidak akurat. Agar siswa dapat menguasai keterampilan penggunaan AVOMeter sebelum praktek maka wajib menguasai teori sebagai berikut: (1) sebelum melakukan pengukuran harus mengkalibrasi AVOMeter; (2) Jika AVO meter diatur sebagai amperemeter, pastikan rangkaian yang akan diukur kuat arus listriknya dipasang seri dan harus dialiri listrik; (3) Jika AVOMeter diatur sebagai voltmeter, pastikan rangkaian yang akan diukur tegangan listriknya harus dipasang paralel dan harus dialiri listrik; (4) jika AVOMeter diatur sebagai ohmmeter, harus dipastikan bahwa komponen yang akan diukur hambatannya tidak dialiri arus listrik dan dipasang paralel; dan (5) untuk mendapatkan hasil pengukuran akurat, maka memprediksi objek yang diukur mutlak dilakukan, dan selektor dipilih satu tingkat diatas nilai prediksi objek. Butir soal untuk mengakses penguasaan siswa tentang penggunaan AVOMeter adalah butir soal nomor 16, 17, 18, dan 19. Salah satu butir soal yaitu butir soal nomor 16 tersaji pada Gambar 7.

16. Kamu akan mengukur tegangan suatu sumber listrik rumah tangga dengan tegangan rata-rata sebesar 220 V. Jika kamu akan mengukurnya menggunakan AVO, maka setelah AVO terkalibrasi, pemutar AVO kamu arahkan ke ...
- A. DCV 200 V
 - B. ACV 200 V
 - C. DCV 250 V
 - D. ACV 250 V
 - E. DCV 1000 V

Gambar 7. Butir soal nomor 16

Distribusi persentase jawaban benar siswa (Gambar 1) untuk butir nomor 16 sebesar 11,8%, nomor 17 sebesar 85,9%, nomor 18 sebesar 57,6%, dan nomor 19 sebesar 49,4%. Kontribusi ini tentu sangat berpengaruh dalam perolehan nilai rata-rata bab yang rendah. Alternatif jawaban siswa terhadap butir soal nomor 16 beragam. Alternatif jawaban A sebesar 34%, pilihan B sebesar 7%, pilihan C sebesar 45%, dan pilihan E sebesar 2%. Siswa yang berhasil menjawab pilihan D (kunci) berarti telah menguasai cara penentuan selektor dan sekaligus tipe tegangan (AC atau DC). Alternatif jawaban C yang dipilih sebagian besar siswa, menunjukkan bahwa mereka belum dapat membedakan tipe tegangan AC atau DC. Alternatif jawaban salah kedua yaitu pilihan A menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum menguasai baik tipe tegangan maupun syarat pemilihan selektor yang benar.

SIMPULAN DAN USULAN OPSI KEBIJAKAN

Aplikasi Zipgrade dapat digunakan untuk memetakan penguasaan siswa terkait besaran, satuan dan pengukuran sekaligus analisis tiap soal secara detail. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata penguasaan siswa terkait materi pengukuran adalah sebesar 47,5. Beberapa kelemahan penguasaan siswa yang menyebabkan rata-rata belum mencapai batas minimum penguasaan adalah pembacaan nilai dan penggunaan AVOMeter, pembacaan nilai resistor, konversi satuan di bidang komputer dan informatika, dan penggunaan aturan angka penting serta operasinya. Kebijakan yang harus dilakukan guru untuk dapat meningkatkan penguasaan siswa yaitu dengan meremediasi siswa melalui berbagai alternatif seperti multimedia (Mustofa, 2019) dan pembelajaran tutor sebaya.

PUSTAKA ACUAN

- Baiti, A. A., & Munadi, S. (2014). Pengaruh pengalaman praktik, prestasi belajar dasar kejuruan dan dukungan orang tua terhadap kesiapan kerja siswa SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 4(2). <https://doi.org/10.21831/jpv.v4i2.2543>
- Ding, L., & Beichner, R. (2009). Approaches to data analysis of multiple-choice questions. *Physical Review Special Topics - Physics Education Research*, 5(2), 020103. <https://doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.5.020103>
- Imama, Y. N., Nuroso, H., & Khoiri, N. (2018). EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE SCRIPT BERBANTUAN HANDOUT PADA POKOK BAHASAN BESARAN DAN SATUAN TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 GUBUG. *Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika*, 6(2). <https://doi.org/10.26877/jp2f.v6i2.2577>
- Karisma, M. (2016). PENGGUNAAN LKS BERBASIS KARAKTER BERPIKIR KRITIS TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA KELAS X MIPA SMA. *Jurnal Riset Fisika Edukasi dan Sains*, 2(2), 109–114. <https://doi.org/10.22202/jrfes.2016.v2i2.2440>
- Mukhlis, M. (2017). PEMBELAJARAN MODEL INQUIRY TERBIMBING PADA MATERI BESARAN DAN SATUAN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN GENERIK SAINS DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA. *Lantanida Journal*, 5(1), 29. <https://doi.org/10.22373/lj.v5i1.2057>
- Mustofa, Z. (2018). The Description of Student Understanding about Elasticity Concept. *Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika*, 4(1), 27–34. <https://doi.org/10.21009/1.04104>
- Mustofa, Z. (2019). PENGARUH MULTIMEDIA INTERAKTIF DALAM PEMBELAJARAN REMEDIAL UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR FISIKA. *Jurnal Teknodik*, 121. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.329>
- Mustofa, Z. (2019). PENGARUH DISCOVERY LEARNING BERBANTUAN E-LEARNING DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP SISWA TENTANG KONSENTRASI LARUTAN DAN APLIKASINYA. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 7(1), 14–29. <https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v7n1.p14--29>
- Mustofa, Z. (2020). EVALUASI PENYELENGGARAAN UJIAN SEMESTER BERBASIS KOMPUTER (USBK) MENGGUNAKAN MODEL CIPP. *Jurnal Teknodik*, 2, 15. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i2.519>
- Mustofa, Z., Sutopo, S., Mufti, N., & Asmichatin, A. (2019). The Impact of Modeling Instruction Based on System Toward Work-Energy Concept Understanding. *Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika*, 5(2), 145–154. <https://doi.org/10.21009/1.05209>
- Muttaqin, N. H., Yamtinah, S., & Utomo, S. B. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) Disertai Diskusi dan Media Hyperchem untuk Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar pada Materi Ikatan Kimia Kelas X 1 SMA Islam 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017. *Jurnal Pendidikan Kimia*, 7(1), 62. <https://doi.org/10.20961/jpkim.v7i1.24564>
- Nasution, S. W. R. (2019). Nal Education and development. *Jurnal Education and development*, 7(4), 175–179.
- Yoto, Djoko Kustono, Muladi, & Wardana. (2013). PARTISIPASI MASYARAKAT INDUSTRI DALAM PENYUSUNAN SINKRONISASI KURIKULUM DI SMK. *Jurnal Teknik Mesin*, 21(1), 14.

ABSTRACT

The study aims to determine the potential support for the implementation of PIP policies in an effort to improve access to education for school-age children who come from underprivileged families. This research is a case study in Babakan subdistrict which based on preliminary observations shows an indication of successful PIP implementation. This research uses a descriptive qualitative approach. The data is collected through document review by analyzing the PIP report data and in-depth interviews with relevant stakeholders. The results show that the successful implementation of PIP was supported by four interrelated aspects, including good communication and coordination between the stakeholders involved in tiered, adequate resources, and a good bureaucracy based on their roles and functions. It is hoped that the research results can inspire and motivate other regions to implement PIP.

Keywords: Program Indonesia Pintar, support, communication, coordination, resources, bureaucracy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pendukung penerapan kebijakan PIP sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan untuk anak usia sekolah yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Penelitian merupakan studi kasus di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, yang menurut pengamatan sementara menunjukkan indikasi keberhasilannya dalam penerapan PIP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan telaah dokumen dengan menganalisis data laporan pelaksanaan PIP dan wawancara mendalam terhadap sejumlah unsur yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PIP didukung oleh empat aspek yang saling terkait, yakni: komunikasi yang baik, koordinasi antar unsur yang terlibat dilaksanakan secara berjenjang, sumberdaya yang memadai, dan birokrasi yang menjalankan peran dan fungsinya secara baik. Diharapkan hasil penelitian dapat menggugah daerah-daerah lainnya untuk menerapkan dalam pelaksanaan PIP.

Kata kunci: Program Indonesia Pintar, pendukung, komunikasi, koordinasi, sumber daya, birokrasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Angka putus sekolah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. BPS (2019) menyebutkan angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar 0,37 persen dan pada jenjang sekolah menengah sebesar 1,76 persen. Jika dibandingkan dengan target Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) penurunan angka putus sekolah yang sudah mencapai target hanya pada jenjang sekolah dasar, sedangkan pada jenjang menengah belum mencapai target. Situasi ini biasanya terjadi semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tinggi juga jumlah anak yang putus sekolah. Beberapa faktor yang mengakibatkan anak putus sekolah diantaranya tidak mempunyai biaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan (TNP2K, 2015). Harniati (2010) menyebutkan bahwa terbatasnya seseorang dalam mengakses pendidikan adalah salah satu dari ukuran kemiskinan.

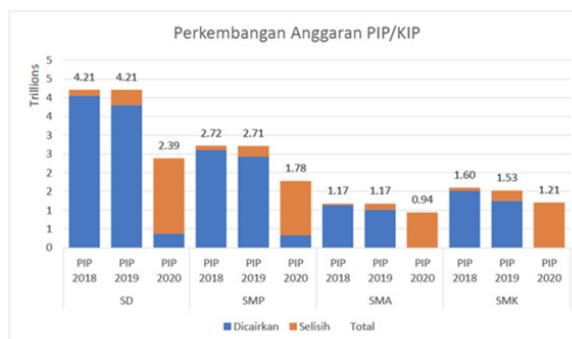
Pendidikan yang layak, merata, dan berkualitas adalah hak dasar warga negara yang harus dijamin oleh negara sebagaimana juga telah termaktubkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Melalui Program Indonesia Pintar, pemerintah mengeluarkan kebijakan sosial dalam bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan program jaminan sosial. Program ini menjadi salah satu dari sembilan Nawacita program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Kebijakan PIP bertujuan meningkatkan akses pendidikan dasar untuk anak yang berasal dari keluarga miskin, anak yang berasal dari daerah konflik, anak yang berada pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (Kemendikbud, 2017).

Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan hambatan biaya pendidikan tidak lagi menjadi masalah masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan. PIP menjadi kebijakan untuk menjamin (*quality assurance*) akses pendidikan yang merata dan bermutu. PIP merupakan program lanjutan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010. Jangkauan sasaran PIP diperluas yakni menyaring siswa putus sekolah agar dapat sekolah kembali. De Brauw & Hoddinot (2011) melakukan penelitian terkait pemberian bantuan sosial di

bidang pendidikan yang dilaksanakan di beberapa negara dan hasilnya menunjukkan bahwa bantuan tersebut berpengaruh dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah.

PIP dilaksanakan melibatkan banyak unsur, mulai dari pemerintah pusat yaitu Kemdikbud melalui direktorat teknis dan pemerintah daerah yaitu dinas pendidikan provinsi/cabang dinas pendidikan, dan sekolah. Dalam penyaluran dan pencairan dana PIP bekerjasama dengan bank penyalur. Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan PIP sangat perlu dilaksanakan agar program dapat mencapai tujuan. Edward III (1980) dalam teori implementasi kebijakan menyebutkan bahwa terdapat empat aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan yaitu aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi, dan aspek struktur birokrasi yang terjadi antar pembuat, pelaksana kebijakan, bahkan penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya selama tiga tahun terakhir PIP mempunyai alokasi anggaran total sebesar 25 triliun. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk dana PIP menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akses layanan pendidikan.



Perkembangan Anggaran PIP/KIP
Sumber: Kemendikbud (2020)

Gambar diatas menunjukkan bahwa masih terdapat anggaran yang disalurkan belum dicairkan oleh penerima dana PIP. Hal ini terjadi karena masih terdapat kendala yang terjadi di lapangan. Penelitian terkait implementasi kebijakan PIP yang dilakukan oleh Retnaningsih (2017) fokus pada pengaruh intervensi politik lokal sehingga pelaksanaan PIP masih tidak sesuai dengan Juklak. Rohaeni dan Saryono (2018) melihat kebijakan PIP dari aspek pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi

dalam pelaksanaan PIP yang belum sempurna sehingga masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima. Sugiyasari (2017) melihat implementasi kebijakan PIP menggunakan teori Edward III yang cakupannya dinas pendidikan dan sekolah ditemukan kurangnya komunikasi antara sekolah dan bank penyalur sehingga menghambat proses pencairan, serta adanya ketidaktepatan sasaran penerima karena terdapat birokrasi lain yang ikut serta dalam pengusulan calon penerima PIP.

Penelitian lain yang dilakukan pada cakupan yang lebih besar dalam hal tempat kajiannya, yaitu Ahmad (2018) melakukan survei pada 6 provinsi di Indonesia terkait kinerja PIP melalui KIP. Penelitian ini menemukan bahwa pada aspek sosialisasi PIP sudah berjalan, tetapi pada daerah 3T belum optimal, pendataan masih belum sinkron sehingga masih ada siswa yang layak PIP tetapi tidak mendapat bantuan, kurangnya koordinasi dengan lembaga penyalur, keterlambatan pencairan dana, unsur pendidikan yang terlibat masih belum optimal. ICW (2018) juga melakukan survei mengenai PIP yang dilakukan di empat provinsi dengan temuan masih banyak siswa yang kurang mampu tidak terdaftar sebagai penerima PIP dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terkait mekanisme PIP, waktu pencairan yang tidak tepat karena ketidaktahuan sekolah terkait data penerima PIP bahkan terdapat penerima PIP yang baru mencairkan dana bantuan satu tahun setelah SK ditetapkan, persyaratan dokumen pencairan yang diminta bank penyalur tidak sesuai dengan Juklak, lokasi sekolah yang jauh dari bank penyalur, penggunaan dana PIP selain untuk kebutuhan biaya personal pendidikan.

Zamjani (2018) melakukan penelitian pelaksanaan PIP bagi penerima KIP di empat daerah kunjungan kerja presiden tahun 2017 dengan melihat: 1) ketepatan sasaran penerima ditemukan masih ada yang tidak tepat sasaran dikarenakan adanya ketidakjelasan informasi mengenai kriteria penerima PIP, Dapodik yang pada saat awal pencetakan KIP agak diabaikan sebagai referensi penentuan penerima sehingga pemadanan data Dapodik dan BDT kurang maksimal; 2) Pencairan dana PIP yang masih terhambat karena masalah birokrasi dan pelayanan serta masalah geografis; 3) Penggunaan dana PIP yang tidak dipakai untuk keperluan pendidikan karena belum ada sistem pemantauan.

Penelitian yang telah dilakukan khususnya pada fokus implementasi kebijakan di atas belum melakukan analisis dan sasaran yang

komprehensif yang melibatkan seluruh unsur. Pada penelitian ini dilakukan dengan melihat pelaksanaan kebijakan PIP berdasarkan empat aspek keberhasilan implementasi kebijakan Edward III (1980), sesuai dengan pelaksanaan PIP yang berjenjang melibatkan semua unsur yang terlibat yaitu pembuat dan pelaksana kebijakan yaitu direktorat teknis terkait di Kemdikbud, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa barat, Sekolah, Lembaga penyalur (BNI pusat dan BNI Cabang Losari), siswa penerima, dan orangtua penerima.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan PIP. Meski demikian jika dilihat dari Data Laporan PIP Dikdasmen yang diakses melalui *website* SiPintar (2020) menunjukkan bahwa angka pencairan PIP tertinggi adalah pada jenjang SMA. Sebanyak 1.464.712 siswa penerima PIP tahun 2019 sudah sebesar 86 persen yang sudah mencairkan dana bantuan. Sementara itu, masih terdapat 14 persen yang masih belum mencairkan. Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi penerima dana bantuan PIP SMA, yaitu sebanyak 206.715 siswa. Selama program berjalan, Kemdikbud mengukur salah satu keberhasilan PIP dengan melihat tingkat dana bantuan yang tercairkan oleh siswa penerima.

Kabupaten Cirebon yang akan menjadi pusat perhatian penelitian ini merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan penyaluran dana bantuan PIP terbesar pada jenjang SMA, dan sudah dicairkan oleh penerima hampir mencapai 100 persen. Dari seluruh Kecamatan, terdapat satu kecamatan yang mempunyai penyaluran terbanyak dan angka pencairan dana PIP tertinggi pada jenjang SMA yaitu Kecamatan Babakan.

Penelitian ingin mengetahui potensi pendukung apa dalam implementasi kebijakan PIP jenjang SMA di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon yang menurut pengamatan sementara menunjukkan indikasi keberhasilan dalam penerapan PIP. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan potensi pendukung implementasi kebijakan PIP jenjang SMA terutama terkait dengan aspek komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi di Kecamatan Babakan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi penerapan PIP di daerah lain.

Kebijakan Sosial di Bidang Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar

Kebijakan sosial dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Midgley dan Livermore, 2009). Kebijakan sosial yang dilakukan pemerintah berupa program pelayanan sosial yang mencakup pelayanan sosial pada bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, layanan sosial personal (Deacon, 2002). Di Nitto (2003) menyebutkan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dikategorikan menjadi *public assistance, social insurance, social service*, dan isu-isu lainnya. Kebijakan sosial untuk menjamin pendapatan dan akses layanan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap masalah-masalah sosial (ILO, 2012). Untuk menekan angka kemiskinan dan kerentanan yang dihadapi masyarakat dicanangkan kebijakan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial (Bappenas, 2014). Perpres No. 63 tahun 2017 menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang atau jasa kepada masyarakat yang rentan resiko sosial misalnya kejadian yang mengakibatkan potensi kerentanan sosial, sehingga masyarakat tersebut harus diberikan bantuan untuk menghindari keadaan yang buruk dalam kerentanan sosial tersebut.

Pemerintah mencanangkan kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang mempunyai mutu berkualitas, relevan, serta kesetaraan untuk semua provinsi, kabupaten, dan kota yang dilakukan melalui strategi pemberian subsidi (Kemdikbud, 2015). Kebijakan tersebut sesuai dengan Nawacita ke lima yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di bidang pendidikan yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia yang kemudian dilaksanakan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Kemdikbud (2017) menjelaskan bahwa pemberian subsidi melalui PIP adalah salah satu kebijakan penting yang menjadi jaminan pemberian akses pendidikan yang luas dan bermutu untuk semua kelompok masyarakat yang menjangkau masyarakat miskin. Kebijakan Program Indonesia Pintar dilaksanakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014. PIP dilaksanakan dengan memberikan bantuan tunai kepada usia anak sekolah yang berasal dari kurang mampu.

Sebelum PIP, dilaksanakan pemberian subsidi sudah diberikan melalui bantuan siswa miskin

(BSM). Saat itu sasaran BSM hanya untuk siswa yang berada di dalam sekolah sehingga pada tahun 2015 diperluas jangkauan sasarannya yaitu menyaring siswa yang putus sekolah agar dapat mendapatkan akses pelayanan Pendidikan kembali. Selain itu Program Indonesia Pintar juga memberikan kartu identitas kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan dana bantuan PIP yang tercatat sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar dimana peserta didik tersebut menjadi prioritas untuk mendapatkan akses layanan Pendidikan. Sampai saat ini Kemendikbud masih terus mengintegrasikan data penerima PIP dari SD, SMP, dan SMA/K yang dirancang untuk keberlangsungan belajar bagi siswa miskin hingga perguruan tinggi.

Ketentuan mengenai pelaksanaan PIP tertuang dalam Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sasaran penerima PIP yaitu siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dilihat dari kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Penetapan penerima KIP berdasarkan: 1) Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dikeluarkan oleh kementerian bidang sosial yang dipadankan dengan data pendidikan (Dapodik); 2) usulan data sejenis dengan sumber data berasal dari usulan sekolah yang layak PIP, usulan direktorat jenderal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang layak PIP, korban bencana, dan usulan pemangku kepentingan. TNP2K dalam kajian Kemdikbud (2017) menyebutkan bahwa proses identifikasi siswa miskin berdasarkan pada sensus data penduduk miskin dimana pada data yang terkumpul ditentukan percentile 40% bawah sebagai target penerima PIP.

Pengusulan data calon penerima PIP dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan non-KIP. Untuk mendapatkan dana bantuan PIP, siswa yang memiliki KIP atau masuk dalam kriteria sasaran untuk melaporkan ke sekolah atau lembaga untuk di data dan diusulkan melalui Dapodik. Bagi siswa yang terdaftar di lembaga nonformal pengusulan PIP dilakukan melalui dinas pendidikan di wilayah masing-masing.

Seluruh data usulan akan diolah oleh masing-masing direktorat teknis sesuai dengan standar pengolahan data yang meliputi kelengkapan data usulan kemudian akan dipadankan dengan data pokok pendidikan, dan basis data terpadu. Hasil pengolahan data akan digunakan untuk penetapan penerima PIP melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada direktorat jenderal yang membidangi urusan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kewenangan. Selanjutnya, Kemdikbud melakukan proses penyaluran dana bantuan ke penerima PIP melalui rekening tabungan yang sudah dibuatkan oleh bank penyalur.

Besaran dana bantuan yang diterima oleh penerima PIP bervariasi tergantung jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD/ sederajat mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.450.000 per siswa, untuk jenjang SMP/ sederajat mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.750.000, dan untuk jenjang SMA/ sederajat mendapat dana bantuan sebesar Rp.1.000.000 per siswa dalam satu tahun. Sesuai dengan ketentuan dana PIP harus digunakan untuk membantu biaya personal pendidikan yang meliputi pembelian buku dan alat tulis, membeli seragam dan perlengkapan sekolah, untuk membiayai transportasi ke sekolah, untuk uang saku, biaya les, atau untuk biaya praktik.

Surat Keputusan penerima PIP kemudian disampaikan kepada sekolah atau lembaga yang bersangkutan agar dapat melakukan pencairan dana PIP yang dilakukan melalui bank penyalur. Pencairan dana PIP dapat dilakukan langsung oleh penerima PIP atau secara kolektif dikuasakan ke kepala sekolah atau lembaga dengan membawa persyaratan dokumen yang telah ditentukan. Untuk pencairan secara kolektif dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya sekolah siswa penerima berada jauh dari bank penyalur atau kesulitan transportasi dalam menjangkau layanan bank penyalur.

Implementasi Kebijakan

Syaukani, dkk (2004) implementasi adalah rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan kebijakan kepada masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Suharto (2008) untuk mencapai tujuan maka suatu kebijakan harus diimplementasikan. Menurut kamus Webster dalam Wahab (2012) implementasi

yang berarti melaksanakan kemudian menyediakan sarana untuk pelaksanaannya tersebut sehingga dapat menimbulkan dampak untuk mengatasi suatu masalah. Akib (2010) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sehingga dapat mencapai tujuan. Keberhasilan kebijakan dapat ditentukan oleh faktor-faktor yang saling terkait dan berhubungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari kebijakan atau program tersebut.

Untuk menggambarkan implementasi kebijakan PIP, kajian ini menggunakan model Edward III (1980) dengan melihat empat aspek kebijakan yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Berdasarkan pelaksanaan kebijakan PIP yang dijalankan secara berjenjang dari pusat sampai ke sekolah. Keempat aspek tersebut harus berjalan dengan serentak dan berinteraksi satu sama lain karena dapat menentukan bagaimana aspek-aspek tersebut dapat mendorong atau menghambat implementasi kebijakan.

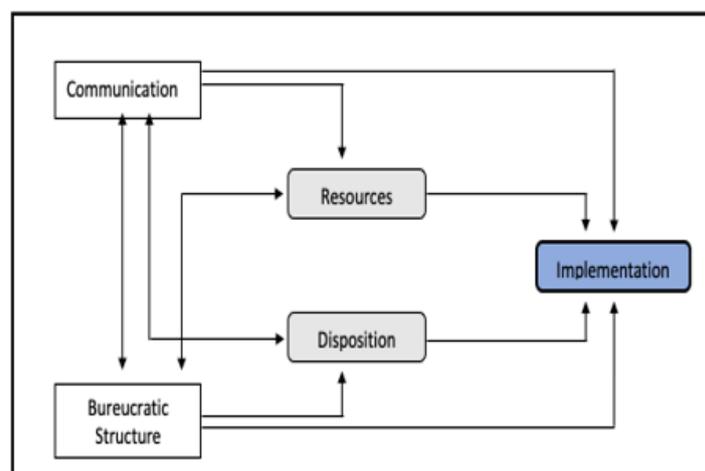
Aspek komunikasi menurut Edward III (1980) suatu proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Pentingnya komunikasi karena informasi mengenai kebijakan harus disampaikan kepada pelaku kebijakan sehingga mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilaksanakan. Suatu kebijakan akan berjalan efektif jika dilakukan komunikasi mengenai tujuan, sasaran, dan apa saja yang harus dikerjakan oleh pelaksana. Komunikasi yang baik meliputi: 1) transmisi yaitu penyaluran komunikasi berjenjang dimana kebijakan disampaikan tidak hanya untuk pelaksana tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang terlibat implementasi kebijakan; 2) informasi yang disampaikan harus jelas agar dapat dilaksanakan dengan baik; 3) konsistensi dalam penyampaian komunikasi harus dilakukan sehingga tidak ada simpang siur agar tidak terjadi hambatan dan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sumber daya yang memadai juga merupakan komponen yang berperan penting dalam suatu implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi: 1) sumber daya manusia yang cukup dan kompeten untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif; 2) anggaran, terbatasnya insentif yang diberikan kepada pelaksana dapat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan hal tersebut juga dapat mempengaruhi disposisi pelaksana kebijakan yang rendah; 3) sarana, pelaksanaan

kebijakan mempunyai sumber daya manusia yang memadai, anggaran yang cukup tanpa sarana yang cukup implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

Aspek selanjutnya yaitu disposisi merupakan sikap pelaksana kebijakan yang dilihat dari kecenderungan dan komitmen dalam melaksanakan kebijakan. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program akan berhasil jika pelaksana mempunyai disposisi yang tinggi. Edward III (1980) menjelaskan faktor yang menjadi perhatian tentang disposisi terdiri dari: 1) pengangkatan birokrasi, dimana sikap pelaksana atau disposisi dalam melakukan tugas sehingga pengangkatan pelaksana kebijakan harus orang yang memiliki dedikasi dalam mencapai tujuan kebijakan; 2) pemberian insentif dapat menjadi solusi masalah sikap pelaksana kebijakan sehingga menambah insentif untuk pelaksana kebijakan agar menjalankan tugas.

Aspek struktur birokrasi mencakup struktur birokrasi itu sendiri, pembagian wewenang, hubungan antara unit organisasi dan lainnya. Struktur birokrasi mencakup dua hal yaitu standar prosedur operasi (SOP) dan fragmentasi. Edward III (1980) mengatakan SOP digunakan sebagai petunjuk, pedoman untuk pelaksana kebijakan agar mengetahui apa yang harus dilakukan, siapa sasaran kebijakan, dan tujuan apa yang ingin dicapai. Selanjutnya fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan kepada beberapa badan atau unsur yang berbeda sehingga menurutnya membutuhkan koordinasi. Hal tersebut dijelaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi bisa jadi meningkatkan gagalnya komunikasi disebabkan kesempatan untuk terjadi arahan terdistorsi sangat besar sehingga diperlukan koordinasi yang intensif.



Skema Model Implementasi Edward III (1980)

Sumber: George Edward III (1980:148)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, lebih menekankan kata-kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2012). Penelitian kualitatif menjelaskan kedalaman pemahaman pengalaman manusia untuk menghasilkan observasi teoritis yang tidak bisa dihasilkan pada angka-angka. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif sehingga dapat menggambarkan dan menganalisis suatu gejala atau realita sosial pada masyarakat. Metode penelitian deskriptif kualitatif dapat menggambarkan implementasi kebijakan PIP SMA yang ditinjau dari aspek komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi di Kecamatan Babakan. Kecamatan Babakan dipilih sebagai tempat penelitian karena termasuk salah satu penyaluran dan pencairan dana PIP tertinggi di Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan PIP pada jenjang SMA yang sudah baik sesuai dengan indikator angka dana yang dcairkan. Dua tahun berturut-turut 2018 dan 2019 angka pencairan PIP jenjang SMA mencapai 100 persen. Selain itu jika dilihat dari kondisi ekonomi siswa berada pada tingkat menengah ke bawah (Dapodik, 2019). Pelaksanaan penelitian dilakukan selama tiga bulan yaitu Juni-Agustus 2020.

Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu 1) studi literatur dan dokumen, dengan mempelajari dan menggunakan bahan dokumen terkait laporan dan informasi mengenai pelaksanaan PIP jenjang SMA di Kecamatan Babakan; dan 2) Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik *in-depth interview* atau wawancara semi terstruktur dimana informan menjawab pertanyaan terbuka yang telah disiapkan. Howitt & Cramer (2011) menjelaskan wawancara semi terstruktur menggunakan dasar panduan wawancara yang berisi pertanyaan atau topik yang telah terskema dan butuh dieksplorasi oleh pewawancara. Untuk memvalidasi hasil dari penelitian, dilakukan triangulasi sumber data dan informan. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan *purposive sampling* karena metode ini tepat untuk digunakan kasus yang unik atau kaya informasi dan melakukan investigasi atau mendapatkan pemahaman yang mendalam (Patton, M.Q., 2002; Neuman, 2014). Informan dipilih juga berdasarkan kemampuan serta pemahaman tentang situasi yang dikaji dan kebutuhan penelitian. Informan yang dipilih adalah mereka yang mampu menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan kebijakan PIP SMA yang dilaksanakan di Kecamatan Babakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan PIP.

Informan terdiri dari: 1) Penanggung Jawab PIP Direktorat SMA yang mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan PIP dari tingkat pusat; 2) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X yang membawahi Kabupaten Cirebon yang mengetahui bagaimana pelaksanaan PIP di wilayah Kabupaten Cirebon tingkat SMA; 3) Petugas PIP di SMAN 1 Babakan dan SMAS PGRI Babakan yang mengetahui pelaksanaan PIP di sekolah; 4) Bank Penyalur (BNI Pusat) yang mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyaluran dan pencairan PIP; 5) Cabang Bank Penyalur (BNI Losari) yang mengetahui pelaksanaan pencairan PIP di Kecamatan Babakan; 6) Siswa dan orangtua siswa penerima PIP yang menjadi penerima manfaat dana bantuan PIP. Menganalisis data menurut Neuman (2014) berarti mengorganisasikan, mengintegrasikan, menguji, mencari pola dan hubungan di antara detail setiap data tersebut. Data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis, mengintegrasikan, dan menyelidiki, untuk mencari pola dan hubungan dari data yang dihasilkan. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang dianalisis seperti data laporan dan

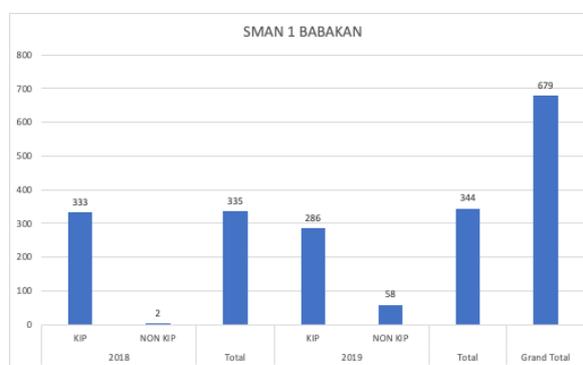
data yang berkaitan dengan PIP. Data kualitatif yang bersumber dari wawancara mendalam dengan tahapan analisis yaitu mengorganisasikan data dalam bentuk transkrip, kemudian data diolah menjadi data yang mempunyai kategori sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan landasan teori sehingga dapat analisis hubungan antara konsep dan faktor yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penerima PIP tingkat Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Babakan

Kecamatan Babakan merupakan Kecamatan yang mendapatkan penyaluran dana PIP terbanyak dan dana yang sudah dicairkan oleh penerima tertinggi pada jenjang SMA di Kabupaten Cirebon. Dana bantuan tersalur sebanyak 510 siswa penerima dengan dana sebesar Rp.428.000.000 pada tahun 2019 dan seluruhnya sudah dicairkan oleh penerima PIP. Terdapat dua Sekolah Menengah Atas yang berada di Kecamatan Babakan yaitu SMAN 1 Babakan dan SMAS PGRI Babakan.

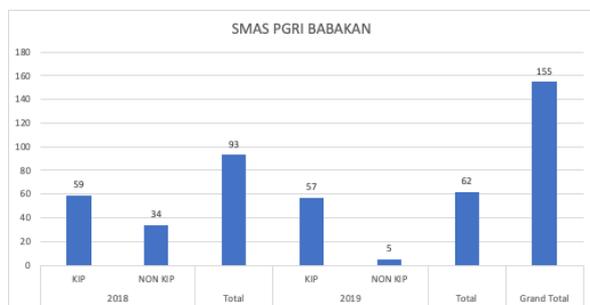
Penerima PIP pada tahun 2018 sebanyak 335 peserta didik penerima di SMAN 1 Babakan. Jumlah tersebut terdiri dari 333 penerima ber-KIP dan 2 penerima Non-KIP. Pada tahun 2019 sebanyak 344 penerima yang terdiri dari 286 penerima ber-KIP dan 58 penerima Non-KIP dari jumlah 354 siswa yang diusulkan oleh sekolah. Masih terdapat 10 siswa yang diusulkan oleh sekolah tidak terdapat dalam daftar SK Penerima PIP. Petugas PIP menelusuri kembali data usulan yang tidak keluar SK tersebut untuk melihat kelengkapan dokumen dan isian data yang diusulkan melalui Dapodik.



Penerima PIP Tahun 2018-2019 di SMAN 1 Babakan

Sumber: Kemdikbud (2020), diolah peneliti

Penerima PIP tahun 2018 di SMAS PGRI Babakan sebanyak 93 penerima dengan 59 penerima ber-KIP dan 34 penerima Non-KIP. Pada tahun 2019 terdapat 62 penerima PIP dengan 57 penerima ber-KIP dan 5 penerima Non-KIP. Semua data usulan siswa yang diusulkan melalui Dapodik terdaftar dalam SK Penerima PIP.



Penerima PIP Tahun 2018-2019 di SMAS PGRI Babakan

Sumber: Kemdikbud (2020), diolah peneliti

Berdasarkan data pencairan PIP melalui *website* Sipintar Kemdikbud, dua tahun berturut-turut 2018 dan 2019 angka pencairan PIP jenjang SMA di Kecamatan Babakan mencapai 100 persen. Hal tersebut menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan PIP yang digunakan oleh Kemdikbud yang menunjukkan bahwa dana bantuan PIP dapat digunakan oleh siswa penerima secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat penggunaan. Pelaksanaan kebijakan PIP jenjang SMA di Kecamatan Babakan melibatkan beberapa unsur pelaksana diantaranya sekolah, BNI, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat, dan Direktorat SMA. Setiap unsur yang terlibat mempunyai peran dan fungsi dalam mekanisme pelaksanaan PIP yang didalamnya meliputi pengusulan data daftar calon penerima, penyaluran, dan pencairan dana.

Potensi Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Babakan

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi menentukan keberhasilan tujuan kebijakan yang ingin dicapai, jika pembuat dan pelaksana kebijakan mengetahui apa yang akan dikerjakan. Implementasi suatu kebijakan akan berjalan dengan efektif jika tidak ada disorientasi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Sehingga pelaksana kebijakan harus mengetahui

apa tujuan dan mekanisme kegiatan yang dilakukan serta menginformasikannya kepada kelompok sasaran.

Komunikasi dalam pelaksanaan PIP di Kecamatan Babakan sudah dilaksanakan secara berjenjang. Penyampaian komunikasi dilakukan oleh Direktorat SMA dengan mengadakan kegiatan rapat koordinasi dan *workshop* dengan mengundang berbagai unsur yang terlibat dalam pelaksanaan PIP. Unsur yang diundang yaitu 34 Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab/kota, SMA dengan jumlah dana PIP yang banyak belum dicairkan, serta BNI sebagai bank penyalur. Informasi yang disampaikan mengenai mekanisme pelaksanaan PIP yakni: pengusulan data calon penerima PIP, penyaluran dan pencairan dana PIP, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP, serta jbaran mengenai peran dan fungsi masing-masing unsur yang terlibat. Sosialisasi dan koordinasi dilaksanakan minimal dua kali dalam satu tahun. Dalam kegiatan tersebut juga diadakan forum diskusi mengenai permasalahan pelaksanaan PIP pada masing-masing daerah sehingga dapat dianalisis masalah yang terjadi, kemudian disepakati solusi untuk dilaksanakan tindak lanjut setelah kegiatan tersebut.

Penyampaian informasi kemudian dilanjutkan pada unsur pemerintah daerah yakni Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Cirebon. Sosialisasi dan koordinasi dilaksanakan kepada seluruh kepala SMA se-Jawa Barat dalam bentuk kegiatan Diseminasi Program SMA. Informasi yang disampaikan mengenai mekanisme pelaksanaan PIP dari mulai pendataan calon penerima PIP, penyaluran dan pencairan, serta monitoring dan evaluasi PIP serta peran dan fungsi masing-masing unsur yang terlibat sebagaimana tercantum dalam Juklak PIP dan disampaikan oleh Direktorat SMA. Komunikasi dan koordinasi kemudian dilanjutkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat kepada SMA di Kabupaten Cirebon melalui pemantauan pencairan dana PIP yang dilakukan tiga bulan sekali dalam bentuk kunjungan kepada SMA yang mempunyai permasalahan pencairan dana PIP.

Informasi dan koordinasi yang sudah dilakukan dengan Direktorat SMA dan Dinas Pendidikan Provinsi kemudian dilaksanakan oleh sekolah. Komunikasi terkait pelaksanaan PIP di SMAN

1 Babakan dan SMAS PGRI Babakan dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi kepada orangtua dan peserta didik setiap awal tahun ajaran. Sekolah menjelaskan alur dari pendaftaran calon penerima PIP sesuai dengan kriteria, penyaluran dan pencairan dana PIP, sampai dengan pendampingan dalam penggunaan dana PIP. Adanya penyampaian informasi yang dilakukan oleh sekolah berdampak kepada pemahaman orangtua penerima PIP mengenai informasi untuk mendapatkan dana bantuan dan penggunaan dana bantuan untuk keperluan pendidikan.

Komunikasi yang dilakukan oleh BNI dengan Kemdikbud dilakukan dalam pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana PIP. BNI pusat juga melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai mekanisme pencairan dana PIP yang meliputi cara pencairan, dokumen persyaratan, dan hal lainnya yang terkait kepada BNI Wilayah. Komunikasi dilaksanakan secara langsung yang dilakukan melalui rapat tatap muka dan secara *online* melalui BNI Forum kepada *Personal in Charge* (PIC) PIP di setiap BNI Wilayah. Untuk wilayah Kecamatan Babakan, penerima PIP pada jenjang SMA dan SMK melakukan pencairan di BNI Cabang Losari. Komunikasi yang dilakukan yaitu memberitahukan dokumen persyaratan PIP dan mekanisme pencairan kepada petugas PIP sekolah.

Secara umum aspek komunikasi dalam implementasi PIP pada jenjang SMA di Kecamatan Babakan sudah berjalan dengan baik dan setiap unsur sudah melakukan komunikasi berjenjang. Edward III (1980) menjelaskan dalam implementasi kebijakan komunikasi adalah salah satu aspek penting keberhasilan implementasi. Dengan komunikasi, pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dapat saling berkoordinasi sehingga mengetahui bagaimana kebijakan harus dilaksanakan dan peran apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Penerima PIP dan orangtua sebagai penerima manfaat bantuan memahami dan menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan yaitu digunakan untuk biaya personal pendidikan.

Kendati demikian pada penelitian ini ditemukan beberapa hal dalam aspek komunikasi yang masih tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP. Temuan pertama yaitu dana PIP digunakan untuk membayar SPP. Pada petunjuk pelaksanaan PIP disebutkan enam peruntukkan penggunaan

dana PIP yaitu untuk membeli buku dan alat tulis, membeli pakaian seragam dan perlengkapan sekolah, biaya transportasi ke sekolah, uang saku, biaya kursus, biaya praktik, dan biaya magang.

Pemungutan uang SPP bulanan pada jenjang SMA masih diperbolehkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Di Kecamatan Babakan, peserta didik penerima PIP tetap diwajibkan untuk membayar iuran sumbangan pendidikan setiap bulan. Permendikbud Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler bahwa untuk peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya sekolah dan ditanggung melalui BOS Reguler. Penerima PIP sebagaimana kriteria yang telah disebutkan merupakan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu sehingga seharusnya sekolah tidak dapat memungut biaya iuran tersebut. Pada penelitian Zamjani (2018) dana PIP digunakan untuk pembayaran SPP dengan alasan untuk mengantisipasi penggunaan dana bukan untuk keperluan pendidikan. Begitu juga pada penelitian ICW (2018) juga menemukan adanya penggunaan dana PIP untuk membayar pungutan sekolah berupa SPP, *study tour*, dll.

Temuan lain yaitu adanya salah persepsi terkait pemahaman dokumen persyaratan pencairan dana PIP. Pencairan dana PIP SMA di Kecamatan Babakan mewajibkan penerima PIP untuk membawa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Fotokopi KTP orangtua. Padahal di dalam Juklak PIP Tahun 2019, pencairan langsung oleh penerima dokumen persyaratan yang harus dilampirkan hanya Surat Keterangan Kepala sekolah, salah satu identitas penerima PIP, dan formulir bank. Meskipun dalam pelaksanaan PIP di Kecamatan Babakan tidak menjadi hambatan tetapi menurut informan Direktorat SMA banyak sekolah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pencairan dana PIP.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III (1980) mencakup dua hal yaitu standar prosedur operasional (SOP) dan fragmentasi atau struktur birokrasi itu sendiri sehingga para implementor kebijakan dapat lebih mudah dan menyeragamkan tindakan sesuai dengan peran dan fungsinya. Edward III (1980) menyebutkan SOP sebagai pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan kebijakan agar pelaksana atau implementor

dapat memahami dan mengetahui apa yang harus dilakukan, siapa saja sasaran kebijakan, serta tujuan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan PIP SMA di Kecamatan Babakan yang melibatkan berbagai unsur birokrasi yang mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Pemerintah pusat dalam hal ini Kemdikbud, pelaksanaan teknis PIP pada jenjang SMA dilaksanakan oleh Direktorat SMA. Peran yang dilaksanakan yaitu melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan PIP dalam bentuk rapat koordinasi dan kegiatan *workshop*. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan Kemensos dan lembaga lain terkait sinkronisasi dan *updating* data kemiskinan.

Peran selanjutnya yaitu melakukan penyaluran dana PIP, seluruh usulan data calon penerima PIP yang telah diusulkan oleh sekolah diolah sesuai dengan ketentuan kertas kerja pengolahan data SK kemudian dana bantuan disalurkan melalui rekening penerima. Pada Tahun 2019, Direktorat SMA telah menyalurkan dana bantuan sebanyak 1.464.712 siswa dengan dana sebesar Rp1.174.988.500.000 dilaporkan penerima PIP yang sudah mencairkan mencapai 86 persen per Mei 2020. Direktorat SMA juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencairan dana PIP. Bentuk monitoring PIP dilaksanakan dalam bentuk kegiatan percepatan pencairan dana PIP kepada sekolah-sekolah yang mengalami kendala pencairan. Layanan pengaduan dan permohonan informasi mengenai PIP juga disediakan oleh Direktorat SMA melalui *hotline* telepon, SMS, email, dan *website* PIP SMA yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat pada jam kerja.

Pelaksanaan PIP pada unsur pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X yang membawahi Kabupaten Cirebon. Peran yang dilakukan yaitu sosialisasi dan koordinasi dengan kepala SMA melalui kegiatan Diseminasi Program SMA. Pelaksanaan teknis di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X dengan melakukan pemantauan terhadap pencairan dana PIP dan menyampaikan informasi terbaru mengenai PIP.

SMAN 1 Babakan dan SMAS PGRI Babakan sebagai pelaksana PIP sudah memahami dan melaksanakan peran dan fungsinya. Kepala sekolah membentuk dan mengangkat tim PIP melalui Surat Keputusan yang mempunyai tugas

untuk melaksanakan PIP di sekolah. Selanjutnya, melakukan sosialisasi kepada peserta didik dan orangtua terkait pelaksanaan PIP. Petugas PIP di sekolah melakukan penjarangan data calon penerima PIP disesuaikan dengan kriteria pada Juklak PIP yaitu peserta didik pemilik KIP dan peserta didik yang tidak memiliki KIP berasal dari keluarga tidak mampu sehingga layak mendapatkan dana bantuan PIP yang terdaftar dalam basis data kemiskinan Kemensos. Sekolah melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang telah dikumpulkan peserta didik calon penerima PIP kemudian mengusulkan melalui Dapodik. Menurut petugas sekolah, masih banyak siswa tidak mampu yang tidak mendapatkan dana bantuan PIP dikarenakan tidak memiliki KIP dan tidak terdaftar pada data kemiskinan di Kemensos. Hal tersebut dijelaskan oleh Direktorat SMA karena adanya keterbatasan alokasi anggaran sehingga yang diutamakan mendapatkan SK Penerima dana bantuan sesuai dengan kriteria yang terdapat di Juklak PIP.

Setelah SK Penerima PIP diterbitkan oleh Direktorat SMA, sekolah melakukan koordinasi dengan BNI Losari untuk proses pencairan. Petugas PIP memberitahukan kepada penerima PIP untuk mempersiapkan dokumen pencairan (Surat Keterangan Kepala Sekolah, identitas siswa (KIP/Kartu pelajar/KTP), KTP orangtua, dan Kartu Keluarga) dan mendampingi penerima PIP dalam proses pencairan dan penggunaan dana PIP.



Pencairan dana PIP siswa SMAN 1 Babakan di BNI Losari

Sumber: Dokumentasi Sekolah (2019)

Peran BNI dalam pelaksanaan PIP yaitu melakukan penyaluran dan pencairan dana PIP. BNI pusat melakukan koordinasi dengan Kemdikbud terkait penyaluran dana PIP, selanjutnya memberitahukan kepada BNI Cabang bahwa SK terbaru telah disalurkan dan sudah dapat dicairkan oleh penerima PIP.



Pencairan dana PIP siswa SMAN 1 Babakan di Sekolah saat Pandemi Covid-19

Sumber: Dokumentasi peneliti (2020)

Pencairan PIP di Kecamatan Babakan dilakukan di BNI Cabang Losari. Petugas BNI Losari memberitahukan kepada petugas PIP di sekolah mengenai persyaratan dokumen pencairan PIP (Surat Keterangan Kepala Sekolah, identitas siswa (KIP/Kartu pelajar/KTP), KTP orangtua, dan Kartu Keluarga). Selanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pencairan penerima PIP. Aktivasi dan pencairan dana PIP dilakukan oleh penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh BNI Losari. Proses pencairan PIP membutuhkan waktu sekitar dua minggu dari petugas sekolah menghubungi BNI sampai dana diterima oleh penerima.



Proses Koordinasi Pencairan Dana PIP SMA di BNI Losari

Sumber: Dokumentasi Sekolah (2019)

Secara keseluruhan aspek struktur birokrasi dalam pelaksanaan PIP baik dilihat dari adanya standar prosedur operasional berupa Juklak PIP yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PIP dan koordinasi berjenjang sudah dilakukan dengan baik dan dijalankan sesuai peran dan fungsi masing-masing unsur yang terlibat.

Sumber Daya

Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana yang mendukung pelaksanaan PIP pada jenjang SMA di Kecamatan Babakan. Pada tingkat Direktorat SMA dibentuk tim pelaksana PIP yang terdiri dari PNS dan Non PNS yang berjumlah sepuluh orang yang diangkat melalui Surat Keputusan Direktur SMA. Secara jumlah dan kompetensi yang dimiliki tim PIP SMA sudah mencukupi. Hal tersebut dilihat dari kinerja yang ditunjukkan oleh tim sudah baik ditunjukkan dengan adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai tingkat kesalahan data paling rendah dibandingkan dengan direktorat pada jenjang lain, serta angka pencairan dana PIP yang paling tinggi di Kemdikbud.

Tim PIP juga dibentuk pada tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X terdiri dari dua orang petugas. Informan menjelaskan bahwa jumlah tersebut sudah mencukupi untuk melaksanakan pemantauan pelaksanaan PIP jenjang SMA di Kabupaten Cirebon.

Pada tingkat sekolah, baik SMAN 1 Babakan dan SMAS PGRI Babakan sudah mempunyai tim petugas PIP masing-masing. Di SMAN 1 Babakan, tim PIP dibentuk melalui Surat Keputusan kepala sekolah yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggungjawab, Waka Kesiswaan, dan operator sekolah. Adapun tugas dari petugas PIP yaitu melakukan penjaringan data calon penerima PIP, melakukan pengolaan dan pemetaan data peserta didik yang tidak mampu, mengusulkan data calon penerima ke Dapodikdasmen, serta melakukan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.

Di SMAS PGRI Babakan tim petugas PIP di sekolah juga dibentuk yang terdiri dari operator dan dua guru. Petugas PIP mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, menjangkau data calon penerima, serta mendampingi penerima PIP dalam proses pencairan dan penggunaan dana PIP. Secara jumlah dan kompetensi yang dimiliki petugas PIP sudah cukup, kinerja petugas PIP sudah baik ditunjukkan dengan angka pencairan PIP dari tahun 2018-2019 mencapai seratus persen.

Di BNI Cabang Losari, petugas yang melayani PIP terdiri dari *Customer Service (CS)* dan *teller*. Penerima PIP yang akan mencairkan, melakukan administrasi di CS untuk aktivasi rekening setelah

itu melakukan penarikan dana PIP di teller. Keterbatasan SDM terjadi pada pelayanan PIP di BNI Losari. Petugas yang tersedia melayani nasabah umum dan program bantuan pemerintah lainnya sehingga layanan yang dilakukan dibuat penjadwalan dan pembatasan kuota agar pelaksanaan pencairan dana PIP dapat terlaksana dengan baik dan tertib tidak terjadi antrian panjang. Melalui upaya tersebut pelayanan pencairan dana PIP dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Keterbatasan SDM di BNI terjadi karena masih belum adanya perencanaan penyediaan perhitungan SDM yang dibutuhkan.

Sumber daya lain yang mendukung pelaksanaan PIP yaitu adanya alokasi anggaran. Alokasi anggaran dalam pelaksanaan PIP terdiri dari anggaran dana bantuan sosial dan manajemen pengolahan Bansos yang bersumber dari APBN. Alokasi anggaran untuk Bansos dihitung dari jumlah peserta didik yang memiliki KIP. Kemdikbud melakukan perhitungan besaran *unit cost* penerima PIP dengan Bappenas sehingga dana manfaat yang diterima pada setiap jenjang berbeda. *Unit cost* yang dihitung sebenarnya pada setiap daerah berbeda namun pemberian dana manfaat PIP mengutamakan asas pemerataan maka jumlah dana yang diterima oleh penerima PIP sama di seluruh daerah.

Alokasi anggaran dana bantuan PIP belum memperhitungkan peserta didik yang tidak memiliki KIP tetapi layak mendapatkan PIP. Upaya tersebut seharusnya diperhitungkan oleh Kemdikbud mengingat adanya kesalahan data sehingga seharusnya peserta didik tidak mampu tetapi tidak mendapatkan KIP sehingga akan sulit untuk dapat mendapat manfaat PIP. Alokasi anggaran yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Pendidikan, dan sekolah digunakan operasional manajemen program dan untuk pemberian insentif petugas PIP.

Sumber daya fasilitas secara umum setiap unsur baik pada tingkat Direktorat SMA, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, sekolah sudah mencukupi. Secara umum fasilitas yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PIP diantaranya ruang kerja, komputer, internet, dan alat tulis kantor. Sarana yang tidak memadai dalam PIP pada jenjang SMA di Kecamatan Babakan yaitu sarana yang tersedia di BNI Losari. Pihaknya menjelaskan bahwa kantor layanan masih cukup kecil untuk menampung semua nasabah baik umum maupun program pemerintah. Oleh karena itu BNI Losari

melakukan penjadwalan dan pembatasan kuota pelayanan agar tidak terjadi penumpukan.

Secara umum sumber daya dalam pelaksanaan PIP jenjang SMA di Kecamatan Babakan sudah tercukupi. Namun, masih terdapat kekurangan sumber daya manusia dalam pelayanan pencairan dana PIP di BNI Losari. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadi hambatan di BNI Losari dalam pelayanan pencairan dana PIP dengan memaksimalkan SDM yang tersedia dan membuat strategi pelayanan pencairan dengan melakukan penjadwalan dan kuota pelayanan PIP setiap hari. Temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohaeni dan Saryono (2018) menyebutkan bahwa keterbatasan SDM di bank membuat dana PIP yang diterima oleh penerima tidak tepat waktu.

Disposisi

Disposisi dalam pelaksanaan PIP pada jenjang SMA di Kecamatan Babakan ditunjukkan dengan adanya komitmen dan tanggung jawab dari petugas PIP di setiap unsur yang terlibat. Edward III (1980) menjelaskan salah satu indikator adanya disposisi adalah pengangkatan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan yang memahami tugas dan tanggung jawabnya. Setiap unsur yang terlibat sudah membentuk tim pengelola PIP sebagaimana juga yang tercantum dalam petunjuk pelaksanaan PIP. Indikator lainnya yaitu adanya pemberian insentif pada petugas PIP baik di tingkat pemerintah pusat, daerah, dan sekolah. Dengan adanya pengangkatan tim dan pemberian insentif, pelaksana PIP di Kecamatan Babakan melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Disposisi pada BNI Losari juga dapat dilihat dari komitmen petugas bank yang melayani pencairan dana PIP. Meskipun ada keterbatasan sumber daya manusia dan kantor pelayanan di BNI yang kurang memadai tetapi tanggungjawab untuk melayani tetap dilaksanakan dengan maksimal. Komitmen dan tanggung jawab dalam melayani pencairan penerima PIP di BNI Losari dengan membuat strategi mengatur jadwal pencairan kepada penerima agar tidak terjadi penumpukan antrian dan dana PIP diterima oleh penerima PIP secara tepat waktu. Secara keseluruhan disposisi dalam pelaksanaan kebijakan PIP pada jenjang SMA di Kecamatan Babakan sudah berjalan dan cenderung ke arah positif sehingga pelaksanaan PIP berjalan dengan baik.

SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Simpulan

Implementasi kebijakan PIP pada jenjang SMA di Kecamatan Babakan sudah berjalan dengan baik. Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan yang meliputi Direktorat SMA sebagai pembuat sekaligus pelaksana kebijakan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat, SMAN 1 Babakan dan SMAS PGRI Babakan, BNI Pusat, dan BNI Cabang Losari sudah menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan PIP. Keberhasilan pelaksanaan PIP di Kecamatan Babakan pada jenjang SMA didukung dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, struktur birokrasi yang sudah menjalankan peran dan fungsinya, sumber daya yang memadai, serta sikap pelaksana yang terlibat mempunyai komitmen dan tanggung jawab yang tinggi.

Adanya komunikasi dan koordinasi yang sudah berjalan secara berjenjang. Penyaluran komunikasi pada unsur Direktorat SMA dilaksanakan dalam bentuk *workshop* dan rapat koordinasi yang mengundang semua unsur yang terlibat. Pada unsur sekolah, dilakukan sosialisasi terkait pelaksanaan PIP kepada orangtua dan peserta didik. Selain itu, komunikasi juga terjalin antara Direktorat dan BNI terkait penyaluran dan pencairan dana PIP. Sedangkan pada BNI Losari komunikasi terjadi pada saat sekolah melakukan pencairan dana PIP terkait mekanisme dan dokumen persyaratan pencairan.

Komunikasi dan koordinasi yang berjalan dengan baik, didukung juga oleh adanya Struktur birokrasi yang menjalankan peran dan fungsinya dalam pelaksanaan PIP sesuai dengan pedoman PIP. Hal tersebut didukung oleh adanya sumber daya yang mendukung pelaksanaan PIP yang terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, dan sarana. Pada setiap unsur sudah terdapat petugas atau pengelola PIP baik ditingkat direktorat SMA, sekolah, Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat. Meskipun dari segi jumlah petugas yang melayani PIP di BNI Losari masih terbatas. Anggaran yang disediakan untuk bantuan PIP bersumber dari APBN yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang memiliki KIP. Alokasi anggaran lain yang mendukung pelaksanaan PIP bersumber dari unsur birokrasi masing-masing yang digunakan untuk manajemen pelaksanaan PIP. Aspek penting yang mendukung tiga hal di atas yaitu adanya disposisi setiap unsur yang terlibat ditunjukkan dengan sikap pelaksana yang terlibat cenderung

ke arah positif yang mempunyai komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Indikator disposisi yang baik yaitu dengan adanya pemberian insentif dan pengangkatan tim pelaksana dalam pelaksanaan PIP di Kecamatan Babakan.

Meskipun demikian, ada beberapa hal yang menjadi temuan dalam penelitian ini yaitu: 1) masih terdapat beberapa informasi yang masih belum jelas terkait penggunaan dana PIP yang digunakan untuk membayar SPP, dokumen persyaratan pencairan yang diminta tidak sesuai dengan Juklak PIP; 2) keterbatasan petugas pelayanan di BNI Losari; 3) Alokasi anggaran yang masih tidak mencukupi untuk peserta didik yang layak PIP tetapi tidak memiliki KIP; dan 4) monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP belum dilakukan secara maksimal.

Usulan Kebijakan

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka perlu disusun beberapa rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan PIP, sebagai berikut:

- Potensi pendukung pelaksanaan PIP di Kecamatan Babakan dapat dijadikan contoh untuk diterapkan pada daerah-daerah lain agar dana bantuan PIP dapat diterima oleh penerima PIP secara tepat waktu, guna, dan manfaat serta benar-benar menjadi upaya untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan PIP tidak hanya dilakukan untuk melakukan percepatan pencairan dana saja, tetapi harus dilakukan secara keseluruhan mekanisme pelaksanaan PIP dari mulai pendataan calon penerima hingga penggunaan dana PIP. Monitoring dan evaluasi selama ini hanya dilakukan oleh Direktorat teknis, sehingga akan lebih baik jika dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur yang terlibat.
- Dinas Pendidikan Provinsi agar meninjau kembali kebijakan pemungutan SPP kepada siswa penerima PIP yang sebagaimana dijelaskan dalam peraturan BOS, iuran bulanan untuk siswa yang tidak mampu dapat *dicover* melalui dana BOS.
- Bank penyalur untuk membuat perencanaan

strategi dalam pelaksanaan PIP seperti meningkatkan jumlah petugas di BNI wilayah dan membuat perhitungan target waktu dalam menyelesaikan pencairan dana PIP dalam satu tahun anggaran.

- Kemdikbud melakukan perencanaan dan perhitungan kembali terkait alokasi anggaran dana PIP. Diperlukan adanya perhitungan dan kuota pada setiap daerah berdasarkan data pemilik KIP dan data kemiskinan yang bersumber dari Kemensos sebagai upaya untuk mengcover peserta didik yang layak PIP tetapi tidak memiliki KIP dan tidak terdaftar dalam data kemiskinan.
- Merekomendasikan Kemdikbud untuk membuat perencanaan dalam upaya keberlanjutan dan sinkronisasi dengan bantuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, untuk membuat suatu forum penerima dana PIP di setiap provinsi bekerjasama dengan tim PIP dinas pendidikan provinsi. Hal tersebut diperlukan untuk melakukan pendampingan kepada penerima PIP untuk menunjang pengembangan akademik dan non akademik penerima PIP. Dana bantuan PIP pada jenjang SMA/SMK terintegrasi dengan bantuan dana pendidikan KIP Kuliah bahkan sampai dengan jenjang S2 dan S3. Sehingga tujuan kebijakan sosial di bidang pendidikan melalui PIP untuk melakukan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan pada masyarakat yang tidak mampu untuk memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pendidikan.

PUSTAKA ACUAN

- Ahmad. 2018. *Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Survey Pada 6 Provinsi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen E-ISSN 2614-4212 Vol 19 No 1 Februari 2018, 523-542.
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 No 1 Tahun 2010, 1-10.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah Ke Depan*. Jakarta: Bappenas.

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. *Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jakarta: 2019
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2018*. Jakarta: 2019.
- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods. Fourth Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Deacon, Alan. 2002. *"Perspectives on Welfare"*. Buckingham: Open University Press.
- De Brauw, A. & Hoddinott, J. 2011. *Must Conditional Cash Transfer Programs Be Conditioned To Be Effective?: The Impact Of Conditioning Transfers On School Enrollment In Mexico*. Journal of Development Economics 96 (2), 359-370.
- Di Nitto, Diana M. 2003. *"Social Welfare Politics and Public Policy"*. USA : Allyn and Bacon.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.
- Harniati. 2010. *Program-Program Sektor Pertanian Yang Berorientasi Penanggulangan Kemiskinan*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Departemen Pertanian.
- Howitt, D., & Cramer, D. 2011. *Introduction to research method in psychology. (third edition)*. Hallow: Prentice Hall.
- Instruksi Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif*.
- International Labour Organization (ILO). 2012. *Penilaian Landasan Perlindungan Sosial Berdasarkan Dialog*. Jakarta: ILO.
- International Corruption Watch (ICW). 2018. *Hasil Survey Exclusion Error Program Indonesia Pintar Jokowi JK*. https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/hasil_survey_kartu_indonesia_pintar.pdf Diakses di Pada 3 Oktober 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2017. *Kajian Implementasi Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Pusat

- Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2019. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No: 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar. Jakarta.
- Kemntrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2019. Permendikbud No 3 tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler tahun 2019. Jakarta.
- Kemntrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2020. Analisis Sinkronisasi Kebijakan Program dan Anggaran Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal. Jakarta.
- Kemntrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Jumlah putus sekolah menurut tingkat tiap provinsi. Diunduh di <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/> pada 2 Oktober 2019.
- Midgley, James and Michelle Livermore. 2009. *"The Handbook of Social Policy"*. California : SAGE Publications Ltd.
- Neuman, W.L. 2014. *Social research methods, qualitative and quantitative approaches*. Seventh edition. Edinburgh Gate: Pearson.
- Patton, M.Q. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. California: Sage Publications.
- Retnaningsih, hartini. 2017. *Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan Studi Di Kota Kupang NTT dan Kota Palembang Sumatera Selatan*. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian.161-177.
- Rohaeni, Eni., & Saryono, Oyon. 2018. *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Melalui Kip Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan*. Indonesia Journal of Education Management & Administration Review. 193-204.
- Sipintar PIP Kemdikbud. *Program Indonesia Pintar Kemdikbud*. Diakses di <https://pip.kemdikbud.go.id/index/summary> pada Mei 2020
- Sugiyasari, Agus Setyani. 2017. *Implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar Tahun 2015/2016 di SMAN 11 Yogyakarta*. Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 6 Vol. VI Tahun 2017.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: IKAPI.
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- TNP2K. 2015. *Pemanfaatan Data Dan Inovasi Untuk Penajaman Kinerja Program Bantuan Sosial: Menjaring Dan Menjangkau Anak Tidak Sekolah*. Jakarta: TNP2K.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2006. Jakarta: diperbanyak oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- Wahab, Abdul Solichin. 2012. *Analisis kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zamjani, Irsyad. 2018. *Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler: Studi Di Empat Daerah Kunjungan Kerja Presiden Tahun 2017*. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 11 Nomor 2 Agustus 2018. 64-82.

**PERAN DAN STRATEGI KOMUNITAS LONTAR
DALAM MENYEBARKAN BUDAYA LITERASI DI
NUSA TENGGARA BARAT**

***THE ROLES AND STRATEGIES OF LONTAR
COMMUNITY TO SPREAD LITERACY CULTURE IN
WEST NUSA TENGGARA***

M. Zaenul Muttaqin¹, Azhari Evendi², Made Selly Dwi Suryanti³
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Papua

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Papua

mzaenul69@gmail.com

DOI : 10.24832/jpkp.v13i2.382

ABSTRACT

This study aims to analyze the roles and strategies of the Lontar literacy community to introduce literacy culture to the wider community in the West Nusa Tenggara region. Primary data obtained through observation and interviews. Secondary data obtained through journals, articles, and documentation. Data analysis was carried out systematically by determining the sections and relationships between the data sections. The validity of the data is measured by triangulation and external audit. The results show that the Lontar Community has played its role by providing intensive coaching since 2017 at Taman Baca Masyarakat in two regencies that are tourist destinations, such as TBM Rinjani at the slopes of Rinjani, and the Perpustakaan Adat Bayan for this Traditional Village, North Lombok Regency. In its journey, the Community has done mutual cooperation with all parties whose mission is to promote education. As for the strategy of spreading literacy culture, the Lontar Community utilizes public space as a place for reading books, scientific discussion, and writing in the classroom, and uses social media for literacy campaigns.

Key words: Literacy, Reading Culture, Customary Libraries.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi komunitas literasi Lontar dalam mengenalkan budaya literasi kepada masyarakat secara luas di wilayah Nusa Tenggara Barat. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data sekunder berasal jurnal, artikel, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan menentukan bagian dan hubungan antar bagian data. Validitas data diukur dengan triangulasi dan external audit. Hasil penelitian menunjukkan Komunitas Lontar menjalankan perannya dengan melakukan pembinaan intensif semenjak 2017 pada Taman Baca Masyarakat di dua Kabupaten yang menjadi destinasi wisata, seperti TBM Rinjani di wilayah lereng rinjani, dan Perpustakaan Adat Bayan untuk Desa Adat Bayan Kabupaten Lombok Utara. Dalam perjalanannya, Komunitas melakukan kerjasama timbal balik dengan semua pihak yang memiliki misi memajukan pendidikan. Sedangkan untuk strategi penyebaran budaya literasi, Komunitas Lontar memanfaatkan ruang publik sebagai tempat melapak buku, diskusi ilmiah dan penulisan di dalam ruang kelas, serta menggunakan media sosial untuk kampanye literasi.

Kata kunci: Literasi, Budaya Membaca, Taman Baca.

PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menggiatkan program Gerakan Literasi Nasional (GLN), yang menjadi salah satu program nasional guna mendorong peningkatan praktik literasi dan mendorong budaya baca masyarakat secara luas. Inisiasi ini membuka wawasan mengenai hakikat literasi pada era modern dan serba instan saat ini. Pada kenyataannya budaya literasi sering dipandang sebelah mata. Kegiatan membaca dan menulis dipahami dianggap buang waktu. Pada tahun 2016, persentase minat baca masyarakat Indonesia hanya berkisar 0,0001% yang artinya hanya satu orang yang memiliki minat baca diantara seribu orang (Nopilda dan Kristiawan, 2018). Rendahnya minat baca masyarakat patut diwaspadai karena akan menjadi ancaman serius untuk kualitas Sumber Daya Manusia.

Pada perjalanannya, kebijakan literasi tidak dapat dimonitor kementerian secara utuh dan menyeluruh. Rentang kendali kebijakan dan karakteristik wilayah yang beragam memerlukan pendekatan yang berbeda pula. Pada tahun 2017, kementerian pendidikan dan kebudayaan kemudian menunjuk Badan pengembangan dan Pelatihan Bahasa sebagai koordinator wilayah. Peta jalan koordinasi badan bahasa terkait dengan GLN menunjukkan terdapat tiga aspek literasi yang menjadi prioritas tanggung jawabnya. *Pertama*, literasi sekolah; menopang ketersediaan buku untuk meningkatkan minat baca siswa dan pelajar. *Kedua*, literasi keluarga; mengindikasikan pentingnya peran aktif keluarga dalam pengembangan literasi. *Ketiga*, literasi masyarakat yang menunjuk secara langsung partisipasi masyarakat.

Literasi masyarakat dalam bingkai GLN menyebutkan salah satu komponen pendukung berasal dari pegiat literasi yang ada di daerah. Badan Pengembangan dan Pelatihan Bahasa melakukan pelbagai program literasi yang memberi fasilitas bagi para pegiat literasi. Hubungan kerjasama yang terbangun kemudian adalah kerjasama timbal balik. Bagaimanapun, pegiat literasi andil dalam kerangka realitas sosial masyarakat, sehingga dengan partisipasinya diharapkan masyarakat lebih akrab dan dekat dengan budaya literasi.

Seiring perkembangannya, literasi merekah menjadi makna dan cakupan yang semakin luas. Secara komprehensif, literasi diidentifikasi

sebagai informasi untuk menjawab persoalan kontekstual (Anggraini 2016). Literasi masyarakat pada titik ini mesti mengadopsi kebutuhan faktual. Pada situasi lapangan, rendahnya minat baca masyarakat disebabkan oleh salah satunya, tidak ada titik temu antara kebijakan pemerintah dengan kondisi ideal masyarakat (Yanto, Rodiah, and Lusiana 2016). Kebijakan pemerintah cenderung mengaktualisasikan program literasi berdasarkan pertimbangan sentralistik. Sebaliknya, masyarakat cenderung mengakses literasi berdasarkan kebutuhan ekonomi. Motivasi masyarakat terhadap literasi kerap terbentur faktor kebutuhan finansial karena kurangnya pemahaman akan pentingnya sumber bacaan, (Lestari dan Subekti 2019).

Beberapa penelitian menemukan gejala serupa. Kebijakan GLN yang digaungkan pemerintah mengalami hambatan dalam konteks sosial. misalnya, program perpustakaan yang dilaksanakan pemerintah terbatas pada kegiatan peminjaman buku belum mampu memantik peningkatan minat baca masyarakat (Håklev 2008; Kalida 2015; Yanto, Rodiah, and Lusiana 2016). Dengan kondisi tersebut, masalah literasi tidak sebatas aspek mengenalkan buku, tapi juga memerlukan pendampingan yang berkelanjutan. Penelitian lain mengungkap instansi yang mewadahi perpustakaan terlalu kaku pada urusan teknis dan administratif program, sehingga abai terhadap kebutuhan masyarakat saat ini, (Lestari and Subekti 2019). Implikasinya menyasar Taman Baca Masyarakat (TBM). Berdasarkan hasil survei Lentera Pustaka pada tahun 2019, 7 dari 10 taman bacaan menurun karena kekurangan dana operasional, (Yunus 2020).

Program GLN melalui Badan Bahasa memberi prioritas pada adopsi gerakan literasi yang dilakukan semua pihak baik secara individu, maupun berkelompok (Andina 2017; Permatasari 2015; Herdiana, Heriyana, dan Suhaerawan 2019). Literasi sebagai program berjangka panjang dan berkesinambungan, memunculkan bermacam gerakan dengan kekhasan dan kreativitas dalam menyebarkan semangat literasi seperti membuka lapak baca di tempat umum, (Agusta 2020). Komunitas literasi mampu bertahan meski tidak memiliki gedung permanen, (Irhah 2019). Keberadaan komunitas literasi berangkat dari inisiasi objektif masyarakat yang bersih dari motif ekonomi serta kegiatan berpijak pada fakta empiris situasi sosial masyarakat.

Minimnya minat masyarakat terhadap literasi terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada skala nasional, NTB berada pada peringkat keempat dengan minat baca rendah, (SuaraNTB 2019). Rendahnya literasi membaca masyarakat menandai tugas berat pemerintah untuk mengoptimalkan strategi promosi dan sosialisasi literasi yang adaptif dengan kebutuhan publik agar pada masa mendatang minat baca masyarakat meningkat. Urutan tersebut ironis, mengingat maraknya program wisata yang sedang dikembangkan (Hasanah 2019). Literasi menjadi sumbu *bergaining* seimbang antara pembangunan Sumber Daya Manusia dengan pembangunan sektor lainnya.

Komunitas Lombok Pintar (Lontar) hadir sebagai pendukung keberhasilan implementasi program GLN di NTB. Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Massa (Ormas) menjadi benang merah yang memediasi disposisi program *top down* dengan *bottom up* (Subarsono 2011). Munculnya kelompok masyarakat tidak lepas dari orientasi yang horizontal karena lahir dari rahim kesadaran kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi komunitas literasi Lontar dalam mengenalkan budaya literasi kepada masyarakat secara luas di wilayah Nusa Tenggara Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegiat literasi Komunitas Lontar. Data sekunder dihimpun melalui jurnal, artikel, dan dokumentasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan sistematis dengan menentukan bagian dan hubungan antar bagian data (Creswell 2009). Validitas data diukur dengan triangulasi dan external audit yang melibatkan akademisi dalam bidang literasi, (Hamzah 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lombok Pintar resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 2017 di Asrama Mahasiswa dan Pelajar Lombok Timur di Yogyakarta. Gerakan Sejuta Buku Untuk NTB menjadi penanda lahirnya Komunitas Lombok Pintar (Lontar). Kajian kontekstual yang melatar belakangi berdirinya Komunitas Lontar adalah tingkat pendidikan masyarakat Lombok yang

menganggap pendidikan tidak terlalu signifikan dan bermanfaat bagi masa depan, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal secara ekonomi. Sehingga hal ini berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi daya saing di era global. Komunitas Lontar ingin menjadi jembatan penghubung kesenjangan ekonomi dengan pendidikan, sehingga generasi penerus di Lombok memiliki kualitas pendidikan yang meningkat dan mutu sumber daya manusia memadai.

Visi Komunitas Lontar yakni meningkatkan kemampuan sumber daya manusia berbasis keilmuan dan wawasan global ke seluruh pelosok Pulau Lombok. Sedangkan misinya terbagi tiga. *Pertama*, membuka akses literasi dengan mendukung dan mengajak masyarakat lokal terlibat dalam kegiatan literasi, membuat taman baca, dan membuat jaringan literasi. *Kedua*, menjadi mitra komunitas literasi khususnya Lombok dan NTB dengan cara Lombok Pintar menjadi Bank Buku. *Ketiga*, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan membaca, berdiskusi dan melakukan penelitian. Komunitas Lontar memiliki slogan berbahasa Sasak yaitu "Te Mace Te Pinter" yang berarti "Kita membaca kita pintar".

Di tengah dinamika sosial, Komunitas Lontar aktif mengadakan forum diskusi, seminar, hingga bedah buku dengan mengangkat isu komprehensif, dan mendirikan Taman Baca Masyarakat (TBM) di berbagai tempat. Interaksi dan aktivitas membaca, menghimpun buku, diskusi dan mendirikan TBM muncul karena adanya persamaan minat di antara anggota-anggota Lontar.

A. Peran Lontar dalam Bingkai Program Literasi

Literasi berkaitan erat dengan kondisi pendidikan yang ada pada suatu tempat atau lokasi. Pendidikan tidak hanya terpaku pada pendidikan formal yang eksklusif. Sebaliknya, pendidikan identik dengan transfer pengetahuan pada semua ranah. Pendidikan mesti memiliki refleksi dengan realitas yang ada di tengah masyarakat. Selaras dengan kritik Freire terhadap pendidikan bahwa pendidikan tidak seharusnya berlaku seperti nasabah, tugas pendidikan adalah mengenali mentalitas orang-orang yang terlibat. Kritik ini membangun substansi pendidikan terhadap masalah yang dapat dijalin dengan adanya dialog

sehingga membentuk sebuah perkembangan berbasis refleksi kontekstual (Freire 2008).

Praktek dialog transformatif dikembangkan Komunitas Lontar dalam menjalankan programnya. Program ini diantaranya diskusi mingguan. Para pelaku rutin melakukan diskusi-diskusi kelompok mengenai isu-isu sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Diskusi dilakukan di berbagai tempat seperti pelataran kampus Universitas Mataram maupun dalam ruang kelas. Diskusi bertujuan untuk mengakomodasi gagasan-gagasan terkait informasi mengenai isu atau persoalan sosial yang ada di lingkungan para anggota. Kegiatan dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan siapapun tidak terbatas pada anggota Komunitas Lontar. Hasil diskusi berupa notulensi, kesimpulan dan rekomendasi yang dijadikan arsip dan dibukukan, sekaligus juga di bagikan melalui sosial media. Catatan tersebut kemudian dijadikan sebuah agenda untuk program selanjutnya.

1. Pembinaan Taman Baca Masyarakat

Berdirinya Taman Baca Masyarakat (TBM) sendiri didasari keresahan para anggota Komunitas Lontar mengenai sulitnya akses buku bacaan serta rendahnya minat baca masyarakat. TBM didirikan untuk mengenalkan dan menumbuhkan budaya baca pada anak-anak. Para pegiat literasi dari Komunitas Lontar menghimpun sumber literasi dengan cara membuka donasi buku, alat tulis, maupun dalam finansial. Komunitas Lontar melakukan pendampingan pada TBM Rumah Baca Rinjani di desa Sembalun Bumbung, Lombok Timur. TBM Rumah Baca Rinjani memiliki tujuan mengenalkan serta menumbuhkan budaya membaca pada anak-anak di lingkungan setempat. Kegiatan yang ada di Rumah baca Sembalun tidak hanya sekedar membaca buku, melainkan kegiatan seperti belajar bersama, permainan, serta pelatihan seperti pengenalan bahasa asing. Sebagai salah satu destinasi wisata yang unggul dan jalur pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani, interelasi Rinjani sebagai simbol lekat pada identitas masyarakat Sembalun. Relasi antar komunitas literasi merupakan bagian dari praktik pemberdayaan masyarakat (Sutarno, 2008).

Selaras dengan TBM di Sembalun, Komunitas Lontar melakukan pendampingan serupa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Pada tahun 2017 komunitas lontar membuka donasi seribu buku untuk Perpustakaan Adat Bayan. Desa Bayan dikenal sebagai salah satu dari dua desa adat di Pulau Lombok. Identitas ini kemudian dilanggengkan pada penamaan TBM perpustakaan adat. TBM Sembalun dan Perpustakaan Adat Bayan dikelola oleh kelompok muda desa setempat. Kelompok Pemuda memiliki modal sosial dan modal budaya, karena kelompok pemuda berinteraksi langsung dengan realitas tempatnya berada, (Astuti 2019; Lintang Pamungkas 2020; Sayuti 2017).

2. Pengembangan Afiliasi

Komunitas Lontar menjalankan perannya sebagai bagian pendukung GLN berinteraksi dengan beberapa pihak. Berdasarkan hasil wawancara, Komunitas Lontar melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. *Pertama*, pemerintah dalam hal ini berada dalam posisi setara. Pemerintah merupakan salah satu mitra Komunitas Lontar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Kerjasama Komunitas Lontar dengan Pemerintah dalam fasilitasi program literasi di Kantor Bahasa Provinsi NTB, baik dalam bentuk pemberian materi maupun distribusi buku ke taman baca yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kerjasama serupa dilakukan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. *Kedua*, afiliasi dengan universitas, melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kerjasama melibatkan mahasiswa program studi sosiologi untuk mempromosikan literasi ke desa-desa yang jadi sasaran program KKN. *Ketiga*, aksi sosial. Pasca gempa yang menimpa Lombok pada tahun 2018 banyak gedung sekolah yang mengalami kerusakan, sehingga murid tidak bisa masuk seperti sediakala. Komunitas Lontar mengajak guru, murid maupun masyarakat untuk terlibat dalam pemulihan fungsi sekolah. Komunitas Lontar membangun posko relawan selama dua bulan di Kecamatan Tanjung. Dalam hal ini literasi berfungsi sebagai pintu menuju ranah kemanusiaan. Prasyarat pemberdayaan masyarakat diukur dengan parameter akses pendidikan. Gempa tidak secara langsung berhubungan dengan Sumber Daya Manusia. Akan tetapi secara langsung berhubungan dengan tanggung jawab Sumber Daya Manusia.

B. Strategi Pemupukan Literasi

Salah satu perhatian utama Komunitas Lontar terhadap isu sosial yakni persoalan mengenai industri pariwisata yang telah menggeser budaya lokal setempat. Persoalan dan dinamika kehidupan sosial budaya tidak dapat terlepas dari kehidupan modern. Perkembangan zaman dari masa ke masa memiliki implikasi pada ranah kehidupan sosial tertentu, misalnya pada pesatnya pertumbuhan ranah pariwisata. Pulau Lombok menjadi salah satu destinasi yang terkenal baik secara nasional maupun internasional. Di sisi lain, pertumbuhan pariwisata tersebut secara tidak langsung telah menggeser budaya lokal setempat. Industri wisata di Lombok memengaruhi aspek budaya. Pendidikan kontekstual diperoleh dari internalisasi sistem sosial yang ada. Disposisi masyarakat ke arah wisata mesti diimbangi dengan pemenuhan modal sosial. Berdasarkan pendapat beberapa informan, pariwisata menyentuh identitas yang paling utama, yaitu budaya.

Lombok sebagai bagian industri wisata telah mengakselerasi konstruksi infrastruktur yang membuat pariwisata melaju. Dengan kekayaan tersebut promosi wisata sejak 2016 dengan tajuk "Pesona Lombok-Sumbawa" yang dicanangkan Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memuat pariwisata berbasis alam dan budaya sebagai program andalan. Geliat promosi diperluas melalui desimisasi informasi. Komunikasi berperan besar terhadap diseminasi informasi, yang melingkupi kesesuaian antara harapan, kebutuhan dengan internalisasi sebaran informasi (Sujarwo et al. 2011; Tulung 2014; Setyanto and Winduwati 2018; Ringo and Wirawan 2020).

Pada kenyataannya, perubahan industri wisata pada gilirannya berimbas pada aspek sosial dan budaya masyarakat. Perubahan paradigma ke bidang ekonomi memicu bergesernya nilai kultural bersisian dengan pariwisata dalam menopang pembangunan. Masyarakat Sade Lombok Tengah misalnya menyeimbangkan diri dengan pariwisata lewat strategi adaptasi privasi (Paramita 2017). Kegiatan privasi seperti memasak, yang sebelumnya sangat tertutup diubah menjadi komoditas untuk menarik minat dan perhatian wisatawan. Konsep wisata budaya berisi serangkaian kegiatan kebudayaan yang bisa dinikmati tidak hanya ditonton tetapi wisatawan dapat menjadi objek kebudayaan (Hasanah 2019). Dengan beragam strategi untuk mentransmisikan

program literasi, Komunitas Lontar selaras dengan pendidikan kontekstual yang dikenalkan Paulo Freire. Pendidikan sebagai tawaran rasional, bertolak dari manusia yang tidak terpisah dari realitas dan memiliki kesadaran humanis untuk beradaptasi dengan realitas budaya maupun sosial masyarakat (Al-fadhil 2016; Warpala 2019; Rohinah 2019; Manggeng 2005). Melalui dialog, modal sosial dapat menjadi rekonstruksi untuk pengembangan sumber daya manusia. Komunitas Lontar menerapkan beragam strategi mengenalkan habitus membaca kepada semua kalangan. Peningkatan kesadaran kritis dalam pandangan pedagogi kritis dapat diupayakan dengan cara menghadirkan permasalahan, ekonomi, politik dan budaya yang dihadapi masyarakat sehari-hari (Monchinski 2008).

Berdasarkan keterangan para informan, kontribusi komunitas terhadap literasi masyarakat berkaitan erat dengan identitas-identitas yang melekat pada masyarakat tersebut. Penyematan nama perpustakaan adat sesuai konteks Bayan sebagai desa adat dan Taman Baca Rinjani merujuk pada identitas masyarakat Sembalun. Ruang budaya, totemisme dan sosial masyarakat, yang terpapar budaya luar melahirkan akulturasi (Kian et al. 2019; Aslan, Setiawan, and Hifza 2019; Sunjayadi 2018; Septemuryantoro 2020).

Kendati demikian internalisasi objektif Lombok sebagai destinasi wisata tidak harus dilihat sebagai degradasi semata. Budaya dan pariwisata bukan sesuatu yang bertentangan, karena budaya tidak bersifat statis. Budaya dan pariwisata dapat dijadikan ranah dialektis modal budaya dengan modal ekonomi yang turut dibawa industri wisata, yang pada gilirannya membawa manfaat untuk masyarakat.

1. Lapak Baca

Lapak baca diadakan secara rutin di pelataran kampus Universitas Mataram. Sehubungan dengan pengembangan habitus budaya baca, Komunitas Lontar membuka lapak baca dengan menyediakan beragam buku. pemasangan *banner* kegiatan, serta pemanfaatan ruang terbuka di depan pintu keluar Universitas Mataram sebagai titik kegiatan, dipercaya sebagai strategi menarik minat baca mahasiswa maupun civitas akademika. Sedangkan modal sosial dialokasikan melalui publikasi melalui media, baik opini, artikel, maupun pengembangan media sosial.

Pelaksanaan Buka Lapak Baca tersebut memuat strategi pendukung dengan adanya kopi gratis dan berdonasi buku atau uang seikhlasnya bagi pengunjung di lapak baca Komunitas Lontar. Dengan strategi tersebut akan ada wadah pertukaran informasi dan kegiatan simbiosis yang terjalin antara Komunitas Lontar dengan pengunjung Lapak Baca.

2. Penulisan dan Bedah Buku

Penulisan ini dilakukan oleh para anggota atau siapapun yang ingin berkontribusi dengan Komunitas Lontar. Bentuk tulisan tidak terbatas pada konten. Tulisan fiksi maupun non-fiksi dikumpulkan menjadi satu kesatuan hasil tulisan dalam bentuk antologi buku atau membuat hasil tulisan tersebut menjadi file digital. Sedangkan kegiatan bedah buku merupakan salah satu kegiatan alternatif untuk mengenalkan dan mengembangkan suatu buku. Bedah buku berkaitan erat dengan sistem transfer pengetahuan guna menyebarkan materi dan memberi apresiasi terhadap penulis, sehingga suatu karya dapat bermanfaat untuk orang lain (Marliana dan Suhita 2018; Supriatna 2018; Apriansyah, Parlan, and Jasma 2017). Kegiatan bedah buku Komunitas Lontar dilakukan sekaligus meresensi buku. Kegiatan ini merujuk pada usulan dan kesiapan para pegiat yang ada dalam Komunitas. Kegiatan ini dilakukan selama sekali dalam sebulan. Dengan pertimbangan terkait kondisi dan kesiapan anggota yang sudah dijadwalkan.

3. Kampanye Media Sosial

Literasi tidak lepas dari keberadaan internet. Sejak program GLN dicanangkan, informasi melalui internet telah masuk dalam literasi digital. Komunitas lontar memanfaatkan dua akun media sosial sebagai sentrum kampanye dan sosialisasi literasi, yakni instagram dan facebook. Komunitas lontar pada Instagram menggunakan akun @lombokpintar, berisi beragam informasi mengenai agenda-agenda seperti, kegiatan lapak baca, diskusi, bedah buku, serta kegiatan dan situasi Taman Baca Masyarakat (TBM) yang telah didirikan. Selain Instagram, komunitas lontar juga menggunakan Facebook/Fans Page "Lontar Lombok". Media sosial digunakan sebagai sarana untuk mengundang teman-teman dari berbagai daerah untuk turut serta mengikuti kegiatan

Komunitas Lontar serta berdonasi buku-buku guna pemenuhan TBM. Media sosial merupakan sarana atau arena yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan kepada khalayak luas mengenai agenda-agenda literasi yang dilakukan oleh Komunitas Lontar. Media sosial memiliki karakteristik masif dan cepat memberikan peluang tersendiri bagi komunitas lontar mempublikasikan dan memperkenalkan literasi kepada masyarakat luas.

Literasi berkaitan erat dengan perkembangan jaman. Kelindan literasi dengan konteks sosial masyarakat terus-menerus mengalami pembaharuan untuk menjaga keseimbangan di tengah pembangunan pesat. Perlu ada dukungan kebijakan berbasis komunitas sebagai jaminan eksistensi literasi tetap mekar. Format demikian akan jadi titik temu atau ruang dialog transformatif antar pihak yang fokus pada literasi.

SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil penelitian, Komunitas Lontar berperan penting dalam menjalin simpul program Gerakan Literasi Nasional (GLN) dengan konteks sosial masyarakat khususnya di Pulau Lombok. Anggota komunitas berdekatan dengan kondisi empirik realitas sosial sehingga memahami lebih dekat kebutuhan faktual masyarakat. Komunitas Lontar menjalankan perannya dengan melakukan pembinaan intensif semenjak 2017 pada Taman Baca Masyarakat di dua Kabupaten yang menjadi destinasi wisata, seperti TBM Rinjani di wilayah lereng rinjani, dan Perpustakaan Adat Bayan untuk Desa Adat Bayan Kabupaten Lombok Utara. Dalam perjalanannya, Komunitas melakukan kerjasama timbal balik dengan semua pihak yang memiliki misi memajukan pendidikan. Sedangkan untuk strategi penyebaran budaya literasi, Komunitas Lontar memanfaatkan ruang publik sebagai tempat melapak buku, diskusi ilmiah dan penulisan di dalam ruang kelas, serta menggunakan media sosial untuk kampanye literasi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka pemerintah mesti mengintensifkan keterlibatan komunitas literasi di wilayah Nusa Tenggara Barat secara luas untuk menumbuhkan budaya literasi yang holistik. Program ini dapat dilakukan pertama melalui lomba, baik lomba taman baca maupun lomba penulisan. Kemudian, kebijakan GLN yang selama ini dijalankan perlu dievaluasi

secara menyeluruh sehingga kebijakan maupun programnya tidak sebatas implementasi.

PUSTAKA ACUAN

- Agusta, Aras Satria. 2020. "Komunitas Baca Dalam Menyebarkan Virus Literasi 'Perpustakaan Jalanan DIY.'" *IQRA: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi (e-Journal)* 14, no. 1: 29. <https://doi.org/10.30829/iqra.v14i1.6350>.
- Al-fadhil, Musa. 2016. "Mazhab Pendidikan Kritis; Proses Humanisasi Pendidikan." *MUDARRISUNA (Media Kajian Pendidikan Agama Islam)* 6, no. 1: 33–52.
- Andina, Elga. 2017. "Pentingnya Literasi Bagi Peningkatan Kualitas Pemuda." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI IX*, no. 21: 9–12.
- Anggraini, Siti. 2016. "Budaya Literasi Dalam Komunikasi." *Wacana XV*, no. 3: 264–79.
- Apriansyah, Migi, Parlan, and Suardi Jasma. 2017. "Managemen (TBM) Pkbm Anraguta Kota Bengkulu." *Journal of Community Development* 1, no. 1: 1–6.
- Aslan, Aslan, Agus Setiawan, and Hifza Hifza. 2019. "Peran Pendidikan Dalam Merubah Karakter Masyarakat Dampak Akulturasi Budaya Di Temajuk." *Fenomena* 11, no. 1: 11–30. <https://doi.org/10.21093/fj.v11i1.1713>.
- Astuti, Eka Zuni Lusi. 2019. "Gerakan Literasi Digital: Studi Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Sistem Informasi Potensi Kreatif Desa Di Kulonprogo." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 3, no. 2: 331–52. <https://doi.org/10.14421/jpm.2019.032-05>.
- Creswell, J W. 2009. "Research Design Qualitative, Quantitatif Dan Mixed." In *Terjemahan*, edited by Ahamad Fawaid, Edisi Keti. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Freire, Paulo diterjemahkan F. Danuwiyata. 2008. *Pendidikan_Kaum_Tertindas*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Håklev, Stian. 2008. "Mencerdaskan Bangsa - Suatu Pertanyaan Fenomena Taman Bacaan Di Indonesia." University of Toronto. <https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/16623>.
- Hamzah, A. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, Dan Hasil Penelitian. Literasi Nusantara*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hasanah, Raodatul. 2019. "Kearifan Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Desa Sade Kabupaten Lombok Tengah." *Art and Design Journal* 2, no. 1: 45–52.
- Herdiana, Dian, Rendi Heriyana, and Reza Suhaerawan. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Literasi Perdesaan Di Desa Cimanggu Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 4, no. 4: 431–42. <https://doi.org/10.30653/002.201944.208>.
- Irham, A. Muhammad. 2019. "Praktik-Praktik Kultural Dalam Mengembangkan Budaya Baca Pada Perpustakaan Komunitas 'Perpustakaan Jalanan' Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Journal of Chemical Information and Modeling*. Universitas Airlangga.
- Kalida, Muhsin. 2015. *Capacity Building Perpustakaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Kian, Donatus Ara, Robertus M. Rayawulan, Yuliana Mberu, and Budhi B. Lily. 2019. "Makna Ruang Dalam Budaya Masyarakat Sikka." *Jurnal Arsitektur KOMPOSISI* 12, no. 2: 105. <https://doi.org/10.24002/jars.v12i2.2045>.
- Lestari, Dhini, and Slamet Subekti. 2019. "Peran Perpustakaan Jalanan Semarang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 6, no. 3: 431–40. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/23175>.
- Lintang Pamungkas, Nabil. 2020. "Penyerahan Agenda Politik Pemerintah: Pengelolaan Kebijakan Smart Kampung Berbasis Society Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Transformative* 6, no. 1: 48–71. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.01.3>.
- Manggeng, Marthen. 2005. "Pendidikan Yang Membebaskan Menurut Paulo Freire Dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia." *Intim: Jurnal Teologi Konstekstual* 8, no. 8: 41–44. http://www.academia.edu/download/49974075/Paulo_Freire.pdf.

- Marliana, N. Lia, and Sri Suhita. 2018. "Pengembangan Program Gerakan Literasi Sekolah Bagi Para Siswa Sdn Cinyosog 01 Cileungsi." *Jurnal Tuturan* 6, no. 1: 762. <https://doi.org/10.33603/jt.v6i1.1586>.
- Monchinski, Tony. 2008. *Critical Pedagogy in the Everyday Classroom. Critical Pedagogy And The Everyday Classroom*. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8463-8_4.
- NS, Sutarno. 2008. *Membina Perpustakaan Desa*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Paramita, Sinta. 2017. "Lokal Perspektif Komunikasi Pariwisata Masyarakat Di Desa Sade Lombok." *Jurnal Visi Komunikasi* 53, no. 9: 146–56.
- Permatasari, Ane. 2015. "Membangun Kualitas Bangsa Dengan Budaya Literasi." In *Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB*, 146–56.
- Ringo, R L S, and IGMPD Wirawan. 2020. "Strategi Komunikasi Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Baru Berbasis Alam Dan Budaya Pada Obyek Wisata Kuta Mandalika Lombok." In ... : *Jurnal Ilmu Sosial ...*, 46–53. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/385>.
- Rohinah, Rohinah. 2019. "Re-Konsientisasi Dalam Dunia Pendidikan (Membangun Kesadaran Kritis Melalui Pemikiran Paulo Freire)." *Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan* 8, no. 1: 1. <https://doi.org/10.18592/tarbiyah.v8i1.2355>.
- Sayuti, Suminto A. 2017. "Budaya Literasi, Martabat Bangsa, Dan Pengajaran Sastra." In *Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 2–10. Purworejo: Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- Septemuryantoro, Syaiful Ade. 2020. "Potensi Akulturasi Budaya Dalam Menunjang Kunjungan Wisatawan Di Kota Semarang." *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 16, no. 1: 75–94. <https://doi.org/10.33633/lite.v1i1.3434>.
- Setyanto, Yugih, and Septia Winduwati. 2018. "Diseminasi Informasi Terkait Pariwisata Berwawasan Lingkungan Dan Budaya Guna Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan (Studi Pada Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Komunikasi* 9, no. 2: 164. <https://doi.org/10.24912/jk.v9i2.1077>.
- SuaraNTB. 2019. "Soal Minat Baca, NTB Peringkat 31 Nasional." *Suarantb.Com*, 2019. <https://www.suarantb.com/soal-minat-baca-ntb-peringkat-31-nasional/>.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujarwo, W, J M Bunyi, EP Lianos, and EP Ore. 2011. "Tourism Potential Assessment in the Watershed Area of the Wilde and Rote Weiberitz." Germany.
- Sunjayadi, Achmad. 2018. "Akulturasi Dalam Turisme Di Hindia-Belanda." *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya* 8, no. 1: 11. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v8i1.229>.
- Supriatna, Neka Rusyda. 2018. "Bukan Hanya Tempat Mencari Informasi, Tetapi Tempat Berbagi Pengetahuan : Studi Kasus Di Perpustakaan Chandra Widodo." *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, Dan Kearsipan* 20, no. 2: 87–95. <https://doi.org/10.7454/jipk.v20i2.117>.
- Tulung, Freddy H. 2014. *Berkomunikasi Di Ruang Publik: Implementasi Kehumasan Pemerintah. Indonesia: Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI*. Kominfo.
- Warpala, I Wayan Sukra. 2019. "Pembelajaran Kontekstual: Sebuah Inovasi Penerapan Pendidikan Multikultural Dan Belajar Untuk Penemuan." *Edukasi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1: 21–27.
- Yanto, A, S Rodiah, and E Lusiana. 2016. "Model Aktivitas Gerakan Literasi Berbasis Komunitas Di Sudut Baca Soreang." *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* 2, no. 1: 107–18.
- Yunus, Syarif. 2020. "Tidak Cukup Biaya, 70% Taman Bacaan Di Indonesia Bangkrut." *Kumparannews*, 2020. <https://m.kumparan.com/amp/syarif-yunus/tidak-cukup-biaya-70-taman-bacaan-di-indonesia-potensi-bangkrut/>.